

DISERTASI

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

*TOURISM DEVELOPMENT SERVICE OF SPORTS AND TOURISM IN
SIDERENG RAPPANG DISTRICT*

**SOFYAN B.
E013191006**



**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

***TOURISM DEVELOPMENT SERVICE OF SPORTS AND TOURISM IN
SIDERENG RAPPANG DISTRICT***

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
Program Studi Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

**SOFYAN B.
E013191006**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

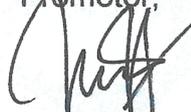
SOFYAN B.

E013191006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 02 Mei 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP 195708181984031002

Co. Promotor,



Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.
NIP 197003011999031001

Co. Promotor,



Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.
NIP 196801011997022001

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,



Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.
NIP 196012311986011005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : SOFYAN B.

Nomor Mahasiswa : E013191006

Program Studi : S3 Administrasi Publik

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul **“Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Maret 2023
Yang menyatakan,



SOFYAN B.

ABSTRAK

SOFYAN B. *Perencanaan pengembangan pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Juanda Nawawi, Muhammad Rusdi, dan Hasniati).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pendekatan *participatory planning*, pendekatan potensi dan karakteristik, pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendekatan kewilayahan, optimalisasi potensi, dan aspek penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dari sisi pendekatan *participatory planning* adalah (1) keberhasilan ditentukan oleh banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang ikut berperang penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Banyaknya yang terlibat atau berpartisipasi dalam perencanaan ini memberikan pengaruh besar terhadap beberapa aspek seperti ekonomi dan budaya, (2) daya tarik objek wisata yang ada memiliki nilai-nilai budaya yang khas dan masih lestari. Karakteristik produk budaya tersebut menjadi ciri khas budaya yang ada seperti suku Tolotang. Karakter budaya dan karakteristik produk budaya berpotensi besar dalam pengembangan pariwisata, (3) partisipasi atau keikutsertaan dalam pengembangan pariwisata telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pelatihan dan edukasi mengenai kepariwisataan, (4) pemerintah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata menjadi fasilitator dalam mendukung keterlibatan aktor-aktor yang dapat mengembangkan potensi wisata, (5) optimalisasi potensi wilayah menjadi acuan dan keberhasilan perencanaan pengembangan pariwisata berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan *stakeholder* yang bergerak di bidang jasa pariwisata serta membangun kerja sama dengan investor untuk menunjang pada wilayah anggaran, (6) aspek penghambatnya yaitu peraturan yang timpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

Kata kunci: perencanaan, pengembangan, pariwisata



ABSTRACT

SOFYAN B. *Tourism Development Planning of Youth, Sport, and Tourism Office at Sidenreng Rappang Regency* (supervised by Juanda Nawawi, Muhammad Rusdi and Hasniati).

The research aims at describing and elaborating the participatory planning approach, potential and characteristic approach, community empowerment approach, territoriality approach, potential optimisation and its inhibition aspect. The research used the qualitative descriptive approach through the case study. Data were collected using the observation, interview, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). The data were processed in the data reduction, data presentation, verification, conclusion drawing. The research result indicates that the tourism development at Sidenreng Rappang Regency can be seen from the aspects of: (1) the participatory planning approach success with many elements and parties who have the important participation in the tourism development, many parties involve or participate in the planning, also give the great influence to several aspects such as the economic and cultural aspects. (2) The attraction of an existing tourism object has the typical cultural values which are still long-lasting, while the product characteristics as the typical existing culture such as Tolotang culture becoming the cultural character has only the potential meaning and cultural product characteristic in the tourism development. (3) The participation in developing the tourism has provided the facilities for the community in the forms of the training and education about tourism. (4) The local government through the Youth, Sport, and Tourism Office has functioned well starting from the government role in the tourism development as the facilitator by supporting the actors' involvement which can develop the tourism potential. (5) The optimal regional potential becomes the reference and tourism development planning success based on the community participation level who takes part in the tourism the cooperation with the investors to support in terms of the budget. (6) The inhibiting aspects are: the overlapping regulations, lack qualified human resources, lack of publication, low quality infrastructures, lack of investment, lack of attention on living environment aspect, and lack of attention of religious tourism objects.

Key words: planning, development, tourism.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya serta salam dan shalawat tercurah kepada Muhammad Rasulullah SAW. sang teladan bagi umat manusia, yang mengantarkan dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **“Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor pada Program Studi S3 Administrasi Publik, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulisan disertasi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses studi dan proses penyusunan disertasi ini. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. selaku Ketua Komisi penasihat Promotor, Dr. Muhammad Rusdi, M. Si. Selaku Kopromotor I dan Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si. selaku Kopromotor II atas ketulusan hati dan

kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan disertasi ini.

2. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Hamsinah. M.Si. selaku penguji I, Dr. Syahribulan, M.Si. selaku penguji II dan, Dr. Indrayati Nur Indar, M. Si. selaku penguji III yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
3. Terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Lukman Samboteng, M. Si., selaku penguji eksternal yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik atas pembinaan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi.
5. Prof. Dr. Phil. Syukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. Para Mahaguru Bapak dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah atas curahan ilmu pengetahuannya selama masa studi dan seluruh staf yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin.
7. Kedua orang tua ayahanda La Bekka dan Ibunda Hj. Isa (Almarhumah) mertua H.Roma (Almarhum) dan Hj. Dewi

(Almarhumah) tercinta atas semua kasih sayang, doa, bimbingan, dan dukungannya.

8. Orang yang paling spesial dalam hidup saya, Istriku tercinta Hj. Husni Roma yang tidak henti-henti selalu sabar dan setia memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan disertasi ini.
9. Anak, Cucu dan menantu yang amat penulis sayangi, dengan sabar memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan para Wakil Rektor yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor.
11. Ketua, sekretaris dan rekan dosen Jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang atas dukungan moral dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor.
12. Para tenaga pendidik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang senantiasa memberikan semangat, doa dan bantuannya dalam memudahkan pengurusan kelengkapan berkas selama menempuh pendidikan.
13. Sahabat-sahabat terbaik Program Doktor Pascasarjana Administrasi Publik angkatan 2019 atas dukungan moral dan spiritualnya yang selalu berbagi canda tawa dan suka dukanya selama menempuh studi hingga sekarang, atas bantuan semangat dan kebersamaan selama ini yang takkan terlupakan.

14. Adinda, Dr.Firman Saleh,S.S.,S.Pd.,M.Hum. dan Dr. Sam Hermansyah, S.Pd., M. Pd.,
15. Adinda, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.A.P dan L.A. Sanrang, S.Pd., M.Pd.I. Atas bantuan, semangat dan kebersamaan selama ini dalam penyelesaian studi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan-Nya dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan disertasi ini. Amin.

Makassar, 03 Maret 2023

SOFYAN B.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Relevan.....	13
B. Landasan Teori.....	16
1. Pengembangan Pariwisata Perspektif Administrasi Publik	16
2. Peran dan Strategi Pemerintah Pengembangan Pariwisata	21
3. Konsep Pengembangan Parawisata	23
4. Jenis-Jenis Wisata	27
5. Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata	33
6. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata	39
7. Pengembangan Pariwisata dan Masyarakat.....	45
8. Perkembangan Bentuk Pariwisata	56
9. Aspek-Aspek Penghambat Pengembangan Pariwisata	61
C. Kerangka Pikir	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Jenis Penelitian	71

B. Lokasi Penelitian	72
C. Sumber Data Penelitian.....	72
1. Data Primer.....	73
2. Sekunder	73
D. Teknik Pengumpulan Data	74
1. Observasi.....	74
2. Wawancara.....	74
3. Data Dokumentasi	75
4. Focus Grup Discussion (FGD).....	75
E. Informan Penelitian.....	76
F. Fokus Penelitian	77
G. Teknik Analisis Data	78
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	81
A. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	81
B. Potensi Wilayah.....	82
C. Kependudukan	88
D. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	89
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	90
F. Visi, Misi dan Program.....	95
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	97
1. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ..	97
2. Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata.....	166
BAB VI PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	206
1. Aspek Praktis.....	206
2. Aspek Teoretis.....	206
C. Novelty Penelitian.....	207
D. Rekomendasi Pengembangan Pariwisata	208
DAFTAR PUSTAKA.....	209

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Prinsip Sustainable Tourism Development	42
Gambar 2. Kerangka Pikir	69
Gambar 3. Peta Administrasi Sidenreng Rappang	81
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Potensi Penghasil Tanaman Sayur	82
Tabel 2. Potensi Penghasil Jenis Sayur	82
Tabel 3. Potensi Produksi Tanaman Sayuran	83
Tabel 4. Potensi Produksi Jenis Tanaman	84
Tabel 5. Potensi Tanaman Biofarnika Jahe dan Lengkuas	85
Tabel 6. Potensi Tanaman Biofarnika Kencur dan Kunyit	85
Tabel 7. Potensi jumlah Buah Mangga dan Durian	86
Tabel 8. Potensi jumlah buah jeruk dan pisang	87
Tabel 9. Jumlah Penduduk	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata menjadi suatu komoditas baik perseorangan maupun berkelompok sehingga sampai saat ini pariwisata telah menjadi potensi dalam menambah devisa negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan pengembangan sosial dan memelihara budaya. Pariwisata Indonesia mulai dikembangkan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1969 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Nasional. Usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan pasal 4 Inpres No.9 Tahun 1969 yaitu: 1) memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan, 2) menyediakan atau membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader, 3) menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri.

Pengembangan pariwisata yang dimiliki oleh setiap negara dapat menjadi modal utama dengan adanya potensi alam, budaya, dan potensi buatan dalam menggerakkan roda perekonomian. Peranan sektor pariwisata nasional semakin menunjukkan sentimen positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah

kontribusinya terhadap penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.

Perubahan perkembangan pariwisata di Indonesia dalam upaya mendatangkan wisatawan berkunjung di Indonesia. Formulasi strategi pemerintah dengan beberapa "*tagline*" promosi pariwisata yaitu "*Indonesia, there is more to it than Bali*", "*Indonesia, Bali and Beyond*", serta "*Indonesia, Bali plus Nine*". Pembentukan 10 daerah tujuan wisata (DTW) dalam rencana pembangunan lima tahun (pelita) III pariwisata Indonesia. Pada tahun 1980an Indonesia untuk pertama kali mengikuti *World Tourism Market* (WTM) menandai dimulainya era promosi pariwisata secara internasional, seiring dengan lahirnya kebijakan strategi pokok pariwisata dalam Pelita V yakni Promosi pariwisata yang konsisten, Penambahan aksesibilitas, Mempertinggi kualitas pelayanan dan produk pariwisata, Pengembangan DTW, Promosi daya tarik alam, satwa dan wisata bahari, Mempertinggi kualitas SDM, dan Melaksanakan kampanye sadar wisata melalui Sapta Pesona.

Upaya memperkecil berbagai dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pariwisata lahirlah pemikiran untuk mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak pada masyarakat di sekitar objek wisata, yang kemudian dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas/masyarakat. Di Indonesia, penerapan

CBT tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Bab III pasal 5 yaitu Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata adalah memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian, Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat (lokal). Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan perubahan penting dalam hal pendekatan pembangunan pariwisata menjadi berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan ilmu administrasi publik bahwa pengembangan pariwisata bisa dikaji melalui beberapa pendekatan, seperti yang dikemukakan oleh Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan Pariwisata meliputi pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis; Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok; Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana; Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di

suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Menurut Gunn (1988:87) menyatakan bahwa suatu daya tarik wisata terbentuk dari empat elemen pokok yang harus direncanakan secara terpadu, yaitu (1) rumpun daya tarik, (2) masyarakat, (3) jalur sirkulasi, dan (4) jalur hubungan. Rumpun daya tarik terbagi menjadi objek wisata alam, budaya, dan minat khusus. Akan tetapi hingga saat ini ketiga jenis objek wisata tersebut belum terintegrasi satu sama lain. Selain aspek penataan kawasan, aspek prasarana dan sarana juga kurang menunjang kegiatan wisata.

Misalnya banyaknya objek wisata namun kurang didukung dengan aksesibilitas yang ada, minimnya lahan parkir yang menimbulkan kemacetan apalagi pada hari libur panjang, jalur pelayanan jasa angkutan juga belum terintegrasi sampai ke lokasi objek wisata dan jadwal pelayanan angkutan hanya pagi sampai sore, daya dukung tanah lemah dengan banyaknya kendaraan berat yang melintas sehingga sering menyebabkan longsor pada jalan-jalan menuju lokasi ODTW, adanya permasalahan ketersediaan air bersih yang masih belum tersedia secara menyeluruh, permasalahan pengangkutan sampah yang masih belum maksimal (belum adanya fasilitas pengangkutan sampah wisata tersendiri).

Aspek ketertiban, permasalahan diakibatkan oleh ketidakteraturan pedagang kaki lima di pinggir jalan yang semakin menambah kemacetan bagi pengunjung. Kondisi ini semakin diperparah dengan penataan yang kurang tepat dan melebihi daya tampung. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang begitu sesak sehingga mengakibatkan pengunjung tidak leluasa menikmati wisata. Selain itu usaha untuk meningkatkan daya tarik wisata harus selalu ditingkatkan untuk mengatasi persaingan pada pangsa pasar lokal dan untuk menyediakan pelayanan yang layak bagi pengunjung pada kawasan wisata.

Merujuk kepada UU Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata merupakan suatu aktivitas kegiatan perjalanan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mendatangi objek-objek tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Industri kepariwisataan mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 1992 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 60 tahun 1992 ditetapkanlah Dekade Kunjungan Wisata (Dekuni) sebagai bagian kampanye pariwisata Indonesia dengan mengambil tema berbeda setiap tahunnya. Data statistik perjanuari hingga desember 2015 menunjukkan pencapaian pembangunan pariwisata Indonesia mampu melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 10,4 juta orang dari target 2015 sebesar 10 juta orang. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tersebut memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 144 triliun.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata.

Pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata. Mampu menjadi mapan dan ramai

untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah, begitu pula pada sektor pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil pengamatan dengan didukung berbagai informasi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditangani oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dihadapkan oleh berbagai fenomena yang dapat dan diidentifikasi bahwa peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.

Peters dan Jhon Bryden (2004:79), mengungkapkan bahwa tujuan dari pembangunan/pengembangan pariwisata adalah memberikan dampak yang menguntungkan bagi wisatawan yang berupa kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Ketika kebutuhan wisatawan yang terpenuhi secara memuaskan berarti mewujudkan pengembangan pariwisata. Tingkat kepuasan pengunjung sangat tergantung pada kualitas produk wisata yang akan dijual, apakah produk wisata itu benar-benar memenuhi keinginan/harapan pengunjung atau tidak. Bila harapan dan kenyataan seimbang atau sesuai dengan yang diimpikan, maka dapat disimpulkan pengunjung sudah merasa puas. Namun jika kenyataan lebih kecil dari harapan pengunjung, maka tingkat kepuasan rendah. Menurut Yoeti

(1985:68), situasi yang ideal untuk menjual produk wisata adalah kombinasi dari penciptaan harapan yang tinggi (*creating high expectation*) dan memuaskan dengan kenyataan/pelayanan sesuai atau melebihi apa yang diharapkan dari sebuah kualitas produk wisata.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aditya pada tahun 2018 yang berjudul Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Objek Wisata di Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya, Rizki melihat formulasi strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh: (1) daya kompetitif yang rendah untuk menghadapi ancaman dari destinasi objek wisata lainnya oleh karena itu diperlukan strategi defensive yang memfokuskan pada objek wisata yang disukai oleh masyarakat sekitar dan pengunjung, (2) meningkatkan informasi dan promosi, (3) memanfaatkan dana bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dana CSR yang ditawarkan oleh pihak swasta, (4) pembenahan kualitas infrastruktur dan fasilitas pengunjung. dan kuantitas

Penelitian yang dilakukan oleh Afisi Sabri (2014) yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru, Afisi melihat Analisa strategi pengembangan objek wisata ditentukan oleh: (1) diperlukannya pembagian danau bandar kayangan menjadi beberapa zona, (2) membuat masterplan arahan dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan, (3) peningkatan

fasilitas dalam pengelolaan objek wisata danau bandar kayangan, (4) optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan. Lebih jauh M Rian Saputra (2016), melalui penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Gunung Andong Magelang, strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh: (1) meningkatkan fasilitas melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti jasa pemandu wisata, poster dan penyediaan alat untuk pendakian, (2) melakukan promosi intensif mengenai objek wisata, melakukan kerjasama dengan investor, dan melakukan pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia, serta membangun toko-toko cenderamata, (3) menyediakan alat transportasi untuk pengunjung objek wisata dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk promosi objek wisata, (4) mengajukan proposal permohonan bantuan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi awal (28 Oktober dan 6 November 2021), dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memfokuskan pada formulasi kebijakan yang bersifat infrastruktur namun tidak pada cagar budaya atau strategi. Kondisi kepariwisataan Kabupten Sidenreng Rappang sendiri sampai saat ini belum teroganisir dengan baik sehingga

objek wisata yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung. Berbagai kritik tersebut tentu sangat penting untuk dijawab, konsep pengembangan pariwisata saat ini berusaha untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sehingga mengurangi tingkat kekurangan ekonomi dan memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata di Kabupaten khususnya diberbagai wilayah perdesaan/kelurahan dinilai cukup signifikan dilakukan.

Pengembangan pariwisata merupakan satu dari sedikit pilihan yang layak untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi pedesaan. Melalui pariwisata, akan terjadi perbaikan infrastruktur, aliran modal masuk. Kewirausahaan, dan arus barang dan jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar. Salah satu media yang mampu mengalihkan atau mendistribusi peluang ekonomi dari daerah perkotaan ke kelurahan adalah pariwisata. Peningkatan peluang sumber daya ekonomi ini penting sebab kawasan kelurahan Lawawoi masih berada dalam taraf kemiskinan yang ditandai antara lain oleh aktivitas non-pertanian yang lemah, keterbatasan infrastuktur dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa yang penting. Pariwisata dapat mengakselerasi: (a) Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, (b) Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, (c) Perbaikan dan pemeliharaan layanan publik dan infrastuktur dasar, serta berbagai rumah adat yang

sudah terbengkalai dan (e) revitalisasi industri kerajinan, tradisi, dan identitas budaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan formulasi isu yang disampaikan pada latar belakang masalah, penelitian ini mencoba mencari penjelasan-penjelasan empirik atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan yang dicapai sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah hasil penelitian diharapkan dapat berfungsi inovatif. Selain itu, diharapkan dapat menambah khasanah wacana dan referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang pariwisata.

Suatu penelitian juga diharapkan mampu berkontribusi kepada masyarakat luas, dan dapat memengaruhi kebijakan bagi pengembangan dan pelaksanaan pembangunan bangsa. Berdasarkan pada pandangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangsih pemikiran kepada para ilmuan dan praktisi administrasi publik, Sumbangsih pemikiran yang dimaksud dalam hal penerapan Formulasi Strategi Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelesaikan masalah publik, khususnya pengembangan objek wisata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah, *Stakeholder*, Lembaga non pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal mengelola masalah publik, khususnya pengembangan objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Almuktabar, 2004. dalam Disertasi yang berjudul: Formulasi Strategi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Daerah (Studi tentang Pemanfaatan sumber daya manusia setempat dikabupaten Bulukumba). Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa harapan utama pihak luar, harapan utama pihak dalam, pangkalan Data, dan nilai-nilai Kepemimpinan berpengaruh sangat signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya daerah.

Andi Risma Jaya, 2017 Dalam Disertasi berjudul: Manajemen Strategik pengembangan Kawasan parawisata dinas kebudayaan dan parawisata kabupaten Bulukumba. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa diperlukan perhatian lebih pemerintah daerah dalam manajemen strategik pengembangan Kawasan parawisata, faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mendukung dalam penegembangan parawisata harus lebih diutamakan kekuatan atau potensi wisatanya.

Rizky Aditya, Dalam Disertasi Berjudul: Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Objek Wisata di Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya, Rizki melihat formulasi strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Dimana hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman ditentukan oleh: (1) daya kompetitif yang rendah untuk menghadapi ancaman dari destinasi objek wisata lainnya oleh karena itu diperlukan strategi defensive yang memfokuskan pada objek wisata yang disukai oleh masyarakat sekitar dan pengunjung, (2) meningkatkan informasi dan promosi, (3) memanfaatkan dana bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dana CSR yang ditawarkan oleh pihak swasta, (4) pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan fasilitas pengunjung.

Afisi Sabri dalam Disertasi yang berjudul: Analisis strategi. Pengembangan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan di Kota Pekanbaru, Afisi melihat Analisa strategi pengembangan objek wisata ditentukan oleh: (1) diperlukannya pembagian danau bandar kayangan menjadi beberapa zona, (2) membuat masterplan arahan dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan, (3) peningkatan fasilitas dalam pengelolaan objek wisata danau bandar kayangan, (4) optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata danau bandar kayangan.

M Rian Saputra Dalam Disertasi yang Berjudul: Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kawasan Gunung Andong Magelang, strategi pengembangan destinasi objek wisata dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu SWOT. Dimana hasil analisis dan temuan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ditentukan oleh :

1. meningkatkan fasilitas melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti jasa pemandu wisata, poster dan penyediaan alat untuk pendakian.
2. Melakukan promosi intensif mengenai objek wisata, melakukan Kerjasama dengan investor, dan melakukan pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia, serta membangun toko-toko cenderamata.
3. Menyediakan alat transportasi untuk pengunjung objek wisata dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk promosi objek wisata
4. Mengajukan proposal permohonan bantuan ke pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan rekomendasi temuan penelitian yang telah dilakukan khususnya yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata, dapat dilihat dalam Tabel berikut:

B. Landasan Teori

1. Pengembangan Pariwisata Dalam Perspektif Administrasi Publik

Menurut Bakaruddin (2008:17) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” berarti penuh, sedangkan “wisata” artinya perjalanan. Sehingga secara keseluruhan pariwisata diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan. Secara etimologis pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”, pari berarti banyak, berkali-kali, berulang-ulang, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian, jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat lain.

Pengertian lainnya tentang pariwisata adalah, suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan

rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996:118).

Upaya pembangunan sektor pariwisata melibatkan seluruh masyarakat, disamping penyelenggara Negara dan swasta. Meskipun sudah banyak pelaksanaan dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta. Ini berarti untuk tercapainya keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya dukungan kesadaran dedikasi serta loyalitas dari segenap masyarakat selanjutnya Administrasi publik saat ini menjadi istilah yang tidak asing seiring dengan perkembangan jaman. Istilah ini tidak asing karena telah berkembang dikalangan masyarakat. Kalangan ilmuwan Administrasi publik, seperti yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011:7) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi publik telah tumbuh dan dikenal dengan sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai yang mendasari. Perkembangan

paradigma administrasi publik, khususnya dari Nicholas Henry (1975:27), sudah cukup dikenal di kalangan generasi muda ilmuwan dan serjana administrasi negara” di Indonesia (Sedarmayanti, 2010:7).

Nicholas Henry dalam Sedarmayanti (2010:7), memusatkan pengamatannya atas “lokus dan fokus” dari ilmu administrasi seperti di anjurkan Golembiewski (1977:54), membagi perkembangan ilmu pengetahuan administrasi negara meliputi 5 paradigma yang berlangsung dari tahun 1927 sampai tahun 1970 (dan seterusnya), khususnya di negara Eropa dan Amerika Serikat. Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2011:28) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu: 1). Paradigma dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926),. 2). Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937). 3). Adminitrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). 4). Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. 5). Adminsitration Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970).

Sedarmayanti (2010:7) mengungkapkan adanya paradigma dalam bidang ilmu pengetahuan administrasi negara yang telah berkembang selama ini, namun kemudian menambahkan 1 paradigma lain yaitu “administrasi negara baru” dimana berbagai dimensi dan aplikasi “nilai” yang ingin diwujudkan merupakan fokus pokok mengenai paradigma ini.

Frederickson dalam (Pasolong, 2011:30-32) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut: 1). Paradigma pertama, Birokrasi Klasik. 2). Paradigma kedua, Birokrasi Neo-Klasik. 3). Paradigma ketiga, Kelembagaan. 4). Paradigma keempat, Hubungan Kemanusiaan. 5). Paradigma kelima, Pilihan Publik. 6). Paradigma Keenam, Administrasi Negara Baru.

Tahun 1992 muncul paradigma yang bersifat Reformatif yaitu *Reinventing Government* yang dicetuskan oleh David Osborne dan T. Gaebler dan kemudian dioperasionalkan oleh Osborne dan Plastrik dalam (Pasolong, 2011: 33-34). Pada dasarnya paradigma ini diinspirasi oleh Presiden Reagan melihat pemerintahan bukanlah pemecahan masalah, justru beliau melihat sebagai masalah.

Paradigma berikut dikenal dengan *New Public Management* yang melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Paradigma ini dikenal dengan *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi), sebagai operasionalisasi dari *Reinventing Government* diutarakan oleh Osborne dan Plastrik (1997:51-62) yang mengemukakan makna kewirausahaan/*reinventing*, sebagai transformasi fundamental terhadap sistem dan organisasi publik untuk menciptakan peningkatan secara menakjubkan dalam efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan kapasitasnya untuk berinovasi.

Berbagai paradigma tersebut menawarkan teori, konsep, dan pendekatan tertentu yang berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sistem administrasi publik bersangkutan. Kemudian strategi baru ini mencapai puncaknya dengan diterapkan prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Paradigma *Reinventing Government* juga dikenal sebagai *New Public Management* dan menjadi populer ketika prinsip *Good Governance* diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu Vigoda dalam (Pasolong, 2011: 34), mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip NPM.

Berkaitan dengan pandangan ilmu administrasi publik bahwa pengembangan pariwisata bisa dikaji melalui beberapa pendekatan, seperti yang dikemukakan oleh Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan Pariwisata meliputi:

- a. Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis;
- b. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata;
- c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan

kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok

- d. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana;
- e. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

2. Peran dan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

Fungsi pemerintah dalam pembangunan pada berbagai tingkatan termasuk ditingkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai koordinator
- b. Pemerintah sebagai perumus pengembangan stratejik;
- c. Pemerintah sebagai regulator;
- d. Pemerintah sebagai penyedia;
- e. Pemerintah sebagai pemrakarsa.

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam strategi pengembangan keparawisataan daerah harus menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri pariwisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam stratejik pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi

keberhasilan sektor pariwisata. Bukan saja pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang harus terlaksana secara efisien dan efektif.

Guna melakukan solusi terhadap masalah dalam masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang mencakup semua yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga menjamin akan terlaksananya kebijakan tersebut, oleh karena itu dalam proses kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Peran pariwisata sangat menjunjung perkembangan perdagangan dan investasi luar negeri oleh karena itu, penetapan strategi perkembangan destinasi dan pemasaran pariwisata akan bermuara pada peningkatan devisa pariwisata menjadi sangat penting dan utama. Menurut Richardson dan fluker dalam La Ode Syaiful (2017:72-73) menyatakan umumnya strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang bisanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usahanya yang digeluti.
- b. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan

pengenalan produk baru.

- c. Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
- d. Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan dari organisasi
- e. Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- f. Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- g. Mendistribusikan sumber daya masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.
- h. Mengimplementasikan rencana
- i. Mengontrol dan memonitoring hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.

3. Konsep Pengembangan Parawisata

Parawisata merupakan fenomena baru dan relatif muda, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Meskipun begitu, parawisata dianggap belum memiliki kematangan terutama sebagai suatu bidang akademik. Menurut Hunziker dan Kraft dalam Muljadi (2012:17) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing atau keseluruhan hubungan perjalanan itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut

hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut Sastrayuda (2010:50) dalam pengembangan meliputi:

1. Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan

sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

Menurut Sinarta (2010:19) suatu objek wisata dikatakan layak dikembangkan apabila memiliki syarat-syarat pengembangan pariwisata antara lain:

1. *Attraction*: Segala sesuatu yang menjadi ciri khas dan menjadi daya tarik wisatawan agar mau berkunjung ketempat wisata tersebut.
2. *Accesibility*: Kemudahan cara untuk mencapai tempat wisata tersebut
3. *Amenity*: Fasilitas yang tersedia di objek wisata tersebut seperti hotel dan restoran
4. *Ancillary*: Merupakan tambahan pendukung dimana adanya organisasi atau pihak yang mengolah objek wisata tersebut.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Jenis-Jenis Wisata

Seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata biasanya sekedar untuk refreshing dan untuk berjalan-jalan. Selain dari itu ada yang melakukan perjalanan wisata dengan kegiatan berupa urusan bisnis ke suatu daerah tertentu. Ada beberapa jenis pariwisata yang berdasarkan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Menurut Ismayanti dalam Pranata (2012:10) jenis wisata dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:

a. Wisata Kuliner

Wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik menjadi motivasinya.

b. Wisata Olahraga

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung. Kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif. Dimana wisatawan tidak melakukan gerak olah tubuh, tetapi menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja.

c. Wisata komersial

Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran- pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

d. Wisata Bahari

Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut.

e. Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.

f. Wisata Bulan Madu

Suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

g. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata yang banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau cagar alam, Taman lindung, pegunungan, hutan daerah dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang- Undang.

Objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa: "segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan wisatawan daerah yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata”.

Menurut Muljadi (2012:89) sebuah destinasi wisata harus memiliki daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Dengan adanya objek daya tarik wisata yang kuat maka menjadi magnet untuk menarik para wisatawan. Pengembangan 11 kepariwisataan haruslah memiliki tiga aspek penting produk pariwisata, yaitu:

- a. Atraksi. Merupakan pusat dari industri pariwisata. Maksudnya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin mengunjunginya. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri-ciri khas tertentu. Ciri-ciri khas yang menarik wisatawan adalah:
 - a) Keindahan alam.
 - b) Iklim dan cuaca.
 - c) Kebudayaan.
- b. Amenitas. Merupakan berbagai fasilitas penunjang para wisatawan untuk berwisata ke suatu daerah tujuan wisata dengan kenyamanan dan kepuasan tersendiri. Hal tersebut antara lain akomodasi yang nyaman, restoran, bar, layanan informasi, pramuwisata, sikap masyarakat setempat, keamanan dan lain-lain.
- c. Aksesibilitas. Berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian suatu objek wisata. Serta unsur pendukung lainnya (pelaku industri pariwisata, masyarakat dan

institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan wisatawan. Menurut Ridwan (2012:5) menjelaskan bahwa pengertian objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan pengertian para ahli di atas penulis memberikan batasan objek wisata adalah sesuatu yang dapat dinikmati, dirasakan dan dilihat oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan puas dan kesenangan jasmani maupun rohani sebagai suatu hiburan.

Dewasa ini negara-negara yang menggalakkan pembangunan industri pariwisata dihadapkan pada tantangan tertentu akibat dari pertumbuhannya yang mengalami peningkatan sangat besar, bahkan cenderung melampaui pertumbuhan ekonomi. Tantangan itu mendorong pemikiran akan kebijakan untuk mengantisipasi agar industri pariwisata itu mampu berperan sebagai katalisator pembangunan bagi sektor lain sehingga dapat mendukung perekonomian negara.

Parawisata adalah industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga yang memiliki peranan yang cukup urgen dalam memberikan kesempatan kerja. Apalagi penciptaan kesempatan kerja yang permanen merupakan suatu faktor yang selalu perlu dipertahankan. Penerimaan devisa dari sektor industri pariwisata dapat dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan devisa dari perkembangan sektor

industri barang modal.

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perkembangan usaha akomodasi (hotel), Makanan, minuman, pengangkutan wisata, perencana perjalanan, pramuwisata, tenaga terlatih. Pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi, jalan, jembatan, terminal, lapangan udara, pembangkit tenaga listrik, air bersih, fasilitas olah raga, kantor pos dan telekomunikasi, bank, dan perusahaan asuransi.

Pengembangan Kepariwisata sebagai Suatu Tuntutan Perkembangan kegiatan keparawisataan yang sangat cepat membawa dampak terhadap peningkatan berbagai ragam produk pariwisata yang terbentuk dari hasil transformasi sumber daya yang memiliki muatan. Sistem nilai dan utilitas produk yang menjadi suatu tatanan produk dengan kapabilitas dan nilai tertentu untuk dapat dinikmati oleh wisatawan dengan minat dan harapan yang dimiliki berbagai daerah objek wisata yang marak tersebut, tentunya nilai perlu diperhatikan dengan cermat agar kualitas produk dapat terjaga dan sekaligus memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah setempat.

Pada pengembangan keparawisataan di Kabupaten Sidenereng Rappang suatu objek wisata unggulan, maka dalam prosesnya perencanaan harus melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, dengan kata lainnya diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder keparawisataan maupun dengan pihak lainnya terkait dengan pengembangan objek wisata khususnya Datae. Selain hal tersebut bidang

parawisata juga diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan tepat yang sesuai dengan karakteristik daerah serta melibatkan stakehoelders yang ada.

Pengembangan kepariwisataan adalah suatu pengembangan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melestarikan lingkungannya, meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mempertahankan budaya yang melibatkan *stakeholders* dalam bersinergi.

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang harus direncanakan dalam rangka membangun objek wisata dengan pendekatan holistic yang menjamin terciptanya sinergi antara bagian/sub satuan yang ada. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai pengembangan kepariwisataan maka perlu penanganan melalui perencanaan strategis yang tepat, yang mampu menemukan peluang-peluang dimasa depan sehingga mampu menyusun rencana untuk memanfaatkannya.

Kebutuhan akan perencanaan objek wisata di Kabupaten Sidenereng Rappang dilihat dari kebutuhan untuk mencapai sasaran pengembangan keparawisataan yang ditunjukkan oleh jumlah kunjungan wisatawan yang masih mengalami penurunan dan belum mampu kembali ke angka kunjungan pra krisis ekonomi (pandemi Covid-19), kebutuhan untuk menata ulang dan rencana objek wisata dimasa yang akan datang, serta pertimbangan bahwa objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sektor yang memiliki banyak keterkaitan dengan sektor objek

wisata lainnya, yang merupakan sifat dasar pengembangan pariwisata.

5. Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata

Prinsip pengembangan kawasan wisata adalah merupakan dasar-dasar penataan kawasan yang memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan kawasan wisata. Beberapa aspek yang terkait dalam penataan kawasan wisata adalah:

- a. Citra (*image*), yaitu pandangan secara fisik (*viewer exposure*) atau dengan merasakan (*viewer sensitivity*). Pandangan secara fisik berkaitan dengan jarak, elevasi dan pergerakan pandangan. Sedangkan pandangan yang melibatkan kepekaan perasaan tergantung pada sudut pandang, seperti karakter manusia, pendapat, pengalaman dan kesan yang ditimbulkan pada kawasan. Serta memiliki tema pengembangan, yaitu membentuk tema kawasan wisata yang mempunyai kawasan yang membedakan dengan kawasan wisata lainnya. Tema dapat berkaitan dengan kekhasan ekologi, iklim, sejarah atau sosial budaya setempat.
- b. Keteraturan, yaitu penataan kawasan yang baik dan teratur didukung desain interior dan eksterior yang menarik dengan pembagian fungsi yang jelas.
- c. Bangunan, yaitu orientasi bangunan yang sebaiknya ke arah pemandangan pegunungan. Ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke pemandangan pegunungan sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menikmati

pemandangan alam atau tidak mengacaukan garis langit (*skyline*).

- d. Keselamatan (*safety*), yaitu bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya musibah, seperti penataan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan konflik.
- e. Keamanan (*security*), yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk dalam beraktivitas di kawasan atau kota seperti penataan kota yang mencegah terjadinya gangguan kejahatan/kriminal.
- f. Pedestrian Ways yaitu bertujuan memberikan kemudahan berjalan mencapai dan menyusuri kawasan wisata sehingga tidak melelahkan, menghubungkan ruang-ruang publik, dan memberikan rasa senang untuk berjalan.

Atribut-atribut pengembangan di atas akan masuk dalam bagian aspek prasarana dan sarana produk wisata. Sehingga dalam aspek prasarana dan sarana terbagi dalam 3 kriteria yaitu kriteria sarana wisata, transportasi dan perancangan. Dalam fenomena saat ini terjadi pergeseran pasar wisata ditunjukkan oleh adanya pergeseran orientasi pengembangan produk wisata.

Konsep pengembangan wisata sebelumnya berorientasi pada pengembangan produk wisata massal (*mass tourism*) yaitu pengembangan skala besar pada budaya korporasi (*corporate culture*) secara multinasional. Pengembangan produk berorientasi pada volume dan target kuantitatif, serta berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Saat ini orientasi produk wisata menuju konsep produk wisata yang berkualitas (*quality tourism*).

Gunn (1994:19) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu: 1). Mempertahankan kelestarian lingkungannya 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. 3). Menjamin kepuasan pengunjung 4). Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat disekitar kawasan dan zone pengembangannya. Disamping ke empat aspek di atas, kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga secara spatial akan lebih bermakna, tergantung pada dimana lokasi pengembangan wisata berada.

Lebih lanjut Gunn (1994:21) merekomendasikan komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan kawasan wisata: 1). Atraksi atau sumber daya alam dan budaya 2). Perbaikan infrastruktur transportasi 3). Perbaikan usaha-usaha jasa 4). Perbaikan fasilitas penunjang atraksi 5). Peningkatan pendapatan dan peluang pasar 6). Peningkatan promosi 7). Penguatan organisasi dan kelembagaan yang akan menjalankan program 8). Penguatan kompetensi sumber daya manusia 9). Penguatan ekonomi lokal, regional dan nasional 10). Dukungan kebijakan lingkungan, politik, dan ekonomi 11. Peningkatan kepuasan wisatawan.

Jafari (Gartner, 1996:23-27) menganalisis empat pendekatan yang mendasari pembangunan pariwisata (*tourism platform*) yaitu pendekatan

advocacy (advocacy platform), cautionary (cautionary platform), Adaptacy platform, dan knowledge-base platform. Advocacy platform menekankan pada dampak ekonomi pariwisata sebagai dasar pijakan.

Pendekatan *cautionary* merupakan kritik dari pendekatan *advocacy* menyoroti berbagai dampak negatif yang dihasilkan industri pariwisata. Pariwisata tidak selalu baik atau jelek, tergantung pada respon masyarakat lokal terhadap kebutuhannya. Menurut pendekatan ini pembangunan pariwisata harus terfokus pada masyarakat, agar dapat memberikan dampak yang adil pada masyarakat setempat, melindungi atau meningkatkan budaya dan lingkungan di daerah tujuan wisata dan meningkatkan pertukaran sosial antara tuan rumah dan tamu.

Spillane (1994:28) menguatkan dengan argumentasi bahwa pengaruh negatif pariwisata bisa dikontrol dengan mencari bentuk lain pengembangan wisata (bentuk wisata alternatif). Pengembangannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. *Knowledge-base platform* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya pendekatan pariwisata secara holistik. Pendekatan pembangunan pariwisata harus menggunakan model yang multidisiplin atau pendekatan yang interdisiplin. Berbagai dampak negatif yang timbul dalam pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan *advocacy* dan *cautionary*.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, mulai dikembangkan wacana pembangunan pariwisata dengan menggunakan pendekatan adaptasi, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

pariwisata lebih bersifat mikro menekankan pada bentuk pariwisata yang lebih tertata, berkesinambungan dan menguntungkan masyarakat lokal. Pendekatan adaptasi yang lebih menempatkan pembangunan pariwisata sebagai instrument untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau pendekatan bentuk pariwisata berbasis masyarakat mendapat rekomendasi banyak ahli (Murphy, 1985; Mill dan Morison, 1985, Pearce et al. , 1998, Sandmeyer, 2005; Beeton, 2006:69).

Salah satu manfaat yang digarapkan dari pengembangan pariwisata di negara berkembang adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja (Gray, 1974:395; McCloy, 1975:49; Mathieson dan Walls, 1982:43;). Peluang kerja yang timbul dari industri pariwisata menurut Janata (dalam Warpani: 1997:88) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sektor dinamik dan sektor statik. Partisipasi ekonomi komunitas dalam dunia usaha pariwisata baik dihilir maupun dihilir menurut Nickerson (2001: 24) berkaitan dengan motivasinya.

Untuk meningkatkan motif dan selanjutnya dapat mendorong partisipasi ekonomi, komunitas harus mendapat dukungan dan bantuan. Pengembangan kewirausahaan dari luar yaitu pemerintah atau NGO atau lembaga donor lainnya (Getz dan Page, 1997:196). Aspek ekonomi pariwisata tidak lepas dari pengeluaran wisata (*tourist expenditure*) yaitu uang yang dibelanjakan wisatawan di daerah tujuan wisata (DTW) untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan selama berkunjung di suatu negara/daerah tujuan wisata. Uang yang dibelanjakan wisatawan dalam

ekonomi pariwisata disebut sebagai uang baru (*new money*) yang berdampak positif terhadap perekonomian negara/daerah yang dikunjungi (Oka, 2008:187).

Perhitungan pengeluaran wisata penting untuk menunjukkan secara nyata nilai pariwisata bagi suatu daerah. Hal itu juga penting untuk menggambarkan dampak spesifik pariwisata bagi ekonomi lokal seperti rumah tangga, usaha masyarakat lokal, perekonomian daerah dan sebagainya, serta sebagai dasar merencanakan fasilitas atau atraksi wisata baru, menggambarkan dampak pariwisata terhadap penerimaan ekonomi seperti gaji/upah, pekerjaan, dan yang lebih (Goldman, 1994:1). Penerapan prinsip sosial berkaitan erat dengan adanya interaksi tuan rumah dan tamu/wisatawan. Hubungan antara tuan rumah (masyarakat lokal) dengan pengunjung/wisatawan di daerah tujuan wisata sangat tergantung pada durasi waktu, intensitas, dan sifat kunjungan.

Kedalaman hubungan inilah yang menentukan dampak atau manfaat yang dapat diterima masyarakat di daerah destinasi wisata (Murphy, 1985:117). Page dan Hall (1999:122) merangkum dampak sosial-budaya pariwisata, sebagai berikut. Pengembangan pariwisata membawa dampak positif pada aspek sosial budaya antara lain: meningkatnya partisipasi serta minat komunitas terhadap kegiatan bersama dan menguatkan nilai tradisi setempat.

Sedangkan dampak negatif yang timbul, adalah komersialisasi aktivitas individu, modifikasi kegiatan dan aktivitas sesuai dengan tuntutan

pariwisata, peningkatan angka kejahatan, perubahan struktur komunitas, dan kerusakan sosial. Mathiason dan Wall (1982:143) mencatat dampak sosial-budaya yang secara umum timbul dari pengembangan pariwisata adalah efek demonstrasi (*demonstration effect*).

6. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata

Wisata Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah kawasan, disamping perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar di atas, juga harus dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat. Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian Kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku dikawasan tersebut. wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.
- b. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut,

tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih di maksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

- c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.
- d. Memberdayakan masyarakat kawasan wisata. Unsur penting dalam pengembangan Kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam setiap aspek wisata yang ada di kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep

pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah rumah penduduk (homestay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

- e. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

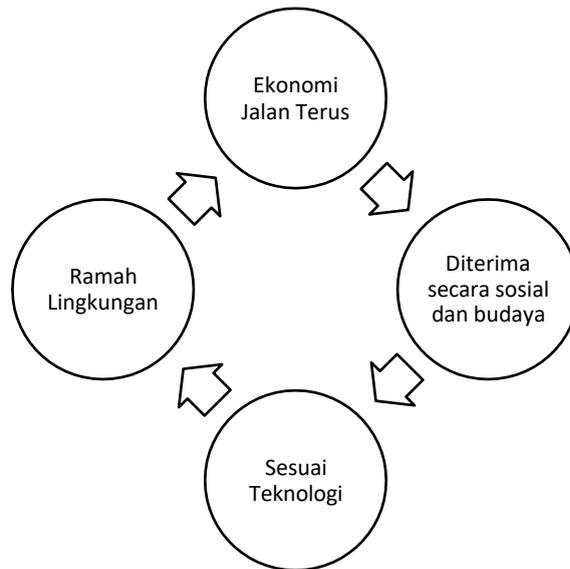
Pendekatan lain dalam memandang prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata adalah: a). Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan kawasan. b). Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh

penduduk kawasan, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki. c). Pengembangan kawasan wisata didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu kawasan atau “sifat” atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan Kawasan sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. Pengembangan kawasan wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol.

Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah kawasan menjadi kawasan wisata (Bappeda, 2015c).

Definisi tersebut diadopsi oleh banyak negara di seluruh belahan dunia dalam berbagai macam variasi. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- a. Secara lingkungan dapat berlanjut (*environmentally sustainable*);
- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*);
- c. Layak secara ekonomi (*economically viable*);



Gambar 1. Prinsip Sustainable Tourism Development

d. Pemanfaatkan teknologi yang tepat (*technologically appropriate*)

Prinsip Ramah Lingkungan (*environmentally sustainable*) yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi. Prinsip diterima secara sosial dan budaya (*socially and culturally acceptable*) yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya

sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip Ekonomi jalan terus (*economically*) variabel yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip Sesuai teknologi (*technologically appropriate*) yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar- besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut (Bappeda, 2015c):

- a) Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi
- b) Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan
- c) Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat
- d) Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan
- e) Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

7. Pengembangan Pariwisata dan Masyarakat

Pariwisata dan Masyarakat Lokal Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997:42-85). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat.

Dogra I Made Adikampana 2 dan Gupta (2012:9) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata. Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi

produk pariwisata.

Budaya lokal, tinggalkan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan masyarakat dari luar destinasi pariwisata. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau *image* destinasi pariwisata (Pike dalam Adikampana, 2017: 2).

Begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Oleh Tosun dan Timothy (2003:6-7) ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat.

Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata. Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan adanya manfaat inilah penerimaan, dukungan, pariwisata berbasis masyarakat dan toleransi masyarakat terhadap pariwisata akan tumbuh dengan optimal.

Masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari

destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata.

Di dalam destinasi pariwisata, tidak hanya terdapat industri pariwisata (produk, pasar, dan akses), melainkan juga ada keterkaitan dengan industri lain termasuk masyarakat lokal. Sehingga dapat dikatakan masyarakat lokal posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya (*stakeholders*) dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan. Walaupun secara konseptual pariwisata berbasis masyarakat diyakini mampu mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan, namun dalam prakteknya menemui berbagai macam permasalahan (Campbell, 1999; Scheyvens, 2002; Tosun, 2000:627).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008:21). Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Timothy dan Boyd (2003:9) yang menyebutkan pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian manfaat pariwisata. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan dan kekhawatirannya dari pembangunan pariwisata, yang selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam proses pengembangan pariwisata.

Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata mengandung pengertian bahwa masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Untuk itu pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu menciptakan peluang pekerjaan, kesempatan berusaha dan mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat agar mengetahui manfaat pariwisata (Timothy, 1999:19).

Menurut Murphy (1985:11) pariwisata merupakan sebuah "*community industry*", sehingga keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dan ditentukan oleh penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap pariwisata. Implikasi pariwisata sebagai sebuah industri masyarakat adalah adanya kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Berhubungan dengan hal tersebut, Tosun (1999:14) membagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata menjadi

tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Pseudo community participation*; non-partisipasi, tujuan pembangunan pariwisata tidak untuk pelibatan kolektif masyarakat, keputusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok untuk meminimalkan resiko, kebijakan jangka pendek, top-down, tidak langsung, hanya melibatkan elite lokal, dominasi pemerintah. Pariwisata Berbasis Masyarakat.
- b. *Passive community participation*; hanya sebagai endorsement/ratifikasi keputusan yang dibuat untuk masyarakat bukan dari dan oleh masyarakat, hanya terlibat dalam implementasi, minim kontribusi masyarakat, masyarakat bukan sebagai *decision-makers* tapi *decisiontakers (decision-implementers)*, efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pihak eksternal.
- c. *Spontaneous community participation*; partisipasi langsung, partisipasi aktif, dan partisipasi otentik.

Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat sering dipahami sebagai sesuatu yang berseberangan dengan pariwisata skala besar (*enclave*), berbentuk paket (*all inclusive*), pariwisata massal, dan sedikit keterkaitannya dengan masyarakat lokal. Sehingga pariwisata berbasis masyarakat disebut juga sebagai pariwisata berskala kecil, dibangun oleh masyarakat lokal, serta melibatkan berbagai elemen lokal seperti pengusaha, organisasi, dan pemerintah lokal (Hatton, 1999 dalam Telfer dan Sharpley, 2008; Leslie, 2012).

Terkait dengan pembangunan pariwisata berskala kecil, Jenkins (1982) telah melakukan perbandingan antara pariwisata skala kecil dengan skala besar untuk mengetahui dampak pembangunan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan komparasi tersebut diketahui bahwa pembangunan pariwisata berskala kecil mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dari pembangunan pariwisata berskala besar.

Seringkali partisipasi masyarakat dalam pariwisata disebut sebagai strategi pembangunan alternatif yang terdengar sangat ideal namun dalam implementasinya banyak terdapat tantangan dan hambatan. Scheyvens (2002:22) menyebutkan ada dua tantangan terbesar dalam pariwisata berbasis masyarakat. Pertama, pada kenyataannya masyarakat lokal dalam suatu destinasi pariwisata terbagi dalam berbagai faksi atau golongan yang saling mempengaruhi berdasarkan kelas masyarakat (kasta), gender, dan kesukuan. Antar faksi biasanya saling menyatakan paling memiliki atau mempunyai hak istimewa (*privilege*) keberadaan sumber Pariwisata Berbasis Masyarakat daya pariwisata.

Golongan elite masyarakat tertentu sering berada dalam posisi mendominasi pelaksanaan pariwisata berbasis masyarakat, lalu memonopoli pembagian atau penerimaan manfaat pariwisata (Mowforth dan Munt, 2016:29). Berdasarkan hal tersebut, partisipasi secara adil (*equitable*) menjadi pertimbangan penting dalam mendorong

pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu juga isu-isu tentang kelas masyarakat, gender, dan kesukuan penting dipertimbangkan terutama dalam pengembangan pariwisata. Tantangan kedua adalah permasalahan dalam masyarakat untuk mengidentifikasi pariwisata sebagai strategi pengembangan masyarakat lokal.

Masyarakat pada umumnya tidak cukup punya informasi, sumber daya, dan kekuatan dalam hubungannya dengan berbagai pengambil keputusan lainnya dalam pembangunan pariwisata, sehingga masyarakat lokal rentan terhadap eksploitasi. Campbell (1999:16) juga menyatakan hal yang sama bahwa minimnya kesempatan berpartisipasi dalam pariwisata dan sektor lain yang terkait, akibat dari kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengidentifikasi manfaat pariwisata. Selain tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat juga akan berhadapan dengan berbagai hambatan.

Tosun (2000:19) mengidentifikasi tiga hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat terutama di negara berkembang. Adapun hambatan-hambatan tersebut berupa : 1). Keterbatasan operasional; termasuk dalam hambatan ini adalah sentralisasi administrasi publik, lemahnya koordinasi, dan minimalnya informasi pariwisata. 2). Keterbatasan struktural; berupa sikap pelaku pariwisata, terbatasnya tenaga ahli, dominasi elite masyarakat, aturan hukum yang belum tepat, sedikitnya jumlah sumber daya manusia

(SDM) yang berkompeten, dan minimnya akses ke modal ekonomi/finansial. 3). Keterbatasan kultural; terbatasnya kapasitas terutama pada masyarakat miskin dan apatis atau rendahnya kesadaran pariwisata masyarakat lokal. Semua jenis keterbatasan tersebut, dapat menciptakan masalah serius dalam partisipasi masyarakat, baik untuk pengambilan keputusan atau pengembangan yang tepat maupun secara bersama-sama membagi manfaat pariwisata.

Integrasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Pariwisata. Sebagian besar karakteristik atau pendekatan perencanaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat berasal dari tradisi pengembangan transaksi dan advokasi. Tradisi ini mengutamakan pembelaan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan pemberian kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pembangunan sosial guna mencapai kesejahteraan (Timothy, 1999:25).

Hal tersebut semakin terlihat nyata akibat adanya perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari yang bersifat konvensional menuju pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif merupakan pariwisata berskala kecil dan melibatkan berbagai elemen lokal terutama masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berskala kecil dapat memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal (Telfer dan Sharpley, 2008:31). Pemberian ruang-ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menunjukkan adanya

persamaan posisi dengan pengambil keputusan lainnya (pemerintah, investor, dan wisatawan) dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan pemikiran Derrida dalam Barker (2004:17), persamaan posisi tersebut menandakan pelucutan atas oposisi biner atau dikenal dengan dekonstruksi. Dekonstruksi berfungsi menjamin kebenaran dengan cara mendevaluasi bagian *inferior oposisi biner* yaitu masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Dengan kata lain pendekatan dekonstruktif memastikan dipanggilnya kelompok minoritas untuk masuk ke ranah pariwisata. Kelompok minoritas tersebut tidak lain adalah masyarakat lokal yang pada dasarnya pemilik sumber daya atau modal pariwisata. Pada saat pariwisata masal digulirkan oleh elite atau pemerintah yang berkolaborasi dengan investor, masyarakat lokal hanya berperan sebagai objek pengembangan pariwisata dan akhirnya dengan segala keterbatasan malah terlempar dari pembagian manfaat pariwisata. Kondisi ini melahirkan sebuah konsepsi dekonstruktif yakni integrasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata.

Lebih lanjut Murphy (1985:10) menekankan dekonstruksi berupa suatu strategi yang terfokus pada pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dalam perspektif wisatawan dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal seharusnya mampu mengidentifikasi berbagai manfaat pariwisata untuk pariwisata berbasis masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendekatan pengembangan ini mengakui adanya perhatian dan pemikiran yang memasukkan kepentingan masyarakat

dalam pengembangan pariwisata atau dengan kata lain semestinya pariwisata tidak hanya memberikan kepuasan bagi wisatawan, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan kualitas jasa lingkungan.

Sejalan dengan Murphy, Gunn dan Var (2002: 9) juga berpendapat bahwa jika masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam proses pengembangan, maka akan terjadi malfungsi dan inefisiensi dalam pengembangan pariwisata. Kembali menurut Murphy (1985:25), pariwisata tidak seperti industri lainnya, karena sangat bergantung pada kemauan baik (*goodwill*) dan kerjasama para pengambil keputusan pariwisata termasuk masyarakat lokal, karena masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan/integral dari destinasi pariwisata. Ketika pengembangan destinasi pariwisata tidak sesuai dengan aspirasi dan kapasitas masyarakat, maka yang akan terjadi adalah permusuhan dan resistensi masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata.

Korten dalam Timothy (1999:27) pada anjurannya menyebutkan bahwa semakin kompleks permasalahan pembangunan yang dihadapi, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai/kearifan lokal dalam pemecahannya. Penggunaan kearifan lokal untuk merumuskan pemecahan permasalahan pembangunan dikenal dengan sebutan pengembangan berbasis masyarakat lokal. Dengan kata lain, pendekatan pengembangan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pengambil keputusan dalam proses pengembangan

pariwisata.

Adanya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengembangan, pengembangan pariwisata diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi berbagai dampak pariwisata dan kemudian dapat merumuskan strategi dan program guna mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengembangan destinasi pariwisata. Inskeep (1991:33) menegaskan pentingnya keterlibatan setiap para pengambil keputusan dalam berbagai tahapan atau proses pengembangan pariwisata.

Proses pengembangan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Proses pengembangan pariwisata meliputi : 1). Persiapan studi; pengenalan karakteristik, potensi dan isu strategis, penganggaran, pemilihan anggota tim, kerangka acuan kerja (KAK), dan administrasi 2). Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan; perumusan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis 3). Survei; inventarisasi situasi eksisting dan karakteristik area pengembangan pariwisata 4). Analisis dan sintesis; analisis hasil survei dan sintesis untuk merumuskan rencana dan rekomendasi 5). Perumusan kebijakan dan rencana; merumuskan alternatif pengembangan 6). Rekomendasi; pilihan rencana yang tepat dengan tujuan dan sasaran 7. Implementasi; pelaksanaan rencana terpilih 8). Pengawasan dan evaluasi; pengawasan yang terus menerus dan memberikan umpan balik guna penyesuaian dan penyempurnaan

pengembangan.

8. Perkembangan Bentuk Pariwisata

Bentuk pariwisata dalam prakteknya telah banyak mengalami perkembangan, sampai saat ini setidaknya terdapat dua arus utama bentuk pariwisata yang dikembangkan di dunia, yaitu bentuk pariwisata massal (mass tourism) dan bentuk pariwisata alternatif (alternative tourism), dimana dalam hal pendekatan konseptual keduanya memiliki karakter yang berbeda (Neil dan Wearing, 1999). Tidak ada definisi yang baku mengenai seperti apa pengertian dan bagaimana konsep pariwisata massal itu (Lindberg, Enriquez, dan Sproule, 1997).

Secara umum pariwisata massal diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang memiliki banyak komponen dan menghadirkan wisatawan dalam jumlah besar yang secara otomatis akan mendatangkan dampak dan keuntungan yang besar pula (Siswantoro, Anggoro, dan Sasongko, 2012). Sedangkan pariwisata alternatif merupakan bentuk pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan budaya. Berbeda dengan wisata massal yang menghadirkan wisatawan dalam jumlah besar, wisata alternatif secara kuantitas hanya menghadirkan sekumpulan kecil wisatawan. Meskipun demikian, wisata alternatif menawarkan kedalaman makna dan pengalaman lebih mendalam terhadap objek wisata yang dikunjungi. Perkembangan pariwisata alternatif mengalami beberapa jenis wisata dengan fokus kepada potensi sumber daya alam yang ada di lokasi wisata, setidaknya pariwisata alternatif dapat dibagi menjadi beberapa

jenis seperti green tourism, geotourism, responsible tourism dan sustainable tourism (Theng, 2015: 27).

Jenis pariwisata tersebut hakekatnya memiliki kesamaan, yaitu: Pertama, kelestarian lingkungan menjadi fokus utama. Kedua, adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangannya. Ketiga, adanya proses mencari pengetahuan dan pemahaman mengenai alam dan masyarakat. Keempat, menawarkan kesan dan makna yang lebih mendalam terhadap objek wisata yang dikunjungi.

Garrod (2001:11) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan terkait dengan prinsip pengembangan yang dikaitkan dengan pariwisata, yaitu: Pertama, merupakan pendekatan yang cenderung formal yang menekankan kepada keuntungan potensial dari ekowisata. Kedua, merupakan pendekatan yang disamakan dengan pengembangan partisipatif dimana adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan dengan pengembangan terkendali. Salah satu bentuk dari pembangunan pariwisata secara partisipatif yaitu *Community Based Tourism* (CBT) atau diterjemahkan sebagai pariwisata berbasis komunitas/masyarakat, bentuk pariwisata ini memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Hausler (dalam Sunaryo, 2013) yang menyatakan bahwa CBT merupakan pendekatan pembangunan pariwisata Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang menekankan kepada masyarakat lokal,

baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat secara langsung. Lebih lanjut Suansri (2003:24) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya.

Pemahaman mengenai pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat seperti yang dijelaskan ahli di atas, maka dapat dikatakan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan wisata ditempatkan dalam dua posisi sekaligus; Pertama sebagai objek yang memiliki hak untuk turut menentukan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Kedua, sebagai subjek yang harus mendapat manfaat dan keuntungan dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Sunaryo (2013:7) yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu: Pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat. Ketiga, pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal.

Konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan pada 4 (empat prinsip), yaitu: a). Layak secara ekonomi b). Berwawasan lingkungan c). Diterima secara sosial d). Dapat diterapkan secara teknologi Menurut Fennel (1999:16), tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip di bawah ini: a). Untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara

signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi b). Untuk meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan c). Untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat d). Untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan e). Untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, menurut Wearing (2001:132), sukses atau keberhasilan kegiatan budaya dan pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu pemberdayaan masyarakat lokal perlu didasarkan pada: a). Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal b). Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal. c). Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna d). Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif e). Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.

Konsep pengembangan pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin, konsep ini dipandang sangat efektif dalam penerapan atau implementasinya untuk mendorong pengentasan kemiskinan, karena:

a. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor

dan lintas skala usaha. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait didalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut.

- b. Daya tarik sektor pariwisata membentang sampai di daerah terpencil, yang sebenarnya sangat penting karena orang yang sangat miskin hidup dan tinggal di daerah terpencil.
- c. Adanya kesempatan untuk mendukung aktifitas tradisional seperti agrikultur dan kerajinan tangan melalui pariwisata
- d. Fakta bahwa pariwisata merupakan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dimana bisa menyediakan pekerjaan bagi wanita dan remaja
- e. Dengan mengesampingkan faktor ekonomi, pariwisata bisa memberikan keuntungan non-material seperti memberikan rasa bangga pada budaya lokal.

Peran pengembangan pariwisata dalam menggerakkan sektor usaha. Konsep keterpaduan pengembangan lintas sektor dalam kerangka kerja pariwisata tanpa batas, sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan banyak sektor, meliputi sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, industri dan perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, kimpraswil, lingkungan,

kebudayaan, pendidikan, imigrasi dan hubungan luar negeri.

9. Aspek-Aspek Penghambat Pengembangan Pariwisata

Faktor penghambat pengembangan pariwisata dalam hal ini tidak lepas dari adanya permasalahan yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata. Belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan prasarana objek wisata juga menjadi faktor penghambat pengembangan wisata. Faktor yang menjadi penghambat bisa saja ditemukan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal misalnya dalam pengembangan destinasi wisata, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengembangkan potensi wisata, kurangnya lahan untuk dikembangkan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

Sedangkan dari faktor eksternal, dukungan dari pemerintah yang belum maksimal membuat pengembangan pariwisata terhambat, misalnya seperti akses jalan yang rusak hingga saat ini belum diperbaiki, ketersediaan listrik yang belum memadai. Hal tersebut tentunya akan menjadi penghambat perjalanan wisatawan yang akan berkunjung.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya daya tarik objek wisata yang ada misalnya belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung

untuk pengembangan objek wisata di daerah ini. Keterbatasan prasarana dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata (Sunaryo, 2013:26).

Beberapa faktor yang Mempengaruhi pengembangan kepariwisataan, faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. Heri (2011:25), pengembangan objek wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat seperti berikut ini:

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata;
- b. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
- c. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada Dinas terkait
- d. Kurangnya kerja sama dengan investor
- e. Belum terdapat sistem promosi yang menarik
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
- g. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Agar dapat mengidentifikasi faktor penghambat dengan jelas maka dapat dijabarkan kedalam dua elemen yaitu: kelemahan dan

ancaman (Pearce, 2008 :178) kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor keparawisataan dalam bentuk pengembangan objek wisata misalnya, dapat menimbulkan dampak positif dan negative terhadap tatanan kultur pada masyarakat setempat. Positifnya jika pengembangan objek wisata dapat menarik perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri. Negatif, Jika pengembangan itu melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih termotivasi untuk mengikuti nilai-nilai asing tanpa menghayati esensinya.

Menurut Spilane dalam Andi Risma (2017:92) mengemukakan bahwa parawisata masa kini merupakan produk dari kemajuan sosial. Dengan pengelolaan yang sehat dan tepat, Parawisata merupakan wahana yang baik dalam rangka mencapai kemajuan sosial, Maka pelaku usaha objek wisata dalam menjalankan usahanya harus mengefektifkan kinerja mereka, misalnya dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen wisatawan dan melakukan usaha promosi yang intensif.

Dalam konteks ini pemerintah berkewajiban untuk membantu dan memberdayakan para pelaku usaha objek wisata dalam meningkatkan

kinerja usahanya, demi tercapainya tujuan kebijakan parawisata itu sendiri, yang pada gilirannya akan mewujudkan cita-cita terbangunnya kemajuan sosial di daerah objek wisatanya.

Permasalahan pembangunan keparawisataan di Kabupaten Sidenreng Rappang, pada khususnya bersandar pada *political will* pemerintah daerah, yang berkenaan dengan bagaimana segenap potensi nyata yang dimiliki, dapat dioptimalisasikan keberadaannya atau dengan kata lain, bagaimana substansi isu pariwisata mengalami kondisi kurang tepat atau adanya kesenjangan antara pemerintah daerah antara swasta/pengusaha, dan masyarakat sehingga menjadi permasalahan yang besar dalam memajukan objek wisata.

Tabel 2.1. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Disertasi

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan
1	Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah (2018)	Hasil penelitian menunjukkan model pengembangan pariwisata diusulkan dengan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan dikawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo merupakan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan tahap awal (<i>beginning</i>), tahap pertengahan (<i>middle</i>), dan tahap lanjutan (<i>advanced</i>)
2	Dodi widiyanto, Joni purwo handoyo, Alia fajarwati (2008)	Hasil penelitian ini menunjukkan usulan strategi pengembangan berdasarkan startegi yang mendasarkan pada strategi kekuatan dan peluang.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan startegi yang mendasarkan pada strategi kekuatan dan peluang.
3	Ade Irma Suryani (2007)	Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan pariwisata merupakan salahsatu sektor nonmigas yang diharapkan memberikan kontribusi yang Cukup besar terhadap perekonomian Negara.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan prasarana perekonomian dan prasarana sosial.

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan
		Strategis pengembangan pariwisata pada daerah perdesaan yaitu dengan memperhatikan saran dan prasarana yang ada dan penerapan saptapesona pariwisata			
4	Deddy Prasetya Maha Rani (2014)	Bahwa pantai lombang yang merupakan aset pemerintah memberikan sumbangsuhnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep dan otonomi daerah semakin baik tetapi masih terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yang terjadi di Sumenep, Madura, Jawa Timur	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, konseptualisasi sistem pariwisata
5	Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga (2016)	Hasil penelitian Peran Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, kualitatif yang bersifat deskriptif.

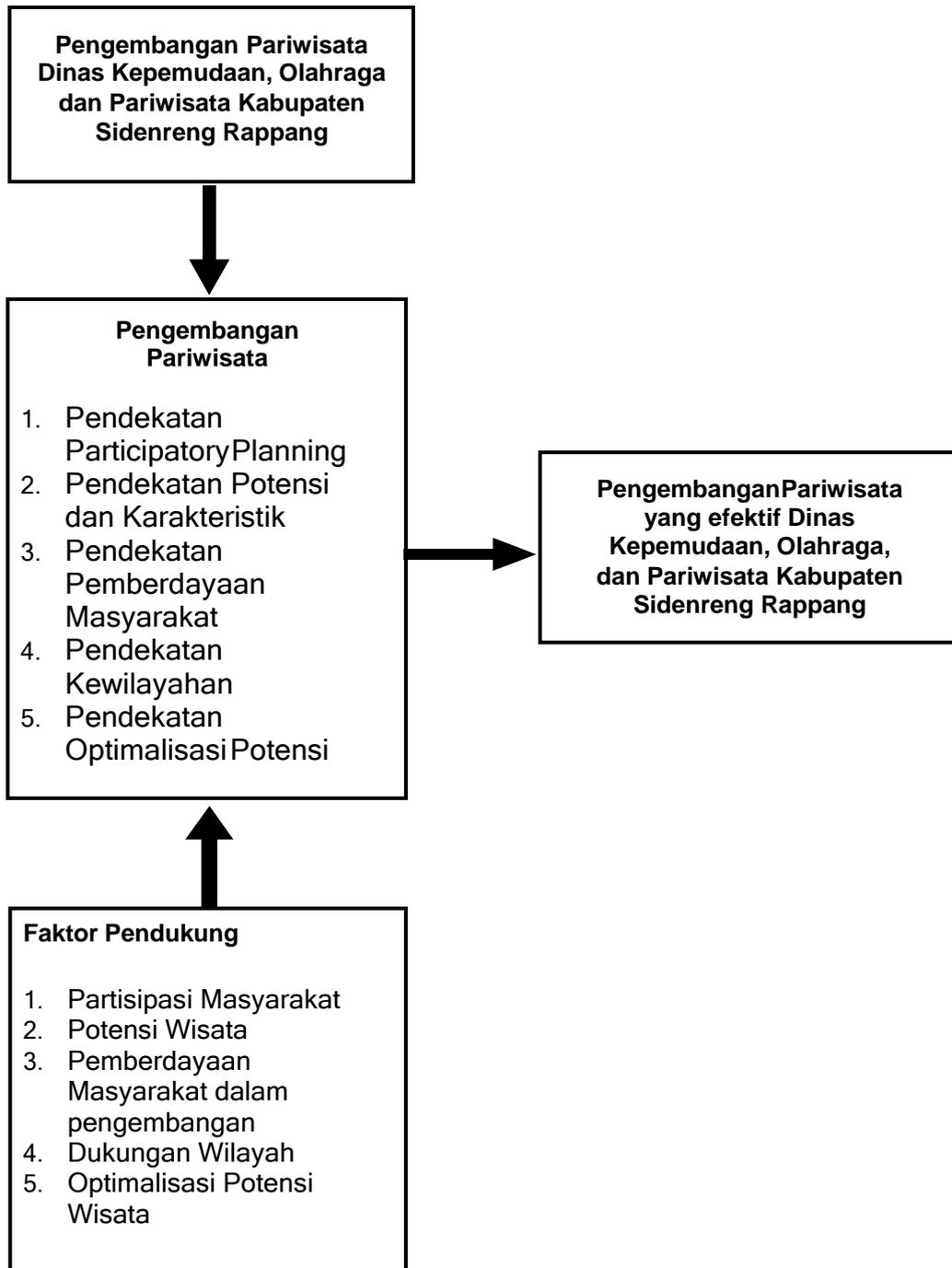
No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Persamaan	Perbedaan
		Lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator.			
6	Tunggul Prasodjo (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebutuhan wisatawan secara administratif, berhubungan erat juga dengan kebutuhan pelayanan	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan, objek wisata, organisasi yang mengelola objek wisata, dan wisatawan
7	Sefira Ryalita Primadan, Mardiyon, Riyanto (2006)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Kualitatif
8	Tri Yuniningsih (2019)	Hasil penelitian menunjukka bahwa: (1) Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model pentahelix, melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa (2) Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal dan (3)Kerjasama antar aktor model dari Hasil penelitian belum optimal.	Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	Sama-sama meneliti pengembangan pariwisata	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Kualitatif

C. Kerangka Pikir

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Sastrayuda (2010:50) mengemukakan bahwa dalam pengembangan pariwisata meliputi aspek :1). Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis; 2). Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata; 3). Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok; 4). Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan

diseimbangkan secara berencana; 5). Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.



Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan utama Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisa kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pilihan kualitatif karena teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk diuji, tetapi sebagai pengarah dan instrument yang digunakan dalam menentukan dan fokus penelitian. Data kualitatif yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Indepth interview*), oleh karenanya Peneliti mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

Jenis penelitian dalam penelitian yang dilakukan ialah menggunakan studi kasus. Studi kasus oleh beberapa pakar dikatakan sebagai sebuah strategi penelitian. Oleh Creswell (2017:262), bahwa

studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian untuk kajian penelitian kualitatif. Sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh Yin (2018), bahwa studi kasus mempunyai tujuan penting menganalisis data secara detail dan totalitas. Dalam studi kasus terdapat tiga tipe penelitian yaitu eksploratif, deskriptif dan eksplanatif (Yin, 2008). Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif dan eksplanatif. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengembangkan wawancara mendalam kepada informan terkait dengan Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive sebagaimana kecenderungan kajian yang berkembang dalam administrasi publik yaitu Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya

dengan fokus penelitian.

1. Data Primer

Penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupate Sidenreng Rappang. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung antar pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interview*), dalam hal ini peneliti mewawancarai informan yang terkait langsung pada Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

2. Sekunder

pengumpulan data melalui keputusan, yaitu melakukan penelitian dengan cara baca buku-buku, dan sumber bacaan yang terkait dengan bahasan ini. Serta adanya studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data-data yang tidak langsung. Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Hasil temuan penelitian dari sumber data tersebut dibandingkan dan dipadukan dalam suatu analisis untuk menyusun sebuah kerangka pikir yang dikembangkan dalam abstraksi temuan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan pada pengumpulan data yang lebih banyak bergantung kepada peneliti sendiri sebagai pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek analisis penelitian seperti kondisi Lingkungan Objek Wisata, pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada.

2. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena yang ada khususnya dalam Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Selain *indepth interview* diadakan juga wawancara terbuka dengan menggunakan pedoman

wawancara.

Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan pokok dari masing-masing fokus yang dikembangkan selama wawancara berlangsung. Wawancara berfokus pada pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, indera dan latar belakang informan yang berkaitan dengan objek/fokus mengenai Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata..

Alat bantu yang dipakai selama wawancara berlangsung adalah alat perekam, kamera digital, Tripot dan buku catatan, serta beberapa alat penunjang lainnya.

3. Data Dokumentasi

Teknik olah data dokumen yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data pelengkap berupa dokumen tertulis baik itu berupa buku-buku, artikel maupun jurnal, koran maupun majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen *online* yang berhubungan dengan masalah masalah penelitian terkait Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

4. Focus Grup Discussion (FGD)

Kegiatan diskusi bersama adalah kegiatan untuk menggali lebih jauh data data terkait dengan fokus dan lokus penelitian. Kegiatan dalam bentuk penyampaian pendapat, dari para stakeholder terkait utamanya dalam topik riset ini, kegiatan FGD terkait riset ini dilakukan

dilaksanakan sebanyak 1 kali.

E. Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian ditentukan melalui dua cara, yaitu:

1. *Key Person* atau *purposive*
2. *Snowball* sampling Informan utama (*key informan*) dilakukan jika peneliti sudah memiliki informasi awal tentang objek penelitian.

Demi mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh tentang situasi objek penelitian, terutama informasi dan keterangan yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan, maka informan penelitian ditentukan sebagai berikut:

Informan yang berasal dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, Camat Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Lurah Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kepala Desa yang merupakan pelaku langsung terhadap pengembangan pariwisata.

Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|---------|
| 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang | 1 Orang |
| 2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata | 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi | 1 Orang |
| 4. Camat Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang | 1 Orang |

5. Lurah Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Orang
6. Kepala Desa	1 Orang
7. Masyarakat	5 Orang
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	3 Orang

F. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dalam penelitian maka perlu fokus dan deskripsi penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengembangan pariwisata yang ditinjau dari 5 (lima) variabel dalam pengembangan pariwisata. Pendekatan *Participatory Planning*, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengembangan kawasan objek wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Pendekatan Potensi dan Karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan pengembangan pariwisata yang didasari pada potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pendekatan pemberdayaan Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan pariwisata yang didasari pada pemberdayaan masyarakat yang bersifat pribadi maupun kelompok di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Pendekatan Kewilayaan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterkaitan antar wilayah yang merupakan kegiatan penting yang

dapat memberikan potensi sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara terencana di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pendekatan Optimalisasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah optimalisasi potensi wisata yang ada di desa seperti pengembangan potensi kebudayaan yang masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Faktor Penghambat Pariwisata dalam Penelitian ini adalah yang dapat menghambat pengembangan pariwisata Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses pengaturan serta pelacakan secara sistematis terhadap data-data wawancara, catatan lapangan serta bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan apa yang menjadi temuannya. Untuk menjelaskan pengembangan kapasitas birokrasi melalui *collaborative innovation* dan di analisis dengan *social exchange* dalam *collaborative innovation*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:65) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data antara lain reduksi data:

1. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

Penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun dengan memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi dan kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan Kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “KOTA BERAS” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan.

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak diantara titik koordinat 3°43'- 4°09' LS dan 119°41'-120° BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Parepare dan Kabupaten Pinrang.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan.

Tabel 1. Potensi Penghasil Tanaman Sayur Berdasarkan Luas Lahan (Ha)

KECAMATAN	KACANG PANJANG		CABAI	
	2020	2021	2020	2021
PANCA LAUTANG	3	3	-	-
TELLU LIMPOE	-	-	2	2
WATANG PULU	13	13	31	32
BARANTI	11	17	2	3
PANCA RIJANG	-	-	-	-
KULO	8	2	7	13
MARITENGGAE	-	-	4	2
WATANG SIDENRENG	38	43	1	-
PITU RIAWA	9	11	3	-
DUA PITUE	7	17	6	13
PITU RIASE	-	-	-	-
SIDENRENG RAPPANG				

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi wilayah dan hasil tanaman sayur di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah lahan baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan terjadi peningkatan.

Tabel 2. Potensi Penghasil Tanaman Sayur Berdasarkan Luas Lahan (Ha)

KECAMATAN	PETAISI		TOMAT	
	2020	2021	2020	2021
Panca Lautang	-	-	2	4
Tellu Limpoe	-	-	2	2
Watang Pulu	-	-	13	13
Baranti	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	-	-
Kulo	14	20	-	1
Maritengngae	-	-	-	-
Watang Sidenreng	2	2	-	-
Pitu Riawa	44	23	-	-
Dua Pitue	-	0	2	11
Pitu Riase	-	0	-	-
Sidenreng Rappang	60	45	24	31

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi wilayah dan hasil tanaman sayur di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah lahan baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk luas lahan tanaman petersai dan tomat.

b. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jumlah Tanaman (ton)

Tabel 3. Potensi Produksi Tanaman Sayuran

KECAMATAN	KACANG PANJANG		CABAI	
	2020	2021	2020	2021
Panca Lautang	80	112,2	-	-
Tellu Limpoe	-	-	2,5	6,7
Watang Pulu	55,8	82,1	146,7	135,5
Baranti	5,2	7,8	2,5	0,8
Panca Rijang	-	-	-	-
Kulo	24,4	3,5	58	6
Maritengngae	-	-	25	13,5
Watang Sidenreng	240,5	257	11,5	-
Pitu Riawa	6,2	11,9	2,1	-
Dua Pitue	4,2	7,5	3,6	7,9
Pitu Riase	-	-	-	-
Sidenreng Rappang	416,3	482	251,9	170,4

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi tanaman sayur di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah lahan baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk luas lahan tanaman kacang panjang dan cabai di beberapa kecamatan dengan lahan yang tersedia untuk tanaman sayur.

Tabel 4. Potensi Produksi Jenis Tanaman

KECAMATAN	PETAISI		TOMAT	
	2020	2021	2020	2021
Panca Lautang	-	-	66,6	84,4
Tellu Limpoe	-	-	0,9	5,6
Watang Pulu	-	-	90,6	91,1
Baranti	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	-	-
Kulo	19	25	-	2,4
Maritengngae	-	-	-	-
Watang Sidenreng	28	19,7	-	-
Pitu Riawa	9,5	8,7	-	-
Dua Pitue	-	-	1,5	4,7
Pitu Riase	-	-	-	-
Sidenreng Rappang	56,5	53,4	159,6	188,2

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi tanaman sayur di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah lahan baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk luas lahan tanaman petaisi dan tomat di beberapa kecamatan dengan lahan yang tersedia untuk tanaman sayur.

- c. Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jumlah Tanaman (kg), (2020) and (2021) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 5. Potensi Hasil Tanaman Biofarnika dan Jenis Tanaman

KECAMATAN	JAHE		LENGKUAS	
	2020	2021	2020	2021
PANCA LAUTANG	800	824	322	332
TELLU LIMPOE	-	-	-	-
WATANG PULU	391	421	526	2301
BARANTI	15	2604	30	1254
PANCA RIJANG	20	31	42	28
KULO	5	15	5	20
MARITENGGAE	-	-	-	-
WATANG SIDENRENG	-	-	-	-
PITU RIAWA	-	-	-	-
DUA PITUE	908	620	910	647
PITU RIASE	402	76700	145	650
SIDENRENG RAPPANG	2241	81215	2180	5232

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi biofanika di kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah produksi baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan terjadi peningkatan jumlah hasil tanaman jahe dan lengkuas tanaman biofanika di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 6. Potensi Hasil Tanaman Biofarnika dan Jenis Tanaman

KECAMATAN	KENCUR		KUNYIT	
	2020	2021	2020	2021
PANCA LAUTANG	-	-	564	832
TELLU LIMPOE	-	-	-	-
WATANG PULU	33	-	1365	3297
BARANTI	15	525	40	920
PANCA RIJANG	24	70	45	62
KULO	-	-	5	15
MARITENGGAE	-	-	-	-
WATANG SIDENRENG	-	-	-	-
PITU RIAWA	-	-	-	-
DUA PITUE	426	315	810	901
PITU RIASE	-	-	-	-
SIDENRENG RAPPANG	498	910	2829	6027

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi *biofanika* di kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah luas lahan pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah lahan baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk jumlah hasil tanaman kencur dan kunyit di beberapa kecamatan dengan lahan yang tersedia untuk tanaman *biofanika* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 and 2021

Tabel 7. Potensi Produksi Buah-Buahan dan Jenis Tanaman

KECAMATAN	MANGGA		DURIAN	
	2020	2021	2020	2021
PANCA LAUTANG	721,1	118,7	-	-
TELLU LIMPOE	153,7	-	-	-
WATANG PULU	122,4	61,2	-	-
BARANTI	2150,9	2085,1	-	-
PANCA RIJANG	195	1,62	-	-
KULO	-	-	-	-
MARITENGGAE	265	135	-	-
WATANG SIDENRENG	30,9	7,7	-	-
PITU RIAWA	625,7	648	796,4	740
DUA PITUE	250	-	2,2	-
PITU RIASE	1600	49,8	2380	230
KAB. SIDENRENG RAPPANG	6114,7	3107,12	3178,6	970

Sumber : BPS Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022

Potensi produksi buah-buahan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah produksi pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah produksi baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk jumlah hasil

buah mangga dan durian di beberapa kecamatan dengan lahan yang tersedia untuk tanaman buah-buahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 8. Potensi Produksi Buah-Buahan dan Jenis Tanaman (Ton)

KECAMATAN	JERUK		PISANG	
	2020	2021	2020	2021
PANCA LAUTANG	-	-	143,2	96,4
TELLU LIMPOE	-	-	271,2	48,62
WATANG PULU	-	-	126,2	77,1
BARANTI	-	-	961,9	893
PANCA RIJANG	28	5	87,4	45,4
KULO	-	-	160,7	10,81
MARITENGGAE	-	-	17,6	32
WATANG SIDENRENG	-	-	414,1	4735,3
PITU RIAWA	838,4	475	1255	2100
DUA PITUE	4,1	-	952,2	319
PITU RIASE	40	-	177	410,2
KAB. SIDENRENG RAPPANG	910,5	480	4566,9	8767,83

Potensi produksi buah-buahan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan jumlah produksi pada tahun 2020 dan tahun 2021, terjadi gradasi jumlah produksi baik peningkatan dan penurunan di setiap kecamatan. Terjadi peningkatan untuk jumlah hasil buah jeruk dan pisang di beberapa kecamatan dengan lahan yang tersedia untuk tanaman buah-buahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 secara *sex ratio* yang tersebar di 11 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah Penduduk

Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Panca Lautang	9 471	9 708	19 179
Tellu LimpoE	12 586	13 142	25 726
Wattang Pulu	18 554	18 632	37 186
Baranti	16 462	16 794	33 256
Panca Rijang	15 662	16 146	31 808
Kulo	6 930	7 009	13 939
MaritengngaE	26 639	27 652	54 291
Wattang Sidenreng	10 010	10 191	20 201
Dua Pitue	15 367	16 022	31 389
Pitu Riawa	14 773	14 890	29 663
Pitu Riase	11 949	11 401	23 350

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pada tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah di setiap kecamatan. Peningkatan tersebut terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

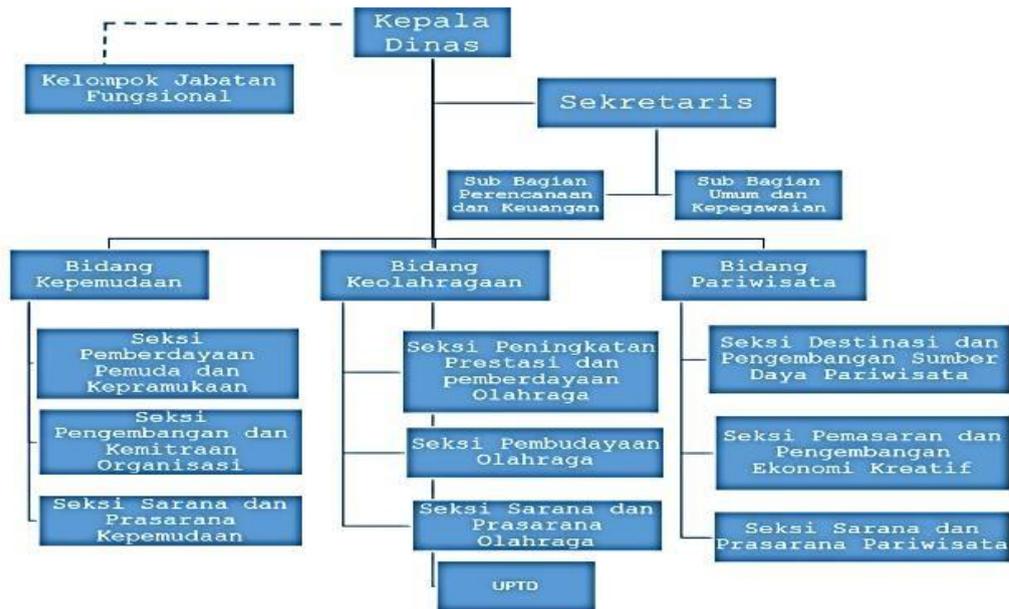
D. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Sidenreng Rappang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang. Bagan Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, maka Kepala Dinas, Sekretaris dan tiap Bidang mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan, Keolahragaan dan kepariwisataan yang menjadi kewewnnangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
- 2) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan;
- 3) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga danPariwisata;
- 5) Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkup Dinas. Untuk melaksanan Tugas Pokok, Sekretaris mempunyai fungsi yaitu :

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b) Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

c. Bidang Kepemudaan.

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pemberdayaan pemuda dan Kepramukaan, pengembangan dan kemitraan organisasi kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan :

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan;
- 3) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda dan kemitraan organisasi kepemudaan serta sarana dan prasarana kepemudaan.

- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan: Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasaranan keolahragaan;
- 4) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasaranan keolahragaan;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan prestasi dan pemberdayaan olahraga, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana keolahragaan;

- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

e. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang destinasi dan pengembangan sumber daya pariwisata, pemasaran dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;
- 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi dan pengembangan ekonomi kreatif dan sarana prasarana pariwisata;

f.

F. Visi, Misi dan Program

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan salah satu lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 -2023 yaitu

“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera “

Dari Visi di atas ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.

7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Dari Misi tersebut ada 2 (dua) misi yang berhubungan erat dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yakni misi 3 (tiga) dan misi 7 (tujuh). Misi 3 (tiga) berhubungan dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata khususnya Bidang Pariwisata, dengan mengembangkan kerjasama investasi pada bidang pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru.

Misi 7 (Tujuh) dapat dicapai salah satunya dengan meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga, sehingga dapat membangkitkan rasa sosial yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat ke kehidupan sosial yang kondusif.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hasil penelitian akan diuraikan pada hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi Pengembangan Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut Sastrayuda (2010:50) bahwa pengembangan Pariwisata meliputi:

- a. Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis;
- b. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata;
- c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok
- d. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana;
- e. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada

di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Pengembangan Pariwisata bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari 6 (enam) Indikator dalam pengembangan pariwisata sebagai berikut:

a. Pendekatan *Participatory* pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah paradigma dalam pengembangan perkotaan yang menekankan kepada keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam proses manajemen strategis dan pengembangan perkotaan atau ditingkat masyarakat dalam bentuk proses pengembangan wilayah perkotaan atau pedesaan dengan melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun *participatory* yang dilaksanakan oleh dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa:

“...dalam pengembangan pengembangan pariwisata kami melibatkan seluruh stakeholder terkait, kalau kita tidak melibatkan stakeholder terkait pasti sangat sulit untuk kita maksimalkan untuk pengembangan pariwisata nantinya...”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal ini juga tambahkan dengan Kepala Bidang Pengembangan

Usaha Pariwisata menjelaskan bahwa :

“...sekiranya dalam suatu pengembangan apapun itu apalagi pengembangan pariwisata itu harusnya melibatkan seluruh stakeholder tanpa terkecuali seperti, pemerintah itu sendiri, kedua masyarakat setempat dan pihak swasta atau pengusaha-pengusaha besar yang ahli dibidangnya, alhamdulillah kami melibatkan seluruh *stakeholder* yang betul-betul terkait dalam hal pengembangan tersebut, pengembangan ini perlu melibatkan stakeholder terkait karena akan mampu menciptakan ide-ide positif, sehingga semakin banyak pemikir dan pelaksana maka hasil yang ingin kita capai juga akan maksimal...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Selanjutnya lebih diperjelas lagi oleh informan Kepala Bidang

Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa:

“...kita dari dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata sangat melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada, melibatkan banyak orang atau banyak tim akan memaksimalkan pengembangan pariwisata kita di Kabupaten Sidenreng Rappang, melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait akan mengefisienkan jangka waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, keterlibatan stakeholder memang sangat diperlukan guna menunjang efektifitas dan efisiensi pengembangan pariwisata yang akan dilakukan nantinya, melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pengembangan ini dengan melibatkan seluruh *stakeholder* baik itu secara teori maupun praktis akan lebih memperjelas pembagian kerjanya. Keterlibatan seluruh stakeholder seperti masyarakat lokal, memperjelas bahwa masyarakatlah yang nantinya punya peran tertentu dalam pengembangan pariwisata, tanpa masyarakat lokal atau kelompok masyarakat, pemerintah tidak paham letak geografis rencana lokasi

yang akan dikembangkan pariwisatanya, kedua adalah pihak swasta sebagai *stakeholder* yang memiliki peran dalam memberikan masukan gambaran pengembangan pariwisata serta juga sebagai eksekutor ketika sudah berjalan.

Kemudian ditambahkan wawancara dengan Bapak Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa :

“...seluruh stakeholder harusnya terlibat dalam pengembangan ini, semakin banyak kita melibatkan stakeholder dalam pengembangan ini maka hasilnya akan maksimal, kalau hanya pemerintah sendiri yang bekerja dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata itu tidak akan maksimal, makanya harus dan perlu melibatkan stakeholder...” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Hal tersebut juga ditambahkan oleh Lurah Lawawoi menjelaskan bahwa :

“...keterlibatan stakeholder memang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata, tapi ada beberapa hal yang perlu diperjelas untuk melibatkan *stakeholder*, pertama memang harus jelas kontrak kerja samanya, ada pembagian tupoksi disini, pembagian hasil dalam pengelolaan pariwisata dan lain-lain, maka dengan kita libatkan *stakeholder* terkait harus jelas tujuannya seperti apa...” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa melibatkan *stakeholder* sangat menjadi point utama dalam pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi melibatkan stakeholder terkait juga perlu adanya pembagian kerja atau tugas serta pembagian hasil dalam pengelolaan pariwisata, ketika hal tersebut tidak terlaksana maka akan timbul suatu persoalan dikemudian hari. informan masyarakat juga menjelaskan bahwa :

“...selama ini kami dari masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap pengembangan pariwisata, karena pemda sendiri pasti paham harus melibatkan masyarakat, karena kami yang tau kondisi di lokasi, kami tau bagaimana situasinya...” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Observasi peneliti terhadap Pendekatan *Participatory Planning* yaitu dengan mengetahui langsung adanya keterlibatan pihak lain dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Watang Pulu, bahwa dalam pengelolaan objek wisata sangat dilibatkan pihak swasta yang paham mengelola objek wisata, Camat Watang Pulu mengeluarkan surat izin berusaha sebagai legalitas dalam menjalankan usaha pengelolaan wisata, kepala dinas juga melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan pengembangan pariwisata ini karena jika hanya pemda. itu sendiri hasilnya tidak akan maksimal, sehingga sangat diperkukan keterlibatan dari berbagai unsur seperti swasta, masyarakat yang mengetahui kondisi situasi lokasi objek wisata tersebut serta kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka diperoleh informasi bahwa dalam pengembangan pariwisata itu telah melibatkan seluruh stakeholder terkait, melibatkan pihak swasta dan juga dalam pengembangan ini masyarakat serta pihak swasta terlibat dalam pengelolaan objek wisata. Keterlibatan pihak swasta ini menjadi penyeimbang dalam pengembangan pariwisata seperti dengan adanya konsultan untuk menentukan model gambar lokasi objek wisata serta

perhitungan rincian anggaran serta sarana dan prasarana. Kemudian ditambahkan lagi oleh LSM menyatakan bahwa :

“...jika pengelolaan atau pengembangan pariwisata dikelola oleh pihak swasta akan berbeda hasilnya jika hanya pemerintah itu sendiri tanpa keterlibatan stakeholder lain, karena mengingat keterbatasan pemda dalam pengelolaan objek pariwisata sehingga perlu dilibatkan pihak swasta serta masyarakat setempat supaya lebih efektif dan efisien...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal ini juga tambahkan oleh Kepala Desa menyatakan bahwa :

“...selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di wilayah ini, bukan hanya pihak swasta, pembagian kerjanya jelas bahwa dalam hal pengelolaan manajemen objek pariwisata itu adalah unsur swasta, sedangkan masyarakat bagian dari pengelolaan wilayah eksternal seperti lahan parkir dan kebersihan sekitar lokasi dan juga masyarakat diarahkan untuk membuka usaha-usaha dalam peningkatan perekonomian, serta dengan keterlibatan unsur swasta dan masyarakat lebih meningkatkan pula aspek-aspek yang berpengaruh seperti aspek budayam ekonomi dan lain-lain...” (Wawancara, 16 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis menemukan bahwa keterlibatan unsur swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek pariwisata dianggap lebih efektif dan efisien dari pada pengelolaan yang hanya dikerjakan oleh pemerintah itu sendiri. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat serta stakeholder maupun kelompok masyarakat memberikan hasil yang maksimal karena beberapa unsur tergabung didalamnya, sehingga dapat menunjang aspek-aspek yang berpengaruh seperti aspek budaya dan aspek peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Variabel Pendekatan *Participatory Planning* juga menekankan dalam keterlibatan pihak swasta agar supaya dalam pengembangan pariwisata ini mendapat hasil yang maksimal. Hal ini disampaikan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa :

“...iya, pasti itu pihak swasta kita tetap libatkan dalam pengembangan pariwisata, karena pemerintah dan pihak swasta itu tidak bisa terpisahkan dalam proses pengembangan pengelolaan apapun itu, makanya pihak swasta tidak pernah lepas dari setiap kebijakan atau pengembangan yang akan kami buat...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pariwisata bahwa:

“...tentunya kita melibatkan pihak swasta, kita libatkan dalam hal pengembangan penataan objek wisata, kita gunakan konsultan, selain itu dalam tahap pengembangan pengelolaan ini juga kita melibatkan pihak swasta dalam hal manajemen tempat wisata serta dalam hal penganggaran tahan pengelolaan pariwisata...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Begitu juga wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa:

“...jika kita melibatkan pihak swasta dalam pengembangan ini, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh mereka, contohnya itu pihak swasta bisa olah jalannya tempat pariwisata, mereka juga bisa olah lahan parkir dan banyak yang bisa mereka olah...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa melibatkan pihak swasta dalam hal pengembangan pariwisata itu memberikan hasil yang maksimal dalam berjalannya pengembangan tersebut, karena dengan melibatkan pihak swasta juga membantu pemda baik itu dalam hal pengembangan gambar lokasi, hingga

perhitungan anggaran pengembangan pengelolaan pariwisata yang akan diajalkan nantinya.

Pengembangan Pariwisata sekiranya memerlukan keterlibatan semua stakeholder atau semua unsur, karena jika melibatkan hanya satu saja itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal yang selama ini diharapkan mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...ada beberapa unsur yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini, yang pertama itu dari unsur masyarakat itu sudah pasti kami libatkan, kedua itu unsur swasta, ketiga itu unsur pengusaha, ada juga unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, jadi ini semua yang terlibat punya peran juga masing-masing terlebih lagi dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata tersebut seperti kita libatkan kontraktor yang telah diajak kerjasama, juga para konsultan...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Begitu juga yang dijelaskan dalam wawancara dengan Camat Watang Pulu bahwa:

“...keberadaan unsur-unsur yang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini punya kerja masing-masing, kita sudah bagi tugasnya supaya jelas arahnya mereka mau bikin apa nantinya, seperti unsur masyarakat kita libatkan mereka di wilayah peningkatan sarana ekonomi kreatif bagaimana masyarakat ini menjual barang-barang campuran untuk wisatawan, mereka juga bisa bikin cenderamata khas di wilayah objek wisata, bagi yang mau siapkan tempat istirahat bisa, ada juga unsur Lembaga Swadaya Masyarakat tugasnya mereka itu sebagai pengawas bisa, karena kan tugasnya itu LSM sebagai sosial control, kita tidak tau kalau nantinya ada permainan dalam pengelolaan pariwisata ini...” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anggota LSM yang

menjelaskan bahwa:

“...selama pengembangan pariwisata ini memang kami juga turut dilibatkan, kami dilibatkan sebagai pengawas dilapangan jalannya ini pengembangan wisata, kalau unsur yang lain ada juga yang tergabung, kami juga liat ada pengusaha yang masuk, dan beberapa perusahaan swasta ikut terlibat ”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Kemudian wawancara dengan masyarakat menjelaskan bahwa:

“...sejauh ini kami dilibatkan dalam untuk berpartisipasi untuk tingkatkan ekonomi kreatif, supaya sarana wisata menjadi lengkap kalau ada penjual-penjualnya, kami disuruh bikin kios-kios untuk jual cendera mata, jual kue-kue makanan khas Sidenreng Rappang, banyak yang bisa kami juga lakukan ”
(Wawancara, 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui bahwa, unsur-unsur yang berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi hal penting dalam pengembangan pariwisata, karena mampu menyediakan berupa sarana perbelanjaan bagi wisatawan, dimana sarana ini dibuka langsung dari unsur masyarakat yang telah diatur oleh pemda, begitupun unsur swasta dilibatkan dalam pengembangan pola bentuk lokasi objek wisata serta unsur swasta lainnya seperti kontraktor yang nantiya akan membangun sarana dan prasarana yang telah dirancang sebelumnya oleh konsultan, maka pemda dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata juga sangat diperlukan keterlibatan masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar lokasi objek wisata

tersebut, dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata akan lebih meningkatkan perekonomian mereka, seperti yang dijelaskan oleh kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa :

“.....alhamdulillah sejauh ini partisipasi masyarakat sangat membantu dalam pengelolaan objek pariwisata yang kami kembangkan, seperti yang ada di rumah adat datae masyarakat lokal disana berpartisipasi dengan cara menjaga kelestarian lingkungan rumah adat datae dan juga sebagian masyarakat disana membuat kerajinan tangan untuk dijual kewisatawan yang datang, juga seperti yang ada di kecamatan pitu riase puncak bila, disana kita memanfaatkan rumah warga menjadi home stay tempat tinggal bagi wisatawan yang datang berkunjung, home stay tersebut juga kami seleksi yang bisa dijadikan home stay, dengan adanya *homestay* milik warga sudah jelas bentuk partisipasinya seperti apa, dan alhamdulillah sudah mampu meningkatkan ekonomi kreatif sebagai tujuan dari adanya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala bidang pengembangan usaha pariwisata yang menjelaskan bahwa :

“...bentuk partisipasinya masyarakat itu macam-macam, ada yang jual makanan minuman, ada yang buka kedai-kedai kecil, ada juga yang jual pakaian, banyak macam, ini juga membuka peluang bangun usaha kreatif masyarakat di sekitar tempat wisata, jadi kita tidak susah lagi untuk menarik investor masuk untuk mendirikan fasilitas lain, jadi kita biarkan masyarakat berpartisipasi jauh untuk pengembangan wisata, kita tidak batasi...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa, bentuk partisipasi masyarakat terhadap objek wisata sangat tinggi, pengembangan pariwisata ini membuka peluang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif mereka, dengan hadirnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan objek

wisata tersebut membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata dalam pengembangan pariwisata, dengan hadirnya *home stay* milik masyarakat untuk digunakan bagi wisatawan membuktikan bahwa masyarakat begitu aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga ini juga menjadi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata karena dukungan masyarakat melalui partisipasi mereka.

Pengembangan pariwisata selalu mengandung aspek-aspek penting yang berpengaruh, aspek-aspek tersebut memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan pariwisata, tanpa adanya aspek yang berpengaruh maka pariwisata tersebut tidak memiliki daya tarik. Dalam wawancara dengan Bapak Camat Watang Pulu menjelaskan bahwa :

“...ada banyak aspek yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata ini, seperti aspek ekonomi paling berpengaruh karena meningkatkan pendapatan masyarakat setempat juga meningkatkan pendapatan desa yang ada tempat wisatanya, aspek budaya juga berpengaruh untuk pengembangan pariwisata ini, objek wisata yang punya nilai budaya didalamnya itu bisa sebagai daya tarik lebih untuk wisatawan...”
(Wawancara, 10 Agustus 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Bila Riase yang menjelaskan bahwa :

“...selama ini kami bersyukur dengan adanya pengembangan pariwisata khususnya di desa ini, banyak aspek yang berpengaruh dengan adanya pengembangan pariwisata ini pak, salah satunya aspek perekonomian yang berpengaruh, dulunya tidak ada tempat istirahat untuk wisatawan yang datang

berkunjung, sekarang sudah ada yang namanya *homestay*, *homestay* ini rumah masyarakat sekitar yang dipilih sama dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata ada seleksinya untuk lolos jadi *homestay*, selain aspek perekonomian aspek adat lokal juga berpengaruh...” (Wawancara, 19 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat dua aspek yang paling berpengaruh dalam pengembangan pariwisata yaitu aspek ekonomi dan aspek budaya, aspek ekonomi ini memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan pariwisata dikarenakan banyaknya peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tempat wisata seperti pendirian home stay atau rumah singgah, *homestay* ini menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam peningkatan pendapatan ekonomi, *homestay* ini adalah rumah milik warga dan sebelum menjadi *homestay* dinas terkait dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah melakukan seleksi karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk kategori *homestay*. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...ada banyak aspek yang berpengaruh sebenarnya dalam pengembangan pariwisata ini, tentunya aspek ekonomi masyarakat yang paling berpengaruh karena mereka bisa memanfaatkan peluang yang ada, salah satunya itu adanya *homestay* di desa Bila Riase kecamatan Pitu Riasae Puncak Bila, disana itu kita sudah seleksi yang mana rumah masyarakat yang bisa dijadikan *homestay*, ada syaratnya untuk bisa berubah status menjadi *homestay* ” (Wawancara, 9 Agustus 2022).

Hal ini sesuai dengan hasil observasi sebelumnya bahwa, aspek yang paling berpengaruh dalam pengembangan pariwisata ini adalah aspek ekonomi dan aspek budaya, salah satunya di Kecamatan Pitu Riase disana ada wisata puncak bila, daerah wisata tersebut telah memiliki ratusan *homestay* milik warga masyarakat sekitar tempat wisata yang merupakan *amenity* pariwisata yang terdapat di daerah Sidenreng Rappang, mereka sudah bisa menikmati suasana perkampungan disana karena fasilitas *homestay* tersebut sudah lengkap sehingga wisatawan tinggal datang bersama keluarganya tanpa membawa peralatan masak atau peralatan makan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Participatory dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan keberhasilan dengan banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang ikut berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, banyaknya yang ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengembangan ini juga memberikan pengaruh besar dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi dan aspek budaya.

Partisipasi atau peran beberapa unsur seperti unsur masyarakat dengan keterlibatan mereka untuk berkereasi lebih jauh dalam pemenuhan peningkatan ekonomi kreatif seperti pembuatan cendera mata untuk dijual kewisatawan, ada juga masyarakat yang menyajikan masakan atau makanan tradisional khas Kabupaten Sidenreng

Rappang serta adanya rumah masyarakat yang diubah menjadi *homestay* atau rumah singgah bagi wisatawan yang ingin menginap di daerah bila riase wisata puncak bila.

Aspek selanjutnya adalah aspek budaya, aspek budaya memberikan suatu daya tarik bagi wisatawan seperti budaya tari bosara yang disajikan oleh kelompok pemuda desa serta sikap ramah yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menjamu tamu atau wisatawan yang datang berkunjung.

b. Pendekatan Potensi dan Karakteristik Dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendekatan Potensi dan Katakarakteristik sebagai upaya dalam ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata yang akan dikembangkan disuatu wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Potensi dan karakteristik ini merupakan modal utama dalam pengenalan produk budaya sejauh mana peran masyarakat serta peran unsur-unsur yang terlibat dalam keterseidaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam aktivitas pengembangan suatu program kerja seperti pengembangan pariwisata.

Hal telah dijelaskan dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...dalam pengembangan pariwisata terdapat ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung jalannya ini pengelolaan kawasan objek wisata, ada produk budaya kita yang tetap kita jalankan dan kita jaga seperti kita punya tari- tarian tari bosara ada kecapi sama kita juga tetap utamakan kue atau makanan traditional kita di Kabupaten Sidenreng Rappang...”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha

Pariwisata juga menambahkan dan menjelaskan bahwa:

“...tentunya ada beberapa objek wisata yang punya karakter budaya tersendiri dikalangan masyarakat lokal, potensinya juga memang menjadi daya tarik untuk pengunjung, kayak di pitu riase wisata puncak bila disana itu masyarakat menjaga kearifan lokalnya, bersikap ramah sama pengunjung, timbul budaya sipakatau sehingga pengunjung ingin liburan merasa nyaman...”
(Wawancara, 21 Juli 2022)

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Desa Bila riase menjelaskan

bahwa:

“...jadi produk budaya itu pak tetap ada, itu penting karena kalau tidak ada budaya yang barengi ini objek wisata pasti akan hambar, tidak punya nilai estetik, budaya kita contohnya di sini masyarakat rutin membuat kerajinan-kerajinan tangan bikin tas-tas, gelang dengan tulisan Puncak Bila, itu bentuk produknya, jadi sudah seharusnya disetiap tempat wisata itu ada produk budaya sebagai pendukung pengelolaan pariwisata ”
(Wawancara, 19 Agustus 2022)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pengembangan pariwisata ada ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata, ketersediaan produk budaya berupa kerajinan tangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka serta penampilan-penampilan kebudayaan dalam bentuk kesenian tarian,

dan pagelaran musik kecapi, produk budaya ini sangat mendukung keberlanjutan pengembangan wisata tersebut karena antara budaya dan pariwisata adalah kesatuan yang terus melekat dalam perkembangan pariwisata agar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi menjelaskan bahwa :

“...hadirnya produk budaya dikawasan wisata menjadi daya tarik untuk pengunjung, produk budaya tradisional ini sangat diminati salah satu diantaranya *pakkacaping* yang masih terjaga sampai sekarang, ada juga beberapa kelompok masyarakat di wilayah lain itu bikin baju dengan gambar-gambar objek wisata, itu semua bisa masuk produk budaya, dan memang sangat mendukung itu adanya produk-produk budaya untuk disetiap tempat wisata, kalau tidak begitu sunyi itu tempat wisata...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Lanjut wawancara dengan masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“...kita miliki produk budaya seperti makanan khasnya Sidenreng Rappang, kue-kue tradisional, dan buatan gelang-gelang rajut untuk dijual ke pengunjung wisata, banyak yang mendukung untuk produk budaya ini...” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Hal di atas berdasarkan hasil observasi sebelumnya menemukan bahwa, memang benar adanya produk-produk budaya yang dimaksud guna menjadi pendukung keberlangsungan pariwisata yang ada.

Sebuah pengembangan aktifitas pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata sangat diperlukan langkah-langkah yang tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa:

“...pengembangan pariwisata yang sudah kita lakukan itu membenahi destinasi objek wisata yang kurang terawat, kita benahi agar bisa dilirik oleh pengunjung, untuk promosi itu kita pakai aplikasi wikled dan kerjasama dengan TV swasta untuk promosi, jadi bukan sekedar di daerah Sidenreng Rappang saja tempat wisata ini dikenal, tapi bisa sampai luar Sidenreng Rappang tau ada tempat wisata di Sidenreng Rappang yang tidak kalah bagusnya...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Kemudian ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...untuk sekarang yang kami lakukan di pemda itu untuk pariwisata sekarang itu dipromosikan semua lokasi objek wisata yang ada di Sidenreng Rappang, bukan cuman satu dua lokasi, tapi semua lokasi objek wisata yang kami promosikan, kita promosikan lewat media sosial sama lewat media-media online...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Hasil wawancara dengan Camat Watang Pulu juga menjelaskan bahwa:

“...kalau di kecamatan watang pulu itu sendiri memang selama ini dinas sudah lakukan pengembangan wisata berupa bantuan pemeliharaan tempat wisata, kayak di rumah adat datae yang ada di lawawoi itu ada pemeliharannya...” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah melakukan langkah-langkah dalam pengembangan pariwisata dan promosi wisata, langkah dalam pengembangan itu sendiri berupa pemeliharaan lokasi objek wisata serta melakukan promosi pariwisata melalui aplikasi wikled dan sosial media serta kerjasama dengan TV Nasional dan Media Online agar supaya pariwisata atau objek wisata yang ada di

Kabupaten Sidenreng Rappang itu lebih dikenal disemua daerah bukan hanya di dalam Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang juga berkaitan erat dengan potensi dan karakteristik produk budaya yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan. Mengenai potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata dalam wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa :

“...potensi dan karakteristik budaya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang ini lebih kepada kita memperkenalkan produk makanan kita dan juga kita perkenalkan budaya adat yang ada seperti suku tolotang, suku ini adalah bentuk karakteristik khas dari Kabupaten Sidenreng Rappang karena hanya ada di Sidenreng Rappang, jadi inilah bentuk karakteristik budaya kita di Kabupaten Sidenreng Rappang ”(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Lanjut wawancara dengan Kabid Pengembangan Usaha Pariwisata menjelaskan bahwa :

“potensi dan karakteristik budaya kita dalam pengembangan pariwisata itu sampai saat ini masih menjaga budaya kearifan lokal kita, masing-masing wilayah punya kearifan lokal khas dan itu sebagai daya tarik bagi wisatawan yang mau datang nanti ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Lanjut wawancara dengan Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...kalau potensi dan karakteristik budaya untuk pengembangan pariwisata itu sampai sekarang masih menjadi point utama, karena setiap tempat memang harus punya ciri khas karakteristik yang unik dan berbeda...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Sesuai dengan uraian dari penjelasan informan di atas, maka

dapat kita ketahui bahwa potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata menjadi hal utama karena dengan meningkatnya potensi budaya dengan karakteristik yang khas maka akan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar, jika potensi produk budaya meningkat maka pariwisata tersebut telah berhasil dan berkembang.

Pengembangan pariwisata juga memerlukan sebuah upaya lebih agar tujuan yang ingin dicapai hasilnya maksimal atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun wawancara dengan kepala bidang Pengembangan Usaha Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...mengenai upaya yang dari dinas dalam tahap pengembangan pariwisata lebih kepada peinjauan kembali lokasi objek wisata yang sempat terbengkalai dan juga kita akan maksimalkan upaya dalam dalam mendapatkan anggaran dari provinsi maupun dari pusat...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi menjelaskan bahwa :

“.....kalau soal upaya kami di dinas, masuk ke pengembangan perbaikan akses jalan kelokasi-lokasi wisata yang agak sulit terjangkau, juga upaya yang kami lakukan itu lebih rutin untuk mempromosikan lokasi-lokasi objek wisata kami yang ada, seperti menguploadnya di sosial media, media online dan juga nantinya akan menggelar pameran wisata, itu menjadi rencana kami dalam upaya pengembangan wisata” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Lebih lanjut lagi wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata membenarkan dan menegaskan bahwa:

“...upaya kami di pemda dalam hal ini dinas kepemudaan

olahraga dan pariwisata adalah bagaimana kami berupaya dalam membangun kembali destinasi wisata yang kurang populer, kami juga akan melakukan perbaikan akses jalan meskipun tidak sepenuhnya mulus, setidaknya jalan masuk ke lokasi wisata yang sulit dijangkau itu menjadi mudah dan tidak menyulitkan wisatawan, kayak akses jalan ke wisata kincir angin raksasa yang ada di desa Mattiro-tasi dan puncak Malloci Sidenreng Rappang kecamatan Watang Pulu, akses disana itu masih bebatuan sebagian dan serti jalan pengerasan, jadi kadang masyarakat dan wisatawan kesulitan berjalan, perbaikan dan pembenahan juga kita lakukan dan bekerjasama dengan pihak swasta yang sebelumnya mengelola objek wisata lainnya...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam pengembangan pariwisata seperti upaya pelestarian kembali objek-objek wisata yang sempat terbengkalai serta perbaikan akses jalan untuk lokasi wisata yang selama ini dikeluhkan wisatawan karena sulit dijangkau dengan kondisi jalan yang rusak, dengan ini menjadi upaya bagi pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata dalam hal rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Lanjut wawancara dengan Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa:

“...untuk upaya dinas dalam pengembangannya itu tetap melibatkan unsur-unsur yang terkait dan dinas juga telah melakukan upaya atau beberapa langkah seperti akses jalan yang diperbaiki sama perbaikan objek wisata yang sempat terbengkalai seperti kebun raya Sidenreng Rappang” (Wawancara, 10 Agustus 2022).

Lanjut wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menambahkan dan menjelaskan bahwa :

“saya rasa upaya dinas dalam pengembangan pariwisata itu sudah cukup baik, karena setau saya dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata ini giat dan aktif dan mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di kabuapten Sidenreng Rappang karena aktif saya liat terekspos di sosial media kayak instagram sama facebook....” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Peningkatan upaya Dinas dalam Pengembangan Pariwisata masyarakat juga memberikan penjelasan bahwa :

“...sudah bagus upayanya dinas selama ini untuk pariwisata, karena aktif di sosial media mempromosikan sama upaya perbaikan objek wisata yang ada....” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Lebih lanjut lagi Lurah Lawawoi menjelaskan bahwa :

“pemerintah selalu mengupayakan hal-hal yang baik dalam pembangunan ataupun pengembangan pariwisata, salah satunya ada pemeliharaan objek wisata, ada juga perbaikan jalan untuk akses ke lokasi yang paling utama ” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Sesuai dengan penjelasan informan di atas maka dapat kita ketahui bahwa upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata adalah berupaya memberikan kepuasan terhadap wisatawan atau pengunjung dengan membenahi tempat wisata yang terbengkalai, tidak terurus serta memperbaiki akses jalan.

Pengembangan pariwisata juga sangat mempengaruhi aspek-aspek yang ada. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...tentu saja ada banyak aspek yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata seperti aspek ekonomi dan aspek budaya, aspek ekonomi sangat berpengaruh karena mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat yang berada disekitar lokasi wisata, aspek budaya juga punya pengaruh penting karena ada suasana tambahan ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Lanjut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...pasti ada beberapa aspek-aspek yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata ini, aspek sumber daya juga berpengaruh, kedua itu aspek lingkungan dan aspek budaya, aspek sumber daya ini berpengaruh karena tadinya perekonomian masyarakat itu standar, dengan adanya pengembangan pariwisata maka perekonomian masyarakat dapat meningkat ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Ditambahkan dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi menjelaskan bahwa:

“banyak aspek yang berpengaruh, aspek kehidupan masyarakat disekitar wilayah pariwisata, tentunya dengan pengembangan pariwisata tersebut juga meningkatkan aspek perkeekonomian dan tentunya juga aspek budaya yang berpengaruh untuk daya tarik wisata” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Sesuai dengan penjelasan informan di atas maka, dapat kita ketahui bahwa banyak aspek yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata, salah satunya yaitu aspek ekonomi, aspek budaya dan aspek sosial masyarakat. Pengembangan pariwisata mempengaruhi aspek ekonomi dengan meningkatnya penghasilan masyarakat sekitar lokasi wisata.

Lanjut wawancara dengan Lurah Lawawoi yang menjelaskan

bahwa:

“.....selama ini kalau berbicara pengembangan pariwisata pasti semua aspek berpengaruh, aspek kebudayaan, aspek kemasyarakatan, aspek ekonomi karena disetiap tempat itu memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat pengunjung wisata” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Ditambahkan juga oleh Camat Watang Pulu yang menjelaskan

bahwa:

“....untuk aspek-aspek yang berpengaruh itu saya rasa banyak, tapi paling utama itu untuk pariwisata paling berpengaruh itu aspek budaya, kalau tidak ada budaya pariwisata juga tidak punya nilai lebih, kalau tidak berbudaya wisatawan juga tidak minat untuk berkunjung karena rasa aman dan nyaman yang tidak ada, terus aspek ekonomi juga yang berpengaruh pasti bisa tingkatkan penghasilan warga masyarakat” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Ditambahkan juga dari wawancara masyarakat yang menjelaskan

bahwa:

“...bukan cuman aspek ekonomi yang berpengaruh, tapi aspek nilai – nilai agama juga pastinya berpengaruh, pengaruhnya adalah bagaimana kita manusia lebih mensyukuri ciptaan Yang Maha Pencipta sama juga mengajarkan kita menjaga merawat ciptaan Yang Maha Kuasa ” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa, memang dalam pengembangan pariwisata tentunya memiliki aspek-aspek yang berpengaruh, aspek yang berpengaruh tersebut cenderung meningkatkan kualitas objek wisata tersebut, salah satunya aspek ekonomi, aspek ekonomi sangat berpengaruh karena

melihat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta juga peningkatan pendapatan daerah dan juga ada aspek sosial budaya yang kaitannya erat dengan pariwisata sebagai bentuk daya tarik dari sebuah objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata merupakan hal utama yang harus dijaga dan dipertahankan, potensi produk budaya menjadi nilai tersendiri dalam daya tarik suatu objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan karakteristik produk budaya tersebut sebagai ciri khas budaya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti suku tolotang yang menjadi karakter budaya hanya ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, artinya potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki ciri khas tersendiri sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan lokal Kabupaten Sidenreng Rappang maupun wisatawan luar daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat adalah bahwa tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. dalam pengembangan pariwisata pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat

dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengelola serta berkreasi dalam peningkatan kualitas SDM masing-masing sehingga mampu menjalankan atau mengelola kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Upaya dengan mengikutsertakan masyarakat yang akan mengelola pariwisata mempunyai beberapa tujuan, yakni agar pengembangan pariwisata itu efektif karena kita akan tau kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola pariwisata dan sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa nantinya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata melihat sejauh mana pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengembangan pengelolaan pariwisata.

Hal ini tentunya dijawab langsung berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“....kami sangat memberikan kesempatan terbuka lebar kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan objek pariwisata, karena tempat wisata itu bukan hanya milik pemerintah saja, tetapi wilayah pariwisata itu adalah milik kita semua yang turut dan ikut berpartisipasi dan kita mendukung hal tersebut ”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal ini ditambahkan dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa:

“...tentu kita sangat melibatkan masyarakat dan mendukung penuh dalam pengembangan pariwisata, dengan memberikan lahan untuk buka kios guna memasarkan hasil kerajinan tangan yang mereka buat ” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Hal tersebut juga diperjelas oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...sudah tentu jelas, kami di dinas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan pariwisata, karena yang tau banyak mengenai asal usul wilayah itu adalah masyarakat, kami terus memberikan fasilitas sama masyarakat kayak kita lakukan seminar kepariwisataan sama kita lakukan pelatihan-pelatihan agar supaya masyarakat ini bisa lebih kreatif dan tau cara bagaimana olah tempat wisata ” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Sesuai dengan uraian dari penjelasan informan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam hal mengelola pariwisata yang ada, kesempatan tersebut diberikan tanpa adanya batasan dalam hal pengelolaan, karena pemerintah juga telah memfasilitasi mereka dengan pengetahuan seperti mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan mengenai pariwisata. Pemberian edukasi juga sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat disekitar wilayah wisata supaya masyarakat bisa lebih produktif dalam peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Lanjut wawancara dengan masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“....selama ini kami diberikan kesempatan sama pemerintah

untuk pengelolaan tapi sebagian itu tempat wisata ada swasta yang kelola, dan ada juga masyarakat yang hanya sebatas menjual-jual saja makanan minuman. Sama aksesoris gelang kalung yang masyarakat buat...” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Hal ditambahkan juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“....sudah seharusnya pemerintah dinas ini memberikan kesempatan yang seluasnya kepada masyarakat untuk olah ini pariwisata, tinggal nanti diaturkan berapa persen pajak yang harus mereka keluarkan, kalau kita juga mau menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai penuntasan kemiskinan, maka masyarakat memang harus dikasi ruang dan kesempatan untuk berkarya mengelola pariwisata yang ada, supaya betul-betul bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Lanjut menambahkan Hasil wawancara dengan Bapak Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa:

“.....selama ini memang masyarakat selalu diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata, tapi sebagian kecil ditempat wisata itu sendiri masyarakat yang mengelola, memang diberik kesempatan, tapi ada juga pihak swasta lain yang ikut mengelola tempat wisata bahkan ada kelompok tertentu yang mengelola tempat wisata ” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ada penjelasan bahwa masyarakat harusnya dilibatkan ditempatkan dalam pengelolaan pariwisata bukan memanfaatkan masyarakat, tapi bagaimana pemerintah daerah terus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengelolaan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang diutamakan, tapi masyarakat setempat yang harus diberikan kesempatan luas dalam mengelola pariwisata yang ada.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat juga tentu melibatkan kelompok lain dalam pengembangan pariwisata tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa :

“....tentunya yang pertama itu sudah jelas adalah pemda, terus masyarakat sudah jelas pasti terlibat ada juga pengusaha-pengusaha yang ikut membantu dalam pengembangan wisata terus ada juga pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, semakin banyak yang terlibat itu lebih bagus lagi ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Lanjut wawancara dengan Lurah Lawawoi menambahkan bahwa:

“....perlu memang keterlibatan dari berbagai pihak, yang terlibat itu sudah jelas adalah pemda itu sendiri, ada juga keterlibatan masyarakat sama keterlibatan pihak-pihak yang mendukung dalam pengembangan pariwisata ini ” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Sesuai dengan uraian dari penjelasan informan di atas, maka dapat kita mengetahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tidak terlepas dari campur tangan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata, turut juga yang terlibat adalah masyarakat sebagai bentuk pengembangan ekonomi kreatif ditempat-tempat wisata dan juga keterlibatan pihak atau unsur-unsur yang punya kepentingan seperti pengusaha dan pihak swasta lainnya.

Lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“....banyak yang terlibat, untuk pengembangan pariwisata memang perlu banyak yang terlibat agar supaya menghasilkan tujuan yang maksimal, kalau hanya pemda

sendiri yang terlibat tidak maksimal dan kita akui itu, biasa yang terlibat paling utama itu masyarakat dan pengusaha yang ingin kerjasama dalam mengelola, biasa ada juga ikut pengusaha travel yang mau gunakan jasa angkutan umum atau khusus ” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Menambahkan juga dalam wawancara Lembaga Swadaya

Masyarakat menjelaskan bahwa:

“...keterlibatan semua pihak atau stakeholder memang sangat diperlukan, keterlibatan yah sudah jelas itu adalah pemda itu sendiri, selain itu ada masyarakat, tokoh masyarakat juga bisa terlibat, instansi swasta juga yang ingin terlibat dalam hal pengelolaan dan masih banyak yang bisa ikut terlibat mengelola ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Selain itu dalam wawancara dengan masyarakat yang menambahkan dan menjelaskan bahwa:

“.....kami masyarakat sekitar sangat senang kalau kami juga ikut dilibatkan, artinya kalau hanya pemda sendiri yang bekerja, itu hasilnya tidak cepat terealisasi dan juga mau tidak mau pemda akan melibatkan pihak lain seperti pengusaha-pengusaha yang ingin membantu pasti banyak ” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Keterlibatan masyarakat serta stakeholder atau unsur lainnya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat memiliki dampak yang baik, karena mampu menunjang kebutuhan yang tidak didapatkan oleh pemda itu sendiri, melibatkan semua unsur atau pihak terkait juga mampu mempercepat laju pengembangan pariwisata yang dilakukan, keterlibatan semua pihak juga mesti diperjelas dalam sebuah aturan yang mengikat serta jelas dalam pembagian tugas serta fungsi mereka seperti apa dan juga harus jelas wewenang yang diberikan untuk menghindari hal-hal yang akan menjadi masalah nantinya dikemudian hari.

Proses pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu dibuatkan dalam bentuk aturan atau kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang mendasar dalam prosesnya, seperti kebijakan bagi pengusaha atau pihak swasta yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tersebut, kebijakan dalam hal wewenang serta pembagian post-post dalam pengelolaan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“.....kebijakan kami dalam pengembangan pariwisata ini adalah bentuk dalam legalitas bagi pihak swasta atau pengusaha yang ingin ikut andil dalam pengembangan pariwisata ini, harus jelas administrasinya, masyarakat juga yang ingin mengelola pariwisata harus ikut pelatihan-pelatihan kepariwisataan dalam pengelolaan objek wisata dan kami siapkan semua itu, untuk kelompok masyarakat yang ingin menjadi pengelola silahkan ikuti pelatihan supaya wawasannya lebih terbuka dan lebih kreatif, sama juga itu dibukit puncak bila desa Bila Riase, disana itu kita sudah siapkan homestay dari rumah warga yang lulus seleksi, jadi wisatawan tidak susah lagi cari tempat untuk bermalam, karena kita sudah siapkan ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata menjelaskan bahwa :

“....tentunya ada kebijakan yang kita jalankan dalam pengembangan pariwisata ini, kebijakan itu sudah dibuat dalam bentuk peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata, jadi memang fokusnya ada pada pengembangan pariwisata kincir angin, karena hal itu juga sebagai penyerapan baru APBD bagi Kabupaten Sidenreng Rappang ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Kemudian dipertegas dalam wawancara dengan Kepala Bidang

Pemasaran dan Promosi Pariwisata menjelaskan bahwa :

“....kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia mesti ikut masyarakat atau mendukung segala kebijakan kami, dan alhamdulillah masyarakat telah banyak berpartisipasi dalam segala bentuk pelatihan, ikut seminar dan ikut pelatihanw-pelatihan pengembangan sdm lain, ada yang sudah bisa membuat gelang rajut dan tas-tas rajut, ada juga yang membuat baju-baju kaos yang bertuliskan Kabupaten Sidenreng Rappang dan lain-lain...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Berdasarkan uraian dari penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia telah berjalan sesuai rencana sebelumnya. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah menjalankan pelatihan, serta seminar bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dalam hal mengelola kepariwisataaan, serta bentuk pelatihan yang telah dilalui kelompok masyarakat dengan membuat kerajinan tangan cendera mata, serta bagaimana masyarakat diminta untuk mempersiapkan rumahnya untuk dijadikan homestay. Untuk menjadikan rumahnya sebagai homestay atau rumah singgah bagi wisatawan, maka dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah membentuk tim seleksi karena harus ada syarat yang mereka penuhi untuk bisa menjadi homestay.

Lanjut wawancara dengan masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjelaskan bahwa :

“....kalau berbicara pengembangan sumber daya alam, dinas

sudah lakukan itu, kami diikutkan pelatihan-pelatihan di kantor dinas pariwisata, kami diajari bagaimana itu supaya bisa bagus pengolahan objek wisata tidak asal olah, kami juga diajari bikin kerajinan tangan jadi itu nanti kami bisa buat untuk dijual nantinya ke wisatawan....” (Wawancara, 15 Agustus 2022)

Kemudian ditambahkan oleh informan Lurah Lawawoi yang menjelaskan bahwa :

“....untuk pengembangan sumber daya manusianya pemerintah telah berbuat, kita selalu arahkan sama masyarakat bahwa sering ikuti pelatihan-pelatihan dari dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata agar supaya mereka paham dan mampu mengelola dengan baik objek wisata yang nantinya akan diolah ” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas maka dapat diketahui bahwa, kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung pengembangan dengan memberikan bentuk pendidikan dan pelatihan bagi kelompok masyarakat yang nantinya akan mengelola suatu wilayah pariwisata sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, juga dengan adanya pelatihan yang diberikan secara langsung dalam pembuatan kerajinan tangan, maka masyarakat dapat meningkatkan lagi perekonomiannya. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sebagai upaya pengembangan SDM seperti membuat kontrak dengan pihak swasta yang mengatur kewenangan dalam mengelola pariwisata dengan tetap melibatkan masyarakat.

Setelah kebijakan pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya

Alam bagi masyarakat yang nantinya akan mengelola pariwisata, maka tentunya dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pengembangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...jadi kami dipemda itu terus berupaya dalam memberdayakan masyarakat yang nanti mau mengelola pariwisata, seperti yang sudah kami lakukan itu di wisata puncak bila disana kami sudah meminta masyarakat untuk merubah rumahnya menjadi homestay atau rumah singgah dengan, sehingga kami juga berikan pelatihan dalam membuat kerajinan tangan sebagai cenderamata yang nanti bisa dijual, sama juga seperti di wisata kincir angin disana itu kami suruh masyarakat buat raceare untuk masyarkat yang ingin istirahat, jadi memang kami terus berupaya memberdayakan masyarakat tanpa batas...” (Wawancara, 21 Juli 2022).

Lebih lanjut lagi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa :

“...keberadaan masyarakat dilingkungan pariwisata menandakan bahwa masyarakat lokal siap mendukung kita dengan terus membantu kami dan berupaya sama-sama dalam pengembangan sumber daya manusia, masyarakat lokal juga antusias setiap kali mengikuti seminar kepariwisataan sama pelatihan-pelatihan khusus untuk masyarakat yang nanti mau mengelola...” (Wawancara, 29 Juli 2022).

Hal di atas juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa :

“...jadi upaya-upaya kami selaku pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata sudah jelas seperti apa, kami terus berupaya memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola

potensi pariwisata yang ada, kami juga berikan pelatihan guna nantinya kita akan memberikan kesempatan bagi masyarakat sekreatif mungkin dalam pengelolaan pariwisata dan juga peningkatan perekonomian mereka, selain itu kami juga sudah berikan jalan bagaimana rumah mereka dijadikan homestay, agar supaya masyarakat dan wisatawan dapat berinteraksi sosial....” (Wawancara, 9 Agustus 2022

Berdasarkan uraian dari penjelasan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan wisata adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan seminar keilmuan mengenai pariwisata, serta pemerintah juga terus membuka akses kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui pembuatan kerajinan tangan atau cenderamata yang nantinya akan dijual kepada wisatawan.

Pemerintah membuka peluang dalam pengelolaan pariwisata salah satunya juga pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat homestay yang diperuntukkan bagi wisatawan yang membutuhkan tempat untuk beristirahat, serta juga masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat post-post rest area bagi wisatawan yang berkunjung menikmati. Suasana lokasi wisata dengan santai sambil menikmati hidangan khas Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pendorong adanya aspek-aspek pendukung internal dan eksternal yang menjadi dasar dalam upaya pengembangan pariwisata. Aspek-aspek tersebut tentunya punya pengaruh dalam pengembangan

pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“...kalau berbicara aspek internal yang menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata ini adalah aspek lingkungan sosialnya yang kita liat, terus ada aspek budaya yang menjadi daya tarik suatu objek destinasi pariwisata bagi wisatawan yang datang, terus ada aspek fasilitas, aspek ini harus terpenuhi karena masyarakat atau wisatawan banyak datang berkunjung kalau bagus fasilitasnya, terus ada aspek aksesibilitas, aspek ini paling penting karena kalau gampang dijangkau ke lokasi wisata masyarakat pasti merasa enak nyaman, kalau aksesnya jauh dan jalan rusak pasti kurang wisatawan berkunjung, kalau aspek eksternalnya itu lebih kepada kerjasama dengan pihak luar seperti pengusaha dan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata...”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Lebih lanjut lagi wawancara dengan Kepala Bidang

Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...untuk aspek penganggaran itu lebih masuk ke internal yang menjadi pendukung, kalau aspek eksternal itu bagaimana kita berupaya bisa mendapatkan anggaran langsung turun dari pusat, karena pengembangan ini sangat membutuhkan anggaran banyak...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang

Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

menjelaskan bahwa :

“...jadi kalau aspek pendukung internal itu sudah jelas penganggaran, kalau aspek penganggaran ini tidak terpenuhi pasti pengembangannya akan lambat serta semua rancangannya seperti fasilitas wisata, akses jalan lokasi pasti akan lambat, jadi mesti didukung aspek penganggaran untuk memulai pengembangan, terus kalau aspek eksternal pendukung itu kayak kerjasama dengan pihak luar seperti swasta sama kontraktor ” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang diharapkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, masyarakat yang berada disekitar lokasi objek wisata turut menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam mengembangkan pariwisata. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pelatihan-pelatihan dan edukasi mengenai kepariwisataan mengingat kapasitas masyarakat yang kurang mempunyai sehingga diberikan edukasi dalam bentuk pelatihan.

Pemberdayaan masyarakat juga ditandai dengan diberikannya kesempatan dengan cara masyarakat diharapkan mampu membuat warung makan dan cafe mini untuk wisatawan, membuat villa atau penginapan, penginapan juga ini telah berhasil dibuat oleh masyarakat dalam bentuk homestay yang telah diseleksi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

d. Pendekatan Kewilayahan Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan, dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas dan dapat dibedakan satu sama lain. Pendekatan ini sangat penting untuk

pengembangan wilayah dan juga untuk pendugaan wilayah.

Pendekatan kewilayahan ini sangat diperlukan peran pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menjelaskan bahwa:

“....peran kami selaku pemerintah dalam pengembangan pariwisata ini lebih kepada merancang apa-apa saja yang akan kita kembangkan dan bagaimana prosesnya, serta memberi dukungan terhadap semua stakeholder yang terlibat, kami juga yang bertanggungjawab pada persoalan anggaran pengembangan, karena butuh anggaran besar untuk pengembangan pariwisata ini....” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“....tentunya kami pemerintah mempunyai peran utama dalam pengembangan pariwisata ini, tentunya kami memfasilitasi masyarakat dan stakholde lainnya yang turut ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata ini, jadi sudah jelas perannya kami di pemerintahan....” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi dan menjelaskan bahwa:

“.....perannya kami itu juga memfasilitasi insfratruktur kayak jalan, menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai di tempat objek wisata, banyak peran yang bisa juga kami ambil dalam pengembangan pariwisata ini, salah satunya juga meningkatkan promosi destinasi objek wisata, seperti itu peran yang bisa kami ambil dalam pengembangan pariwisata ini dan masih banyak yang lain ” (Wawancara, 29 Juli 2022).

Dari hasil penjelasan uraian wawancara di atas, maka dapat kita ketahui bahwa peran pemerintah jelas dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memfasilitasi masyarakat serta stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah juga berperan penting dalam akses jangkauan wilayah pariwisata agar mudah dilalui wisatawan. Jangkauan aksesibilitas destinasi wisata merupakan hal penting untuk pertamakali dilakukan dalam pengembangan pariwisata tersebut selain pemerintah harus menyiapkan anggaran dalam pengembangan, pemerintah juga wajib menjalin kerjasama dengan unsur-unsur terkait dalam pengembangan pariwisata tersebut.

Lanjut wawancara dengan Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa:

“saya rasa kita juga harus mengupayakan daya tarik destinasi objek wisata, jadi bukan hanya soal akses jalan, tapi memang destinasi wisata yang punya daya tarik yang unik untuk dikunjungi, jadi pemerintah punya peran dalam hal menarik perhatian wisatawan untuk bisa datang bagaimana daya tarik objek wisata tersebut” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Hasil wawancara juga dengan Lurah Lawawoi yang menjelaskan bahwa:

“peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk pengembangan pariwisata ini, kami juga ditingkat kelurahan punya peran dalam pengembangan pariwisata khususnya yang ada di kelurahan lawawoi ini, kami lakukan koordinasi dengan pengelola destinasi wisata untuk terus menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan bagi wisatawan...” (Wawancara, 12 Agustus 2022)

Uraian penjelasan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa peran pemerintah ditingkat bawah mulai dari lurah hingga camat itu punya masing-masing peran, salah satunya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan destinasi objek wisata, peran pemerintah menjadi salah satu cara penting dalam pengembangan pariwisata agar berjalan sesuai pengembangan dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan pengembangan sebelumnya.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang juga memerlukan aktor-aktor yang dapat mengembangkan potensi di wilayah pariwisata. Aktor ini harus berperan aktif dalam pengembangan pariwisata untuk kemajuan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Aktor ini merupakan unsur yang paling urgent dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada, peran aktor ini bisa lebih dari instansi dinas terkait dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa :

“...yang menjadi aktor utama itu adalah dinas itu sendiri, dan aktor pendukung itu seperti masyarakat, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga stakeholder terkait dan yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam pengembangan pariwisata, aktor-aktor tersebut nantinya yang akan mampu mengembangkan potensi pariwisata kedepannya, bukan aktor yang hanya menjadi beban dan tidak punya tujuan

jelas dalam pengembangan pariwisata ini ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal di atas ditambahkan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi menjelaskan bahwa:

“....untuk aktor dalam pengembangan pariwisata itu sebenarnya masyarakat utamanya, karena masyarakat local yang tau potensi apa di lokasi tersebut dan masyarakat juga yang tau dan paham betul letak geografis wilayah objek destinasi wisata tersebut, dengan budayanya juga mereka pasti paham dan tau dan sisanya perlu didukung penuh oleh pemerintah sebagai aktor fasilitator dalam pengembangan pariwisata...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Berdasarkan uraian penjelasan informan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa aktor yang dapat mengembangkan pariwisata ialah pemerintah itu sendiri dalam hal ini dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan juga paling utama aktor masyarakat yang betul-betul paham letak geografis wilayah pengembangan pariwisata. Aktor tersebut telah memberikan peran penting dalam pengembangan pariwisata tersebut, sedangkan stakeholder lainnya adalah sebagai aktor pendukung dalam pengembangan pariwisata tersebut.

Hasil wawancara dengan Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa:

“....tentunya aktor yang dapat mengembangkan pariwisata lebih tepatnya adalah pemerintah dan masyarakat itu sendiri, kalau unsur-unsur lain itu sebagai pelengkap dalam pengembangan pariwisata, untuk pengembangan pariwisata biasanya masyarakat yang tau betul bagaimana kondisi geografis destinasi objek wisata tersebut...” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Ditambahkan juga hasil wawancara dengan Kepala Desa Bila

Riase yang menjelaskan bahwa :

“...kita semua ini aktor yang bisa mengelola pengembangan pariwisata, jadi bukan hanya segelintir kelompok tertentu, contoh kayak masyarakat sudah jelas mereka perannya dalam pengembangan ini dalam hal mengelola sudah jelas bisa, aktor dari pihak swasta juga bisa mengembangkan pariwisata, banyak aktor dan kita semua bisa...”
(Wawancara, 19 Agustus 2022)

Dari uraian penjelasan informan di atas dapat kita ketahui bahwa, aktor yang terlibat yang dapat mengembangkan pariwisata adalah mereka yang punya potensi besar dalam pengembangan pariwisata, mereka yang kapasitas di dalamnya, hal ini didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan pariwisata juga punya acuan wilayah yang menjadi ikon utama pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“....semua kecamatan kami upayakan menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata ini karena memang masing-masing wilayah punya karakteristik budaya dan daya tarik yang berbeda, tapi memang ada satu wilayah yang kami prioritaskan sebagai acuan pengembangan pariwisata itu ada di kecamatan Watang Pulu, karena disana kita mulai mengembangkan seperti Wisata Kincir Angin dan di Puncak Bila sama Waterpark Sidenreng Rappang, itu yang menjadi acuan kami dalam pengembangan pariwisata” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Daerah yang menjadi acuan ini juga dijelaskan oleh kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa :

“.....sebenarnya ada beberapa wilayah yang punya potensi wisata yang bisa dijadikan acuan tetapi mesti ada satu yang kita utamakan dulu sebagai acuan kita dalam menarik wisatawan lokal maupun luar, kalau destinasi kita sudah ramai, maka kedepannya akan lebih dimaksimalkan lagi pengembangannya ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Juga ditambahkan oleh Camat Watang Pulu yang menjelaskan bahwa:

“.....yang menjadi acuan pengembangan pariwisata kita ini di kecamatan watang pulu ini, kecamatan ini juga dipilih melihatmpotensi wisata yang besar dan memiliki karakteristik yang unik dari yang lain ” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan uraian dari penjelasan informan di atas maka dapat kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki potensi wilayah masing-masing yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pariwisata, tetapi ada satu wilayah yang dijadikan acuan utama dalam pengembangan pariwisata tersebut yaitu kecamatan Watang Pulu, kecamatan Watang Pulu dipilih karena memiliki karakteristik yang unik dan cukup dan budaya yang menarik perhatian wisatawan seperti halnya wisata kincir angin dan wisata puncak bila, tempat tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dengan lingkungan atau panorama alam yang terbuka dan memanjakan mata. Letak geografis yang berbukit sehingga memberikan nuansa yang berbeda dari perkotaan, hal tersebut sehingga wilayah kecamatan menjadi acuan utama pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan pariwisata terdapat juga aspek pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga yang menjelaskan bahwa:

“...kalau bicara aspek yang menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata sebenarnya ada banyak, kayak aspek budaya itu yang mendukung untuk pengembangan kita, karena dengan adanya aspek budaya hal itu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, semakin unik aspek budaya yang ditawarkan didestinasikan wisatawan, pasti semakin menarik perhatian rasa penasaran wisatawan berkunjung, sama aspek fasilitas juga sebagai pendukung pengembangan ini, harus memiliki pengembangan fasilitas yang bagus, agar menjadi daya jual bagi wisatawan yang akan berkunjung, bukan sekedar tempat wisatanya saja, tapi fasilitas yang lengkap itu wajib...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Kemudian ditambahkan wawancara dengan Kepala Bidang

Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...aspek yang mendukung itu dalam pengembangan itu termasuk aspek budaya, karena aspek budaya ini punya daya tarik yang unik, punya nilai seni keindahan yang mempengaruhi suasana destinasi wisata, terus ada aspek akses, aspek akses jalan ini juga sangat menjadi pendukung karena untuk bisa mencapai lokasi destinasi wisata pasti butuh akses yang mudah dan nyaman untuk dijangkau” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hal di atas juga ditambahkan hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa:

“yang menjadi pendukung itu aspek penganggarran, karena harus mempersiapkan anggaran banyak untuk memulai pengembangan pariwisata, bukan anggaran kecil, ada juga aspek budaya sama aspek sosial masyarakatnya” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Aspek-aspek pendukung dalam pengembangan pariwisata ini berdasarkan penjelasan dari ke tiga informan di atas dapat kita ketahui bahwa, ada aspek pendukung utama untuk pengembangan pariwisata

nantinya, yaitu aspek budaya, aspek budaya menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata ini, kedua ada aspek anggaran, aspek ini menjadi pendukung sebagai pengembangan pariwisata karena dalam setiap program kerja pengembangan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak lepas dari membahas anggaran yang akan digunakan, penggunaan anggaran ini tentunya sebagai penunjang jalannya program tersebut.

Hal ini juga ditambahkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjelaskan bahwa:

“....ada sebenarnya 3 aspek pendukung pengembangan pariwisata, pertama itu aspek budaya yang harus terpenuhi, kalau tidak ada itu destinasi juga hambar, kedua itu aspek anggaran, kalau aspek ini tidak ada tidak bisa jalan program, terus ketiga itu aspek sarana prasarana, ini aspek pendukung yang harus juga terpenuhi dalam pengembangan program pengembangan pariwisata yang dilakukan pemda Sidenreng Rappang, kalau sarana dan prasarana tidak memadai kayak jalan atau akses masuk lokasi wisata tidak bagus untuk dilewati, pasti lokasi wisata itu mati ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kewilayahan dalam pengembangan pariwisata telah memenuhi variabel pendekatan wilayah yang dimaksud. Variabel pendekatan kewilayahaan yang dilakukan pemerintah daerah dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata, telah berjalan mulai dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai fasilitator dengan mendukung keterlibatan aktor-aktor yang dapat mengembangkan potensi pariwisata seperti masyarakat dan stakeholder terkait.

Daerah yang telah menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata telah ditentukan sebelumnya hingga aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata tersebut yang paling mendukung ada tiga yaitu aspek budaya, aspek penganggaran dan aspek sarana dan prasarana seperti aksesibilitas dan fasilitas destinasi wisata.

e. Pendekatan Optimalisasi Potensi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendekatan optimalisasi potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan. Optimalisasi potensi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengoptimalan potensi destinasi wisata yang akan dikembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“.....untuk pengembangan pariwisata ini kita sudah lakukan tinjauan langsung di lapangan, kita sudah tentukan apa potensi di lokasi objek wisata tersebut, jadi tinggal kita optimalkan kembangkan potensi destinasi wisata itu, contohnya itu di puncak bila, potensi wisata disana itu adalah padang bukit yang luas, banyak spot yang cantik bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kekinian zaman sekarang, potensi budaya masyarakat juga kita liat disana, potensi sdm masyarakat juga sebelum kita kembangkan lokasi disana itu perlu pemahaman khusus dalam pengelolaan pariwisata, juga target stakeholder untuk ikut berpartisipasi seperti pengusaha swasta dibidang jasa

pariwisata yang buat juga mereka tertarik dalam pengembangan....”(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan mengenai optimalisasi potensi yang ada di wilayah tersebut bahwa:

“.....jadi untuk optimalisasi potensi disuatu wilayah pariwisata itu dengan mengembangkan potensi wisata yang telah kita dapatkan sebelumnya, setelah kita kembangkan maka kita bentuk atau kembangkan juga potensi sumber daya manusia masyarakat lokal dalam hal pengembangan pariwisata, karena kita tau sendiri bahwa masyarakat lokal sama sekali tidak memiliki pengetahuan sebelumnya untuk mengembangkan objek wisata, jadi perlu pengoptimalan potensi masyarakat sama potensi budaya dilokasi destinasi wisata yang ada ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, optimalisasi potensi dalam pengembangan pariwisata yang ada langsung meninjau lokasi wisata yang akan dikembangkan nantinya, serta potensi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan atau peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya.

Optimalisasi potensi juga merupakan langkah dalam pengembangan pariwisata yang ada, pengoptimalan potensi itu untuk menggali sejauh mana nantinya destinasi wisata ini bertahan, karena jika tidak memiliki potensi apapun, maka tidak pantas untuk dijadikan destinasi wisata.

Wawancaranya Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menambahkan bahwa:

“...optimalisasi potensi pariwisata telah ditentukan dan untuk kita kembangkan, potensi yang dimaksud itu potensi budaya yang ada di daerah wisata tersebut, potensi budaya itu perlu untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan nantinya dan optimalisasi potensi sumber daya manusia bagi masyarakat lokal yang ingin mengelola destinasi wisata dan stake holder punya tujuan bersama dan yang sesuai dengan bidangnya ” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa optimalisasi potensi yang ada telah ditentukan sebelumnya dan telah dikembangkan untuk optimalisasi potensi tersebut, potensi yang dimaksud yaitu potensi budaya yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan serta pengoptimalan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat lokal yang ingin mengelola pariwisata, peningkatan potensi SDM ini merupakan langkah bagi masyarakat lokal yang nantinya akan mengelola, karena sebelumnya masyarakat lokal tidak punya pengetahuan dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tujuan yang jelas dan terarah, tujuan tersebut sudah jelas masuk dalam sebuah pengembangan yang matang sehingga diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang maksimal.

Suatu keberhasilan dari pengembangan pariwisata tentunya harus ada indikator yang memperlihatkan bahwa hal tersebut telah berhasil terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...indikator bahwa ini pengembangan berhasil, kita bisa liat banyaknya unsur-unsur atau stakeholder yang siap ikut

berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata ini, adanya juga dukungan dari masyarakat lokal mengenai pengembangan pariwisata ini, indikatornya juga ada pada pengaruh peningkatan pendapatan daerah nantinya ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan

Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...untuk indikator berhasilnya ini pengembangan itu bagaimana partisipasi masyarakat lokal saat mengetahui akan ada pengembangan pariwisata di daerahnya, dan bersyukur bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata sangat tinggi karena upaya pemerintah juga membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta peningkatan PAD di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah jelas naik...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, indikator keberhasilan suatu pengembangan pariwisata dilihat dari seberapa besar antusiasme masyarakat serta stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tersebut, partisipasi masyarakat lokal beserta dukungannya sangat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut serta situasi dan kondisi letak geografis yang baik dan memiliki potensi wisata juga dapat menjadi indikator keberhasilan suatu pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Lanjutan wawancara dengan Camat Watang Pulu juga menambahkan dan menjelaskan bahwa:

“...tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata itu sebenarnya ada pada seberapa banyak aspek- aspek yang berpengaruh di kawasan wisata itu, berapa banyak masyarakat yang setuju dan sepakat sama mendukung dengan adanya itu pengembangan pariwisata khususnya di

kecamatan watang pulu ini, kalau tidak ada aspek yang dipengaruhi atau kurangnya dukungan dari masyarakat lokal itu bisa dipastikan tidak berhasil...” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata harusnya bisa memenuhi aspek-aspek yang ada, salah satunya aspek kehidupan masyarakat serta aspek kelesatarian budaya yang nantinya bisa menjadi daya tarik destinasi objek wisata dan mampu meningkatkan lagi pengembangan pariwisata di kabuapten Sidenreng Rappang.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan LSM yang menjelaskan bahwa:

“.....kalau mau liat berhasilnya ini pengembangan pariwisata stakeholder yang mendukung dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan ini, terus liat aspek-aspek apa yang kena pengaruhnya, kalau masyarakat banyak ikut terlibat dan diberdayakan pasti berhasil ini pengembangan, tapi kalau hanya segelintir pihak yang dilibatkan, tidak berhasil ini pengembangan pariwisata” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal yang sama kembali dijelaskan oleh masyarakat yang menjelaskan bahwa :

“....untuk liat berhasilnya ini pengembangan pariwisata memang perlu libatkan banyak pihak, bukan hanya satu dua pihak, terutama kami masyarakat perlu memang dilibatkan, karena kami juga siap untuk mengelola pariwisata, kan tujuan pengembangan ini juga adalah untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar lokasi wisata, jadi kalau meningkat pendapatan di wilayah pariwisata, berarti berhasil itu pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemda ” (Wawancara, 15 Agustus 2022).

Hasil wawancara dari beberapa informan di atas menjelaskan bahwa, tingkat keberhasilan suatu pengembangan pariwisata atau

indikator keberhasilan pengembangan pariwisata. Keterlibatan stakeholder dibidang yang sama dalam hal ini pariwisata serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata tersebut. Keterlibatan stakeholder seperti pihak swasta yang bergerak dibidang jasa pariwisata atau biro perjalanan pariwisata serta pihak swasta pengusaha lainnya dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata.

Aspek-aspek yang berpengaruh dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti aspek ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta meningkatkan pendapatan daerah atau wilayah pariwisata tersebut, juga salahsatunya aspek budaya.

Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata ini selayaknya menjadi proioritas utama agar supaya jalannya lebih maksimal lagi. Keterlibatan para pihak pengusaha yang bergerak dibidang yang sama seperti biro jasa pariwisata, investor serta stakeholder lainnya. Dalam pengembangan pariwisata ini juga adanya pelaku-pelaku budaya disetiap sektor wilayah yang akan menjadi pengembangan pariwisata. Pelaku budaya juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata tersebut. Adanya pelaku budaya juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan menjelaskan bahwa:

“.....keberadaan pelaku budaya dalam pengembangan pariwisata ini tentunya menjadi point penting juga agar

berjalan pengembangan pariwisata ini, pelaku budaya tentunya adalah kita semua, siapapun yang punya komitmen untuk menjaga melestarikan budaya itu, berarti kita ini pelaku budayanya ” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal serupa juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“sudah jelas kalau yang menjadi pelaku budaya itu kita kita ini, kalau sepakat bersama untuk menjaga kebudayaan yang ada, karena kalau kita jaga kebudayaan yang ada berarti pariwisata kita juga ikut terjaga” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hasil wawancara dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi pelaku budaya dalam pengembangan pariwisata adalah seluruh pihak atau masyarakat yang memiliki visi yang sama dalam menjaga kebudayaan yang ada, pelaku budaya bukan segelintir orang saja, tetapi semua pihak yang siap komitmen dan sepakat dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga juga dapat mempengaruhi jalannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Aspek-aspek yang menjadi pendorong dan penghambat optimalisasi potensi pengembangan pariwisata sebagai bentuk evaluasi dalam pengembangan pariwisata tersebut, seperti apa dan bagaimana kedepannya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penjelasan mengenai aspek-aspek pendorong dan penghambat Pengembangan Pariwisata oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa :

“....untuk aspek partisipasi masyarakat sebagai pendorong dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sebelum melibatkan masyarakat berikan mereka bentuk pelatihan-pelatihan serta pemahaman mengenai pengelolaan pariwisata, juga libatkan banyak stakeholder yang bergerak dibidang jasa yang sama seperti biro jasa pariwisata, pengusaha travel wisata serta libatkan investor dalam pengembangan ini, kalau aspek penghambat itu aspek penganggaran, kadang kita lambat menerima anggaran untuk pengembangan, lebih-lebih untuk perbaikan atau perawatan tempat-tempat wisata nantinya itu yang menghambat karena banyak anggaran yang dibutuhkan, belum lagi aspek infrastruktur yang terbangun tidak maksimal” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan

Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“....kalau bicara aspek pendorong sudah jelas itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ini luar biasa, antusias ikut pelatihan-pelatihan dan kerjasama dengan stakeholder bidang yang sama juga berjalan, banyak pihak swasta pengusaha seperti travel pariwisata yang sudah lakukan kerjasama dengan kita dan masyarakat yang masuk dalam pengelolaan pariwisata, kalau aspek penghambat itu lambatnya keluar anggaran perawatan sama pembangunan infrastruktur ke lokasi objek wisata yang tidak jadi prioritas bagi pemerintah daerah ” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Uraian hasil wawancara beberapa informan di atas menunjukkan bahwa aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata ini telah berjalan sesuai yang diharapkan dengan keterlibatan unsur masyarakat dan stakeholder yang memiliki visi yang sama dibidang pariwisata seperti pengusaha biro jasa pariwisata dan travel jasa pariwisata, serta kerjasama dengan para investor dalam hal peningkatan mutu pariwisata kedepannya.

Aspek pendorong dan penghambat ini juga disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Pariwisata yang menjelaskan bahwa :

“....kalau aspek pendorong itu sudah terpenuhi selama ini, karena masyarakat lokal sangat antusias dengan adanya pengembangan pariwisata ini, mana lagi pihak-pihak swasta yang ikut didalamnya untuk mengembangkan pariwisata, dan ditambah lagi investor yang mau kerjasama, kalau aspek penghambatnya selama ini bukan hanya untuk pariwisata tapi untuk pengembangan yang lain pasti persoalannya keterlambatan anggaran yang turun, seperti anggaran rehabilitasi atau perawatan lokasi objek wisata lambat turun, sama lagi dengan pengadaan jalan masuk kelokasi wisata, harusnya itu diprioritaskan juga supaya makin banyak lagi wisatawan yang datang ditambah lagi aspek penghambatnya itu kurangnya komunikasi keluar dalam mempromosikan lokasi objek atau destinasi wisata yang ada di Sidenreng Rappang, hanya mengandalkan media-media dan sosmed, harusnya undang orang-orang penting, atau rutin adakan kegiatan kepariwisataan atau kebudayaan semacam festival atau karnaval wisata budaya, tidak pernah sama sekali dilakukan hal semacam itu ”
(Wawancara, 9 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata telah menunjukkan tingkat keberhasilan tersebut yaitu aspek tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, peningkatan sumber daya manusia dan juga keterlibatan banyak stakeholder dalam pengembangan pariwisata ini ada juga aspek penghambat selain lambatnya anggaran untuk proses rehabilitasi kawasan wisata dan perawatan objek wisata. Kurangnya komunikasi atau promosi lebih luas, selama ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata hanya berfokus pada media-media online dalam mempromosikan destinasi wisata dan promosi lewat sosial media.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan optimalisasi potensi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan hasil optimal dari potensi wilayah yang menjadi acuan dan keberhasilan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan stakeholder yang bergerak dibidang jasa pariwisata serta membangun kerjasama dengan investor untuk menunjang pada wilayah anggaran. Adapun Aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata ini dapat dikatakan berjalan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini dengan dukungan pemerintah melalui peningkatan SDM dalam pengelolaan destinasi wisata.

Keterlibatan stakeholder atau pengusaha swasta yang bergerak dibidang pariwisata seperti travel pariwisata serta biro jasa pariwisata yang telah bekerjasama dalam pengembangan pariwisata, adapun aspek penghambat yaitu anggaran untuk perawatan dan rehabilitasi objek wisata terlambat turun ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang. Aspek lainnya yaitu kurangnya promosi wisata yang lebih efektif untuk dilakukan, selama ini dinas terkait hanya menggunakan media-media online dan media sosial dalam mempromosikan atau memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang

ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Memperkenalkan destinasi wisata tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan, seperti mengadakan festival budaya atau periwista disalah satu lokasi destinasi wisata yang menjadi ikon utama di Kabupaten Sidenreng Rappang selain itu mengundang seluruh perwakilan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, aspek pendorong ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata kedepannya dan juga pemerintah daerah harus bisa memprioritaskan program pariwisata untuk peningkatan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

f. Pendekatan Otoritas Pemerintah Pengembangan Parawisataan

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam pengembangan stratejik keparawisataan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri pariwisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan stratejik pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan sektor pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang harus terlaksana secara efisien dan efektif.

Otoritas pemerintah melakukan solusi terhadap masalah dalam masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang mencakup semua yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh daerah di Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat, tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga menjamin akan terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata menjadi usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata, agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau oleh pemerintah. Aspek dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan kepariwisataan pada daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak pada wilayah tempat pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kurang mempromosikan dalam bentuk mengadakan kegiatan-kegiatan berupa festival atau karnaval yang bertemakan pariwisata dan kebudayaan, ketika hal itu dilakukan, destinasi wisata di Kabupaten

Sidenreng Rappang akan diketahui banyak orang, bukan hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan seluruh wilayah di Indonesia akan mengetahui bahwa ada destinasi wisata yang unik di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

Pengembangan suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada disuatu daerah maupun negara. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan, usaha atau produksi. Pengembangan daya tarik wisata pasti tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini :

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata
- b. Kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten terhadap sektor pariwisata
- c. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait
- d. Kurangnya kerja sama dengan investor
- e. Belum terdapat sistem promosi yang menarik
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pada dinas terkait dan objek wisata
- g. Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata.

Faktor penghambat pengembangan daya tarik wisata juga berdasarkan pada letak geografis suatu daya tarik wisata seperti wisata alam kadang mengalami permasalahan dengan bencana alam juga mengenai status kepemilikan lahan yang akan menghambat program-program pengembangan daya tarik wisata, kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga) yang menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Hal ini menjadi kendala karena jika adanya kerja sama maka akan membantu dalam masalah dana karena dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan program-program yang telah dirumuskan bersama.

a. Kurangnya Peran Serta Masyarakat Dalam Sektor Pariwisata

Partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses. Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari pengembangan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan genuine participation atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata. hal ini juga dijelaskan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengenai keterlibatan masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata bahwa:

“...keterlibatan masyarakat selama kami ini anggap sudah ada, sudah banyak, karena mereka mampu membantu kami dalam mensosialisasikan keberadaan objek wisata yang ada, juga mereka terlibat sebagai pengelola objek wisata seperti mengelola parkir, ada yang olah tempat jualan, ada juga masyarakat yang buka home stay di sekitar jalan masuk menuju objek wisata, kalau itu home stay kami lakukan klasifikasi apakah cocok atau tidak untuk dijadikan home stay, kami dari dinas sangat apreseasi keterlibatan masyarakat untuk pengembangan pariwisata, tapi kami juga terkendala karena hanya sebagian masyarakat yang terlibat tidak semuanya, sebagai masyarakat itu hanya sebagai penonton, ditambah lagi dengan SDM masyarakat yang sangat kurang, jadi perlu bimbingan dan pendampingan yang maksimal....” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat kita ketahui bahwa keterlibatan masyarakat ini tidak hanya terlibat dalam pengelolaan ataupun sekedar menyediakan sarana dan prasarana wirausaha tetapi juga aktif terlibat dalam mensosialisasikan potensi wisata yang ada, salah satunya Wisata Puncak Bila, masyarakat yang berada disekitar lokasi objek wisata tersebut aktif dalam mensosialisasikan keberadaan objek pariwisata tersebut dengan mengadakan kegiatan-kegiatan wisata alam dan lain-lain serta beberapa masyarakat juga terlibat dalam menyiapkan penginapan berupa home stay yang telah mendapat persetujuan dari dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata.

Hal ini juga diperjelas oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

“...keterlibatan masyarakat lokal saat ini menunjukkan adanya upaya masyarakat ingin mengembangkan pariwisata yang ada, keterlibatan mereka tentunya berdasarkan tingkat pemahaman mereka mengenai kepariwisataan, kendala kami juga kepada daya tangkap masyarakat saat dilakukan

pelatihan dan pemberian pemahaman, banyak yang kurang paham...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat kita ketahui bahwa Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang memang sangat antusias akan tetapi, keterlibatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh semua masyarakat disekitar objek wisata tersebut, masih banyak masyarakat hanya sebagai penonton tidak tidak berperan aktif secara keseluruhan serta kekurangannya lagi adalah tingkat SDM yang sangat kurang karena mengingat latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah. Sehingga dalam pemberian bentuk pelatihan, sebagian masyarakat kurang menangkap materi yang diberikan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Camat Pitu Riase yang menjelaskan bahwa:

“...masyarakat di kecamatan ini memang ada yang terlibat dan ada juga yang tidak mau terlibat alasannya tidak tau, padahal pemerintah dalam hal ini Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah menyiapkan peluang-peluang untuk masyarakat agar mampu terlibat dalam pengembangan pariwisata ini, keterlibatan masyarakat juga turut serta selalu untuk menjaga lingkungan sekitar objek wisata dan jaga kebersihannya, sebagian masyarakat terlibat dalam gotong royong untuk bersih-bersih juga” (Wawancara, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat kita ketahui bahwa keterlibatan masyarakat dinilai sudah ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata namun disisi lain bahwa masyarakat yang berpartisipasi itu tidak sepenuhnya ikut hanya sebagian saja masyarakat

yang ikut andil dalam berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tersebut.

b. Kurangnya Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Terhadap Sektor Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang selain memiliki potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor pertanian dalam arti luas, daerah ini juga memiliki daya tarik di bidang pariwisata. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang kawasan pariwisata dibagi atas kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam, dan kawasan pariwisata buatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang menjelaskan bahwa:

“...kami selaku pemerintah telah menjadikan pengembangan pariwisata ini sebagai prioritas utama pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, kami juga fokus untuk melakukan pembenahan objek-objek wisata yang sebelumnya ada, seperti rumah adat datae itu kami lakukan pembenahan, dan ada beberapa kami lakukan perawatan, jadi ini pariwisata tetap kami prioritaskan dalam pembangunan...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Demikian juga yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi juga menjelaskan bahwa:

“...pembangunan yang tengah gencar dilakukan oleh pemkab saat ini lebih kepada bagaimana mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, jadi memang kita membangun ini yang menjadi prioritas kita adalah pariwisata, memang ada pembangunan yang lain pemkab lakukan seperti inspratraktur juga menjadi prioritas dalam pembangunan ini...” (Wawancara, 29 Juli 2022)

Berdasarkan dari kedua informan di atas maka dapat kita ketahui bahwan pembangunan dalam sektor pariwisata menjadi prioritas utama, namun ada juga pembangunan yang menjadi prioritas yaitu seperti pembangunan inspratruktur jalan dan lain-lain.

c. Kurangnya Kuantitas dan Spesialisasi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Terkait

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah terinventarisasi dengan baik potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya serta peninggalan sejarah.

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta.

Pembangunan pariwisata daerah juga diperlukan adanya pembangunan sumber daya manusia yang berbasis pada kompetensi yang dimana sumber daya manusia dituntut untuk terus berkembang dan memiliki kemampuan yang handal untuk menjawab tantangan globalisasi. Sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi haruslah memiliki

kompetensi yang dibutuhkan agar organisasi tersebut dapat tetap hidup dan berkembang. Oleh sebab itu sebuah organisasi harus memiliki manajemen yang baik agar tujuan suatu organisasi bisa tercapai. Hasil wawancara dengan Kepala Pengembangan Usaha dan Pariwisata terkait SDM di dalam Dinas itu sendiri yang menjelaskan bahwa :

“...kalau berbicara kapasitas sdm yang ada di dalam dinas itu sendiri memang masih kurang selama ini, sdm pegawai memang sangat kurang karena selama ini kami di dinas ini kurang melaksanakan kegiatan pelatihan, atau diklat, dan memang hanya beberapa pegawai atau pejabat disini yang paham dan mengerti bagaimana mengelola atau tingkatkan pariwisata...” (Wawancara, 21 Juli 2022)

Hal serupa juga diperjelas oleh Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa:

“...untuk sdm para pegawai disini itu memang masih kurang dari kata sempurna, masih ada pegawai yang kurang paham apa tupoksinya di dinas ini, mungkin karena penempatan mereka yang kurang tepat disini, karena bukan bidangnya, terus juga keterbatasan anggaran yang kami alami disini untuk lakukan beberapa pelatihan untuk pegawai...” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat kita ketahui bahwa kualitas atau tingkat SDM di dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata sangat kurang, yang difaktori beberapa hal seperti, keterbatasan anggaran untuk melakukan pelatihan, terdapat penempat atau posisi pegawai yang tidak sesuai dengan latar pendidikan atau keahlian sehingga kurangnya konsep pengembangan pariwisata yang ada di Sidenreng Rappang itu sendiri.

Berdasarkan uraian kedua informan di atas, maka dapat kita

simpulkan bahwa kualitas atau spesialis SDM di dinas kepemudaan olah raga dan pariwisata sangat kurang dan jauh dari yang diharapkan sehingga hal tersebut yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Kurangnya Kerjasama Dengan Investor

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi dan untuk perkembangan suatu sektor tertentu sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Adanya investasi dapat membantu suatu masyarakat terus meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional/daerah, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting kegiatan investasi, yaitu:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Investasi di sektor pariwisata pada umumnya memiliki peran penting terhadap perkembangan industri pariwisata, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan

Sektor pariwisata selain menyuntikkan modal untuk infrastruktur

pariwisata baru, juga dapat membantu menarik wisatawan mancanegara. Sedangkan investasi domestik di sektor pariwisata dapat lebih menonjolkan mengenai karakteristik budaya yang ada dan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata di negara berkembang dapat memangkas jarak antara negara berkembang dengan negara maju. Investasi di sektor pariwisata mendukung pengembangan pariwisata untuk memastikan kelayakan destinasi wisata untuk masa depan dan berkontribusi terhadap kapasitas ekonomi.

Investasi di sektor pariwisata memiliki persamaan dan perbedaan dengan investasi di sektor lain. Persamaan yang dimiliki adalah memiliki forward linkage dan backward linkage. Sedangkan perbedaan antara investasi di sektor pariwisata dengan investasi di sektor lain yaitu pada segi modal. Investasi di sektor pariwisata hanya membutuhkan USD 300, sedangkan investasi di sektor lain membutuhkan USD 5.000-USD 100.000. Selain itu, investasi di sektor pariwisata dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Pada sektor pariwisata, dibagi menjadi dua jenis usaha, yaitu usaha hotel dan restoran dan usaha diluar hotel dan restoran. Usaha hotel dan restoran meliputi 1) kawasan pariwisata; 2) kegiatan konsultasi manajemen; 3) jasa agen perjalanan; 4) jasa biro perjalanan wisata; 5) kegiatan taman bertema atau taman wisata; 6) wisata alam; 7) wisata buatan; 8) wisata tirta; 9) kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya dan 10)

jasa kebugaran.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa investor yang telah ikut terlibat atau bekerjasama dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya di wisata puncak bila terdapat investor yang mengelola wisata tersebut dan mengelola beberapa penginapan disekitar objek wisata selain penginapan home stay milik warga. Keterlibatan investor lainnya juga dalam hal jasa biro perjalanan, jasa perjalana serta para fasilitator yang mengelola kegiatan-kegiatan outdoor di permandian kolam renang dan wisata kebun raya.

e. Kurangnya Kuantitas dan Spesialisasi SDM

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan kondisi SDM dalam industri pariwisata, maka pada pembahasan ini akan mengidentifikasi dan merumuskan pengertian SDM pariwisata, jenis dan klasifikasinya, peranannya terhadap perkembangan industri pariwisata, posisi daya saing dan kebutuhan di masa yang akan datang.

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan

dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (service-based organization), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja (Evans, Campbell, & Stonehouse, 2003). Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa kuantitas dan spesialisasi SDM baik itu pemerintah dalam hal ini dinas terkait maupun masyarakat yang terlibat sangat tidak mumpuni mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal kepariwisataan, akan tetapi dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata terus melakukan pembinaan berupa pelatihan serta seminar-seminar kepariwisataan kepada kelompok masyarakat agar SDMnya dapat meningkat sehingga mampu menunjang jalannya pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga

tidak lagi menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata yang ada saat ini berjalan.

f. Belum Terdapat Sistem Promosi Yang Menarik

Strategi Promosi merupakan sebuah sistem atau cara memperkenalkan objek wisata yang ada di daerah. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan dinas yang paling berkompeten dalam tata kelola pariwisata khususnya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Keberadaan objek-objek wisata tentunya merupakan bagian dari peningkatan PAD sehingga perlu daya tarik atau sistem promosi yang baik dan terarah informasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi yang menjelaskan bahwa, sejauh ini langkah yang telah ditempuh atau sistem yang telah dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata lakukan adalah promosi wisata melalui Televisi nasional, media online dan mengundang para vlogger.

g. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja Pada Dinas Terkait dan Objek Wisata

Menurut Suwanto (2004:143) dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan lahirlah unsur baru yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang bergerak disektor wisata, yaitu unsur pelayanan. Persiapan atas jasa dan produk harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan wisatawan. Hal ini mengakibatkan timbulnya spesialisasi

pelayanan yang akhirnya membentuk suatu distribusi pelayanan pendukung industri wisata yaitu sarana dan prasarana, sarana yang dimaksud adalah ketersediaan seperti hotel, penginapan, restoran atau rumah makan serta sarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Tidak semua objek wisata harus sama lengkapnya dengan objek wisata lainnya, sedangkan prasarana yang dimaksud seperti arus listrik, ketersediaan air, jalanan, akses masuk serta jembatan penyeberangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang menjelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki kekurangan, seperti pencahayaan pada malam hari saat akan memasuki jalan masuk menuju lokasi namun dibalik kekurangannya itu mampu terbayarkan dengan indahny suasana dilokasi tersebut dengan fasilitas yang sangat memadai dan mampu memuaskan para wisatawan.

h. Keterbatasan dan Kurangnya Perawatan Fasilitas Penunjang Objek Wisata

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi fisik maupun kehidupan sosial ekonomi penduduk yang berada di sekitar objek wisata. Pariwisata di negara berkembang sering dianggap tidak membawa keuntungan ekonomi yang

signifikan, baik bagi negara tujuan maupun bagi masyarakat lokal. Ketimpangan ini terjadi karena sebagian besar usaha pariwisata skala besar dimonopoli oleh pengusaha besar. Usaha pariwisata jenis ini menetapkan berbagai standar tertentu bagi setiap aspek kegiatannya.

Berdasarkan hasil wawancara penjelasan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bahwa Keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran atau terbatasnya anggaran yang telah dibagi kesetiap objek-objek wisata dan peruntukannya murni untuk perawatan namun terkendal tidak mencukupinya anggaran tersebut dalam melakukan perawatan fasilitas objek wisata hanya melakukan perawatan secukupnya saja.

2. Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam pengembangan strategi keparawisataan daerah harus menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri pariwisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan strategik pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan sektor pariwisata. Bukan saja pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang

harus terlaksana secara efisien dan efektif.

a. *Participatory Planning*

Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dengan cara mengutamakan peran serta masyarakat sejak tahap pengembangan sampai tahap pemeliharaan hasil pembangunannya. Hal ini merupakan suatu wujud penghargaan terhadap kemampuan, harkat, dan martabat masyarakat. Suatu kegiatan pembangunan terdiri dari tahap pengembangan, tahap perancangan, tahap konstruksi, tahap operasional dan pemeliharaan.

Pengembangan partisipatif diartikan sebagai terlibatnya berbagai aktor pembangunan, yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan swasta, yang difasilitasi dan dimotivasi oleh perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ipteks pada setiap tahapan pembangunan, sesuai dengan sumber daya pembangunan yang dikuasainya. Pelibatan atau keikut-sertaan masyarakat yang berkepentingan dengan hasil pembangunan, pada setiap tahapan pembangunan sangatlah penting, agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih didasarkan pada kajian-kajian terhadap masalah yang dihadapi dan potensi yang tersedia di dalam masyarakat.

Melalui metode pengembangan partisipatif diharapkan akan ada

hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan masyarakat secara terus menerus. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses pengembangan berdasarkan kemampuan warga masyarakat.

Pengembangan pariwisata memerlukan Pengembangan partisipatif merupakan sebuah paradigma dalam pengembangan perkotaan yang menekankan kepada keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam proses manajemen strategis dan pengembangan perkotaan atau di tingkat masyarakat dalam bentuk proses pengembangan wilayah perkotaan atau pedesaan dengan melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam pengembangan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.

Keterlibatan stakeholder memang sangat diperlukan guna menunjang efektifitas dan efisiensi pengembangan pariwisata yang akan dilakukan nantinya, melibatkan seluruh stakeholder dalam pengembangan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder baik itu secara teori maupun praktis akan lebih memperjelas pembagian kerjanya. Keterlibatan seluruh stakeholder seperti masyarakat lokal, memperjelas bahwa masyarakatlah yang nantinya punya peran tertentu dalam pengembangan pariwisata, tanpa masyarakat lokal atau kelompok masyarakat, pemerintah tidak paham letak geografis rencana lokasi yang akan

dikembangkan pariwisatanya, kedua adalah pihak swasta sebagai stakeholder yang memiliki peran dalam memberikan masukan gambaran pengembangan pariwisata serta juga sebagai eksekutor ketika sudah berjalan.

Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam mengelola objek wisata. Masyarakat harus aktif dan berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan daerah wisata. Pengembangan wisata harus dilakukan dengan optimal, melihat banyaknya sumber daya alam yang berpotensi menjadi daerah wisata. Keuntungan dari pengembangan daerah wisata yang tepat akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga memajukan daerah tersebut. Pengembangan wisata di suatu daerah tentu membutuhkan peranan dan kontribusi dari stakeholders terkait.

Melibatkan stakeholder sangat menjadi point utama dalam pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, tapi melibatkan stakeholder terkait juga perlu adanya pembagian kerja atau tugas serta pembagian hasil dalam pengelolaan pariwisata, ketika hal tersebut tidak terlaksana maka akan timbul suatu persoalan dikemudian hari.

Stakeholder memiliki peranan penting dalam suatu pengembangan suatu objek wisata. Stakeholder merupakan suatu individu ataupun kelompok ataupun organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan dan

pengaruh oleh kegiatan ataupun program pembangunan. Di setiap kegiatan pembangunan, para stakeholder memiliki sumber daya dan kepentingan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengembangan pariwisata suatu daerah dapat terealisasi dengan optimal.

Keterlibatan stakeholder memang sangat diperlukan guna menunjang efektifitas dan efisiensi pengembangan pariwisata yang akan dilakukan nantinya, melibatkan seluruh stakeholder dalam pengembangan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder baik itu secara teori maupun praktis akan lebih memperjelas pembagian kerjanya. Keterlibatan seluruh stakeholder seperti masyarakat lokal, memperjelas bahwa masyarakatlah yang nantinya punya peran tertentu dalam pengembangan pariwisata, tanpa masyarakat lokal atau kelompok masyarakat, pemerintah tidak paham letak geografis rencana lokasi yang akan dikembangkan pariwisatanya, kedua adalah pihak swasta sebagai stakeholder yang memiliki peran dalam memberikan masukan gambaran pengembangan pariwisata serta juga sebagai eksekutor ketika sudah berjalan.

Pengembangan pariwisata ada tiga stakeholder yang sangat berperan penting, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Stakeholders memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata, tanpa adanya peran dari stakeholders setempat, pengembangan

pariwisata di daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Keterlibatan peran stakeholders menghasilkan pengembangan strategi pariwisata yang diterima dengan baik, menghindari konflik yang timbul selama implementasi kebijakan dan menyatukan mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pariwisata.

Melibatkan pihak swasta dalam hal pengembangan pariwisata itu memberikan hasil yang maksimal dalam berjalannya pengembangan tersebut, karena dengan melibatkan pihak swasta juga membantu pemda baik itu dalam hal pengembangan gambar lokasi, hingga perhitungan anggaran pengembangan pengelolaan pariwisata yang akan dijalankan nantinya.

Kemajuan suatu industri pariwisata tentu tidak lepas dari peran swasta sebagai lembaga pengelola. Swasta sebagai pemilik modal yang kuat, cepat dan tanggap dalam mengikuti perkembangan trend serta pengelola bisnis memiliki peranan dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang bagi pariwisata. Pariwisata membutuhkan banyak sarana pendukung seperti, akomodasi, informasi, travel agent, transportasi, restoran dan lain-lain, sehingga dapat menarik wisatawan dan memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Sektor swasta bersifat lebih unggul dalam mengikuti perkembangan jaman, memiliki keunggulan modal, serta lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan bisnis. Dilibatkannya pihak swasta,

memunculkan harapan swasta mampu menciptakan inovasi dan terobosan yang unik dan menarik bagi pariwisata, serta membantu pemerintah membuka lapangan kerja yang berguna untuk mengurangi angka pengangguran. Swasta memiliki kapabilitas yang memberikan dampak besar bagi. Sektor swasta memiliki lima peran utama dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Ke lima peran tersebut adalah sektor swasta sebagai agen pembangunan dan penyediaan sarana akomodasi, penyedia toko perbelanjaan, penyedia sarana hiburan, pendukung sarana transportasi, dan yang terakhir berperan sebagai pendukung pengembangan atraksi wisata.

Unsur-unsur yang berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi hal penting dalam pengembangan pariwisata, karena mampu menyediakan berupa sarana perbelanjaan bagi wisatawan, dimana sarana ini dibuka langsung dari unsur masyarakat yang telah diatur oleh pemda, begitupun unsur swasta dilibatkan dalam pengembangan pola bentuk lokasi objek wisata serta unsur swasta lainnya seperti kontraktor yang nantiya akan membangun sarana dan prasarana yang telah dirancang sebelumnya oleh konsultan, maka pemda dalam hal ini Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata juga sangat diperlukan keterlibatan masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar lokasi objek wisata tersebut, dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata akan lebih meningkatkan perekonomian mereka. Masyarakat juga memiliki peranan dalam mengelola objek wisata, begitu juga dengan masyarakat sekitar wisata puncak bila ini. Pengelolaan objek-objek wisata bisa dilakukan dengan menjadi pelaku-pelaku usaha dengan membuka usaha disekitar kawasan wisata puncak bila, seperti menyediakan penginapan, warung makan atau restoran.

Masyarakat juga dapat berperan dengan memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata, seperti memberikan idemasan, tenaga, kekayaan, keterampilan dan sosial. Masyarakat dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata. Mereka dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai kesempatan bekerja dan usaha jasa wisata. Selain itu, masyarakat juga berperan untuk dapat menjaga dan merawat lingkungan alam, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan alam. Namun, masyarakat diajak untuk semakin menambahkan keindahan alam, seperti menanam bunga yang akan semakin memperindah wisata.

Peran masyarakat juga belum sepenuhnya terjalankan karena adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas karena adanya keterbatasan modal, sehingga dalam membuat

kreatifitas masyarakat membutuhkan modal serta adanya sosialisasi daerah potensi wisata sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap objek wisata sangat tinggi, pengembangan pariwisata ini membuka peluang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kreatif mereka, namun masih adanya keterbatasan yang dimiliki masyarakat yakni dalam persoalan biaya atau modal usaha, namun dengan hadirnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat sangat mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata dalam pengembangan pariwisata.

Hadirnya homestay milik masyarakat untuk digunakan bagi wisatawan membuktikan bahwa masyarakat begitu aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga ini juga menjadi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata karena dukungan masyarakat melalui partisipasi mereka.

Usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang

berbasiskan alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

Unsur-unsur yang berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi hal penting dalam pengembangan pariwisata, karena mampu menyediakan berupa sarana perbelanjaan bagi wisatawan, sarana ini dibuka langsung dari unsur masyarakat yang telah diatur oleh pemda, begitupun unsur swasta dilibatkan dalam pengembangan pola bentuk lokasi objek wisata serta unsur swasta lainnya seperti kontraktor yang nantiya akan membangun sarana dan prasarana yang telah dirancang sebelumnya oleh konsultan, maka pemda dalam hal ini Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terdapat dua aspek yang paling berpengaruh dalam pengembangan pariwisata yaitu aspek ekonomi dan aspek budaya, aspek ekonomi ini memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan pariwisata dikarenakan banyaknya peluang usaha yang bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tempat wisata seperti pendirian *homestay* atau rumah singgah, *homestay* ini menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam peningkatan pendapatan ekonomi, *homestay* ini adalah rumah milik warga dan sebelum menjadi *homestay* dinas terkait dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah melakukan seleksi karena ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk kategori *homestay*.

Berbagai faktor penarik yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata akan menyebabkan wisatawan akan memilih daerah tujuan wisata tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Medlik, 1980 dan Jackson, 1989 (dalam Pitana dan Gayatri 2005:62), telah mengidentifikasi berbagai faktor penarik dan membedakannya atas sebelas faktor, yaitu: (1) iklim destinasi, (2) promosi pariwisata, (3) iklan, (4) pemasaran, (5) kejadian khusus, (6) potongan harga, (7) mengunjungi teman, (8) mengunjungi kerabat, (9) daya tarik wisata, (10) budaya, (11) lingkungan alamiah dan buatan. Lebih lanjut, ditentukan ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek aksesibilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek daya tarik destinasi; merupakan atribut daerah tujuan wisata yang berupa apa saja yang dapat menarik wisatawan dan setiap destinasi pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
- 2) Aspek transportasi atau sering disebut aksesibilitas; merupakan

atribut akses bagi wisatawan domestik dan mancanegara agar dengan mudah dapat mencapai tujuan ke tempat wisata baik secara internasional maupun akses terhadap tempat-tempat wisata pada sebuah destinasi.

- 3) Aspek fasilitas utama dan pendukung; merupakan atribut amenities yang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama pada sebuah destinasi.
- 4) Aspek kelembagaan; atribut sumber daya manusia, sistem, dan kelembagaannya berupa lembaga pariwisata yang akan mendukung sebuah destinasi layak untuk dikunjungi, aspek kelembagaan tersebut dapat berupa dukungan lembaga keamanan, lembaga pariwisata sebagai pengelola destinasi, dan lembaga pendukung lainnya yang dapat menciptakan kenyamanan wisatawan.

Klasifikasi berbagai barang dan jasa yang mestinya disediakan oleh destinasi pariwisata menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1) *transportation*, (2) *travel services*, (3) *accommodation*, (4) *food services*, (5) *activities and attractions (recreation culture/entertainment)*, dan (6) *retail goods*.

Pada prinsipnya, pengembangan partisipatif merupakan metode atau cara pengembangan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam setiap tahapan pembangunan, sesuai dengan sumber daya pembangunan yang dikuasainya. Dengan cara ini

diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil- hasil pembangunan.

Literatur menunjukkan bahwa Pendekatan Participatory Planning dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan keberhasilan dengan banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang ikut berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, banyaknya yang ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengembangan ini juga memberikan pengaruh besar dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi dan aspek budaya. Partisipasi atau peran beberapa unsur seperti unsur masyarakat dengan keterlibatan mereka untuk berkeasi lebih jauh dalam pemenuhan peningkatan ekonomi kreatif seperti pembuatan cendera mata untuk dijual kewisartawan.

Selain itu, ada juga masyarakat yang menyajikan masakan atau makanan traditional khas Kabupaten Sidenreng Rappang serta adanya rumah masyarakat yang diubah menjadi homestay atau rumah singgah bagi wisatawan yang ingin menginap di daerah bila riase wisata puncak bila. Aspek selanjutnya adalah aspek budaya, aspek budaya memberikan suatu daya tarik bagi wisatawan seperti budaya tari bosara yang disajikan oleh kelompok pemuda desa serta sikap ramah yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menjamu tamu atau wisatawan yang datang berkunjung.

b. Pendekatan Potensi dan Karakteristik Terhadap Pariwisata

Pendekatan Potensi dan Karakteristik sebagai upaya dalam ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata yang akan dikembangkan disuatu wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Potensi dan karakteristik ini merupakan modal utama dalam pengenalan produk budaya sejauh mana peran masyarakat serta peran unsur-unsur yang terlibat dalam ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam aktivitas pengembangan suatu program kerja seperti pengembangan pariwisata.

Salah satu yang dapat dikembangkan dalam pariwisata adalah budaya. Pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Pariwisata budaya meliputi semua pengalaman yang didapat oleh pengunjung dari sebuah tempat yang berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pariwisata budaya adalah jenis pariwisata dengan budaya berupa ide, kegiatan, dan artefak sebagai potensi daya tarik. Pariwisata budaya merupakan industri yang berkembang dengan pesat sejak tahun 90-an melebihi perkembangan industri pariwisata lainnya. Penyebabnya adalah adanya kerinduan terhadap nilai-nilai yang lebih dalam seperti agama, seni, dan sastra terutama oleh wisatawan mancanegara yang sibuk dengan hiruk-

pikuk kehidupan modern.

Pengembangan pariwisata ada ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata, ketersediaan produk budaya berupa kerajinan tangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka serta penampilan-penampilan kebudayaan dalam bentuk kesenian tarian, dan pagelaran musik kecapi, produk budaya ini sangat mendukung keberlanjutan pengembangan wisata tersebut karena antara budaya dan pariwisata adalah kesatuan yang terus melekat dalam perkembangan pariwisata agar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar.

Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah melakukan langkah-langkah dalam pengembangan pariwisata dan promosi wisata, langkah dalam pengembangan itu sendiri berupa pemeliharaan lokasi objek wisata serta melakukan promosi pariwisata melalui aplikasi wiled dan sosial media serta kerjasama dengan TV Nasional dan Media Online agar supaya pariwisata atau objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang itu lebih dikenal disemua daerah bukan hanya di dalam Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang juga berkaitan erat dengan potensi dan karakteristik produk budaya yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah yang dapat dikembangkan

menjadi daya tarik wisata atau segala hal keadaan yang nyata atau dapat diraba, maupun yang tidak dapat diraba, yang digarap diatur dan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan atau diwujudkan.

Potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata menjadi hal utama karena dengan meningkatnya potensi budaya dengan karakteristik yang khas maka akan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar, jika potensi produk budaya meningkat maka pariwisata tersebut telah berhasil dan berkembang.

Upaya Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam pengembangan pariwisata seperti upaya pelestarian kembali objek-objek wisata yang sempat terbengkalai serta perbaikan akses jalan untuk lokasi wisata yang selama ini dikeluhkan wisatawan karena sulit dijangkau dengan kondisi jalan yang rusak, dengan ini menjadi upaya bagi pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata dalam hal rencana pengembangan pariwisata di kabupaten Sidenreng Rappang, namun dibalik pengembangan itu, terdapat kendala yang cukup rumit yaitu masalah finansial, Beberapa definisi muncul untuk menjelaskan arti pengembangan pariwisata itu sendiri.

Pengembangan pariwisata sebagai sebuah proses, berdasarkan penelitian dan evaluasi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kontribusi pariwisata untuk kesejahteraan manusia dan kualitas

lingkungan. Konsep pengembangan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan sampai sekarang pun belum terdapat satu batasan yang dapat diterima secara umum. Bahwa pendekatan potensi dan karakteristik dalam pengembangan pariwisata merupakan point utama dalam pengembangan pariwisata tersebut, potensi dan karakteristik yang dimaksud adalah potensi produk budaya sebagai nilai estetik dalam menarik perhatian wisatawan nantinya.

Daya tarik suatu objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang punya nilai-nilai budaya yang khas dan masih lestari, sedangkan karakteristik produk budaya tersebut sebagai ciri khas budaya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti suku tolotang yang menjadi karakter budaya hanya ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, artinya potensi dan karakteristik produk budaya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki ciri khas tersendiri sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan lokal kabupaten Sidarap maupun wisatawan luar daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. dalam pengembangan pariwisata pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengelola serta

berkreasi dalam peningkatan kualitas SDM masing- masing sehingga mampu menjalankan atau mengelola kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri uni serta sejumlah karakter sebagai berikut:

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional.
2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek -objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitaskomunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.
3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis

masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down.

Mengikutsertakan masyarakat yang akan mengelola pariwisata mempunyai beberapa tujuan, yakni agar pengembangan pariwisata itu efektif karena kita akan tau kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola pariwisata dan sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa nantinya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata melihat sejauh mana pemerintah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengembangan pengelolaan pariwisata.

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam hal mengelola pariwisata yang ada, kesempatan tersebut diberikan tanpa adanya batasan dalam hal pengelolaan, karena pemerintah juga telah memfasilitasi mereka dengan pengetahuan seperti mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan mengenai pariwisata. Pemberian edukasi juga sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat disekitar wilayah wisata supaya masyarakat bisa lebih produktif dalam peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Oleh karena pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang ada penjelasan bahwa masyarakat harusnya dilibatkan ditempatkan dalam pengelolaan pariwisata bukan memanfaatkan masyarakat.

Pemerintah daerah terus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengelolaan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang diutamakan, tapi masyarakat setempat yang harus diberikan kesempatan luas dalam mengelola pariwisata yang ada. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tidak terlepas dari campur tangan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata, turut juga yang terlibat adalah masyarakat sebagai bentuk pengembangan ekonomi kreatif ditempat-tempat wisata dan juga keterlibatan pihak atau unsur-unsur yang punya kepentingan seperti pengusaha dan pihak swasta lainnya.

Keterlibatan masyarakat serta stakeholder atau unsur lainnya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat memiliki dampak yang baik, karena mampu menunjang kebutuhan

yang tidak didapatkan oleh pemda itu sendiri, melibatkan semua unsur atau pihak terkait juga mampu mempercepat laju pengembangan pariwisata yang dilakukan, keterlibatan semua pihak juga mesti diperjelas dalam sebuah aturan yang mengikat serta jelas dalam pembagian tugas serta fungsi mereka seperti apa dan juga harus jelas wewenang yang diberikan untuk menghindari hal-hal yang akan menjadi masalah nantinya dikemudian hari.

Proses pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu dibuatkan dalam bentuk aturan atau kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang mendasar dalam prosesnya, seperti kebijakan bagi pengusaha atau pihak swasta yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata tersebut, kebijakan dalam hal wewenang serta pembagian post-post dalam pengelolaan pariwisata.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia telah berjalan sesuai rencana sebelumnya, pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah menjalankan pelatihan serta seminar bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, pelatihan ini memberikan pengetahuan dalam hal mengelola kepariwisataan serta bentuk pelatihan yang telah dilalui kelompok masyarakat dengan membuat kerajinan tangan cendera mata serta bagaimana masyarakat diminta untuk

mempersiapkan rumahnya untuk dijadikan *homestay*, untuk menjadikan rumahnya sebagai *homestay* atau rumah singgah bagi wisatawan maka dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah membentuk tim seleksi karena harus ada syarat yang mereka penuhi untuk bisa menjadi *homestay*.

Komitmen pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung pengembangan dengan memberikan bentuk pendidikan dan pelatihan bagi kelompok masyarakat yang nantinya akan mengelola suatu wilayah pariwisata sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, juga dengan adanya pelatihan yang diberikan secara langsung dalam pembuatan kerajinan tangan, maka masyarakat dapat meningkatkan lagi perekonomiannya.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sebagai upaya pengembangan SDM seperti membuat kontrak dengan pihak swasta yang mengatur kewenangan dalam mengelola pariwisata dengan tetap melibatkan masyarakat. Setelah kebijakan pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Alam bagi masyarakat yang nantinya akan mengelola pariwisata, maka tentunya dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di wilayah destinasi wisata turut menunjukkan partisipasi atau keikutsertaan mereka dalam mengembangkan pariwisata, pemerintah juga telah memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pelatihan-pelatihan dan edukasi mengenai kepariwisataan mengingat kapasitas masyarakat yang kurang mumpuni sehingga diberikan edukasi dalam bentuk pelatihan, pemberdayaan masyarakat juga ditandai dengan diberikannya kesempatan dengan cara masyarakat diharapkan mampu membuat warung makan dan cafe mini untuk wisatawan, membuat villa atau penginapan.

Penginapan juga ini telah berhasil dibuat oleh masyarakat dalam bentuk homestay yang telah diseleksi oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, namun ada kekurangan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat, kurangnya bantuan modal usaha kepada

masyarakat dari pemerintah, sehingga masyarakat harus mengambil jalan lain dengan melakukan pengkreditan kepada pihak swasta dengan jaminan sertifikat rumah atau tanah, yang menjadi masalah lain adalah ketika masyarakat yang telah meminjam uang kepada bank atau pembiayaan tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka masyarakat tersebut terancam kehilangan rumah atau tanah yang dijadikan alat penjaminan hutang.

d. Faktor Kewilayahan mendukung Pariwisata

Faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan, dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas dan dapat dibedakan satu sama lain. Pendekatan ini sangat penting untuk pengembangan wilayah dan juga untuk pendugaan wilayah. Dalam pendekatan kewilayahan ini sangat diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah

mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Peran pemerintah jelas dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memfasilitasi masyarakat serta stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah juga berperan penting dalam akses jangkauan wilayah pariwisata agar mudah dilalui wisatawan. Jangkauan aksesibilitas destinasi wisata merupakan hal penting untuk pertamakali dilakukan dalam pengembangan pariwisata tersebut selain pemerintah harus menyiapkan anggaran dalam pengembangan, pemerintah juga wajib menjalin kerjasama dengan unsur-unsur terkait dalam

pengembangan pariwisata tersebut.

Peran pemerintah ditingkat bawah mulai dari lurah hingga camat itu punya masing-masing peran, salah satunya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan destinasi objek wisata, peran pemerintah menjadi salah satu cara penting dalam pengembangan pariwisata agar berjalan sesuai pengembangan dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan pengembangan sebelumnya.

Nilai penting kontribusi pariwisata di masa kini memiliki dimensi yang luas, baik secara ekonomi, sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa Negara, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

PP No.67 Th. 1996, “potensi pariwisata nasional yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupansosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.” Pemerintah secara jelas membagi beberapa macam potensi pariwisata yang berada di

dalam negeri. Namun potensi wisata tersebut masih dalam konsep mentah, masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Tujuan pengembangan potensi wisata agar potensi tersebut mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung mencari kepuasan. Daya tarik wisata menjadi poin penting, karena menjadi tujuan utama potensi wisata yang ada. Untuk mendapatkan daya tarik yang tinggi sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola potensi wisata. Seperti tertuang dalam PP No. 50 Th. 2011, "daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Tempat tersebut memiliki indikator yaitu :1. Keunikan. 2. Keindahan. 3. Keaneka Ragaman Kekayaan Alam. 4. Budaya. Dari berbagai penjelasan para ahli dan Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat, dapat disimpulkan Potensi

Pariwisata adalah sumber daya yang mampu dikembangkan lagi menjadi lebih besar dan menarik minat seseorang untuk datang mencari kepuasan.

Setiap daerah memiliki potensi wilayah masing-masing yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pariwisata, tetapi ada satu wilayah yang dijadikan acuan utama dalam pengembangan pariwisata tersebut yaitu kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Watang Pulu dipilih karena memiliki karakteristik yang unik dan cukup dan budaya yang menarik perhatian wisatawan seperti halnya wisata kincir angin dan wisata puncak bila, tempat tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dengan lingkungan atau panorama alam yang terbuka dan memanjakan mata. Letak geografis yang berbukit sehingga memberikan nuansa yang berbeda dari perkotaan, hal tersebut sehingga wilayah kecamatan menjadi acuan utama pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata terdapat juga aspek pendukung dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Aspek-aspek pendukung dalam pengembangan pariwisata ini berdasarkan penjelasan dari ke tiga informan di atas dapat kita ketahui bahwa, ada aspek pendukung utaman untuk pengembangan pariwisata nantinya, yaitu aspek budaya, aspek budaya menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata ini, kedua ada aspek anggaran, aspek ini

menjadi pendukung sebagai pengembangan pariwisata karena dalam setiap program kerja yang dilakukan pemerintah tentunya tidak lepas dari membahas anggaran yang akan digunakan.

Pendekatan kewilayahan dalam pengembangan pariwisata telah memenuhi variabel dimaksud, dalam variabel pendekatan kewilayahan yang dilakukan pemerintah daerah dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata telah berjalan mulai dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai fasilitator dengan mendukung keterlibatan aktor-aktor yang dapat mengembangkan potensi pariwisata seperti masyarakat dan stakeholder terkait, daerah yang telah menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata telah ditentukan sebelumnya hingga aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata tersebut yang paling mendukung ada tiga yaitu aspek budaya, aspek penganggaran dan aspek sarana dan prasarana seperti aksesibilitas dan fasilitas destinasi wisata.

e. Pendekatan Optimalisasi Potensi

Pendekatan optimalisasi potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan. Optimalisasi potensi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengoptimalan potensi destinasi wisata yang

akan dikembangkan.

Optimalisasi potensi dalam pengembangan pariwisata ini dengan cara meninjau langsung lokasi wisata yang akan dikembangkan nantinya, serta potensi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan atau peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya.

Optimalisasi potensi juga merupakan langkah dalam pengembangan pariwisata yang ada, pengoptimalan potensi itu untuk menggali sejauh mana nantinya destinasi wisata ini bertahan, karena jika tidak memiliki potensi apapun, maka tidak pantas untuk dijadikan destinasi wisata.

Optimalisasi potensi yang ada telah ditentukan sebelumnya dan telah dikembangkan untuk optimalisasi potensi tersebut, potensi yang dimaksud yaitu potensi budaya yang nantinya akan menjadi daya tarik wisatawan serta pengoptimalan potensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat lokal yang ingin mengelola pariwisata, peningkatan potensi SDM ini merupakan langkah bagi masyarakat lokal yang nantinya akan mengelola, karena sebelumnya masyarakat lokal tidak punya pengetahuan dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata memiliki tujuan yang jelas dan terarah, tujuan tersebut sudah jelas masuk dalam sebuah pengembangan yang matang

sehingga diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Suatu keberhasilan dari pengembangan pariwisata tentunya harus ada indikator yang memperlihatkan bahwa hal tersebut telah berhasil terlaksana dengan baik.

Indikator keberhasilan suatu pengembangan pariwisata dilihat dari seberapa besar antusiasme masyarakat serta stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tersebut, partisipasi masyarakat lokal beserta dukungannya sangat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut serta situasi dan kondisi letak geografis yang baik dan memiliki potensi wisata juga dapat menjadi indikator keberhasilan suatu pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata harusnya bisa memenuhi aspek-aspek yang ada, salah satunya aspek kehidupan masyarakat serta aspek kelesatarian budaya yang nantinya bisa menjadi daya tarik destinasi objek wisata dan mampu meningkatkan lagi pengembangan pariwisata di kabuapten Sidenreng Rappang.

tingakt keberhasilan suatu pengembangan pariwisata atau indikator keberhasilan pengembangan pariwisata yaitu keterlibatan stakeholder dibidang yang sama dalam hal ini pariwisata serta keteribatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata tersebut. Keterlibatan stakeholder seperti pihak swasta yang bergerak dibidang jasa pariwisata atau biro

perjalanan pariwisata serta pihak swasta pengusaha lainnya dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut dan juga adanya aspek-aspek yang berpengaruh dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti aspek ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta meningkatkan pendapatan daerah atau wilayah pariwisata tersebut, juga salahsatunya aspek budaya.

Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata ini selayaknya menjadi prioritas utama agar supaya jalannya lebih maksimal lagi. Keterlibatan para pihak pengusaha yang bergerak dibidang yang sama seperti biro jasa pariwisata, investor serta stakeholder lainnya. Dalam pengembangan pariwisata ini juga adanya pelaku-pelaku budaya disetiap sektor wilayah yang akan menjadi pengembangan pariwisata. Pelaku budaya juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata tersebut.

Aspek-aspek yang menjadi pendorong dan penghambat optimalisasi potensi pengembangan pariwisata sebagai bentuk evaluasi dalam pengembangan pariwisata tersebut, seperti apa dan bagaimana kedepannya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata ini telah berjalan sesuai yang diharapkan dengan keterlibatan unsur masyarakat

dan stakeholder yang memiliki visi yang sama dibidang pariwisata seperti pengusaha biro jasa pariwisata dan travel jasa pariwisata, serta kerjasama dengan para investor dalam hal peningkatan mutu pariwisata kedepannya.

Aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata telah menunjukkan tingkat keberhasilan tersebut yaitu aspek tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, peningkatan sumber daya manusia dan juga keterlibatan banyak stakeholder dalam pengembangan pariwisata ini ada juga aspek penghambat selain lambatnya anggaran untuk proses rehabilitasi kawasan wisata dan perawatan objek wisata, juga kurangnya komunikasi atau promosi lebih luas, selama ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata hanya berfokus pada media-media online dalam mempromosikan destinasi wisata dan promosi lewat sosial media.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kurang mempromosikan dalam bentuk mengadakan kegiatan-kegiatan berupa festival atau karnaval yang bertemakan pariwisata dan kebudayaan. Destinasi wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang akan diketahui banyak orang, bukan hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan seluruh wilayah di Indonesia akan mengetahui bahwa ada destinasi wisata yang unik di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan optimalisasi potensi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan hasil optimal dari potensi wilayah yang menjadi acuan dan keberhasilan pengembangan pariwisata berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam pengembangan pariwisata dan keterlibatan stakeholder yang bergerak dibidang jasa pariwisata serta membangun kerjasama dengan investor untuk menunjang pada wilayah anggaran.

Adapun Aspek pendorong dalam pengembangan pariwisata ini dapat dikatakan berjalan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini dengan dukungan pemerintah melalui peningkatan SDM dalam pengelolaan destinasi wisata, keterlibatan stakeholder atau pengusaha swasta yang bergerak dibidang pariwisata seperti travel pariwisata serta biro jasa pariwisata yang telah bekerjasama dalam pengembangan pariwisata.

Perawatan dan rehabilitasi objek wisata terlambat turun ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga aspek lainnya yaitu promosi wisata yang lebih efektif untuk dilakukan, selama ini dinas terkait hanya menggunakan media-media online dan media sosial dalam mempromosikan atau memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, padahal dalam memperkenalkan destinasi wisata tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan, seperti mengadakan festival budaya atau periwista

disalah satu lokasi destinasi wisata yang menjadi ikon utama di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kegiatan yang dilakukan dengan mengundang seluruh perwakilan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, aspek pendorong ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata kedepannya dan juga pemerintah daerah harus bisa memprioritaskan program pariwisata untuk peningkatan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka didapatkan *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Otoritas Pemerintah Pengembangan Parawisataan. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari konsep pengembangan pariwisata Sastrayuda (2010) yaitu Pendekatan *Participatory Planning*, Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata, Pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pendekatan kewilayahan, dan Pendekatan optimalisasi potensi.

Pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam pengembangan stratejik keparawisataan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri pariwisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan stratejik pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan sektor

parawisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang harus terlaksana secara efisien dan efektif.

Otoritas pemerintah melakukan solusi terhadap masalah dalam masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang mencakup semua yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh daerah di Sidenreng Rappang. Untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat, tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga menjamin akan terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan pariwisata menjadi usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata, agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau oleh pemerintah. Aspek dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan kepariwisataan pada daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan

dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak pada wilayah tempat pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kurang mempromosikan dalam bentuk mengadakan kegiatan-kegiatan berupa festival atau karnaval yang bertemakan pariwisata dan kebudayaan, ketika hal itu dilakukan, destinasi wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang akan diketahui banyak orang, bukan hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan seluruh wilayah di Indonesia akan mengetahui bahwa ada destinasi wisata yang unik di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.

Pemanfaatan berbagai ragam dalam proses pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam menciptakan peluang pengembangan pariwisata baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan gambaran tersebut, maka dapat dirumuskan proposisi penelitian sebagai berikut:

Proposisi 1: Pemanfaatan pendekatan partisipatif dan potensi wilayah dapat mendorong munculnya kreatifitas pengembangan objek wisata yang pada gilirannya akan dapat menciptakan peluang pengembangan pariwisata secara berkesinambungan.

Proposisi 2: Pengembangan pariwisata dapat berjalan efektif apabila ditunjang oleh faktor pengendalian dan kordinasi lintas kelembagaan dinas yang terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan pendekatan *Participatory*. Hal ini disebabkan karena banyaknya unsur-unsur atau pihak-pihak yang ikut berperan penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Banyaknya keterlibatan atau partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan memberikan dampak besar terhadap aspek ekonomi dan aspek budaya. Misalnya menjamurnya usaha kecil dan menengah di sekitar wilayah destinasi wisata, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sidenreng Rappang baik dari wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Hal ini berdampak pada semakin dikenalnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat wisata yang menarik dan menimbulkan aglomerasi atau pengembangan wilayah secara luas.
2. Faktor pendukung dari pengembangan wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu (1) ***Participatory Planning***, pengembangan

partisipatif diartikan sebagai terlibatnya berbagai aktor pembangunan, yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan swasta, yang difasilitasi dan dimotivasi oleh perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ipteks pada setiap tahapan pembangunan, sesuai dengan sumber daya pembangunan yang dikuasainya. Pelibatan atau keikut-sertaan masyarakat yang berkepentingan dengan hasil pembangunan, pada setiap tahapan pembangunan sangatlah penting, agar pembangunan yang dilakukan dapat lebih didasarkan pada kajian-kajian terhadap masalah yang dihadapi dan potensi yang tersedia di dalam masyarakat di Kabupaten Sidrap. (2) **pendekatan potensi dan karakteristik terhadap pariwisata**, pendekatan Potensi dan Karakteristik sebagai upaya dalam ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata yang akan dikembangkan disuatu wilayah pedesaan ataupun perkotaan. Potensi dan karakteristik ini merupakan modal utama dalam pengenalan produk budaya sejauh mana peran masyarakat serta peran unsur-unsur yang terlibat dalam ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata serta langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam aktivitas pengembangan suatu program kerja seperti pengembangan pariwisata. (3) **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**, masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari pembangunannya

sendiri. dalam pengembangan pariwisata pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengelola serta berkreasi dalam peningkatan kualitas SDM masing- masing sehingga mampu menjalankan atau mengelola kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. (4) **Faktor Kewilayahan mendukung Pariwisata**, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan, dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas dan dapat dibedakan satu sama lain. Pendekatan ini sangat penting untuk pengembangan wilayah dan juga untuk pendugaan wilayah. Dalam pendekatan kewilayahan ini sangat diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. (5) **Pendekatan optimalisasi potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang**. Dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan. Optimalisasi potensi dalam pengembangan pariwisata ini dengan cara meninjau langsung lokasi wisata yang akan dikembangkan nantinya, serta potensi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan atau

peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya instansi terkait sebagai upaya untuk menyusun rencana strategis dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata serta seluruh instansi yang terkait dalam pengembangan pariwisata.

2. Aspek Teoretis

Secara akademis bagi mahasiswa penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengembangan pariwisata, serta bermanfaat untuk mengaplikasikan teori dan konsep, mengidentifikasi, menggambarkan, menganalisis serta mengevaluasi suatu daya tarik pariwisata. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dalam pengembangan pariwisata dan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya.

C. Novelty Penelitian

Berdasarkan konsep Sastrayuda (2010) bahwa pengembangan Pariwisata yaitu pendekatan Participatory Planning, Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata, Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana, dan pendekatan optimalisasi potensi.

Penelitian yang dilakukan pada dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang menemukan implikasi yaitu adanya **Pendekatan otoritas pemerintah dalam pengembangan parawisata daerah Kabupaten Sidenreng Rappang** yang dapat menjembatani berbagai kepentingan sektor terkait dan para pelaku industri parawisata melalui produk kebijakannya. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan keparawisataan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan sektor parawisata di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting, namun yang lebih urgen tugas dan fungsi pemerintah yang harus terlaksana secara efisien dan efektif.

D. Rekomendasi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang baiknya memerhatikan aspek *participatory planning*, potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata, pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana, dan pendekatan optimalisasi potensi serta otoritas pemerintah dalam mengembangkan pariwisata.

Otoritas pemerintah melakukan solusi terhadap masalah dalam masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang mencakup semua aspek pariwisata yang ada di daerah Sidenreng Rappang. Untuk mencapai tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat, tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga menjamin akan terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses kebijakan publik akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah. Pariwisata memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W., 2009, *Menggugat Pengembangan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: ITS Press.
- Arahi, Y., 2005, *Rural Tourism in Japan: The Regeneration of Rural Communities dalam The Development of Rural Tourism*.
- Ardana, I.G., 2007, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global*, Denpasar : Pustaka Tarukan Agung.
- Arnstein, S. R., 1969, *A Ladder Of Citizen Participation* JAIP, Vol 35 . No 4, pp 216-224 dilihat pada <http://Lithgow-Schmidt/Sherry-arnstein/ladder-of-citizenparticipation>. Pdf tanggal 30 Oktober 2009.
- Arsyad, L., Mulyo, J. H., Satriawan, E., Fitriady, A., 2011, *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Augustyn, M., "National Strategies for Rural Tourism Development and Sustainability: The Polish Experience", *Journal of Sustainable Tourism*, 6 (3) pp 191-208.
- Ade Irma Suryani, (2007). "Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal", *Jurnal Spasial*. Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Bahaire, T., and Martin, E.W., 1999, "Community Participation in Tourism Planning and Development in the Historic City of York, England" dalam *Current Issues in Tourism*, pp 243-264.
- Binahayati Rusyidi., Muhammad Fedryansah., (2019), "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, pp 155-165.
- Bambang Sunaryo, 2013, "Kebijakan Pembangaunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia", Yogyakarta: Gava Media.
- BKPM. (2017). Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diakses melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal: <http://www.bkpm.go.id/> pada tanggal 1 Maret 2018
- Creswell, John W. (2017). *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Keempat, Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Dodi Widiyanto., Joni Purwo Handoyo., Alia Fajarwati. (2008). "Pengembangan Pariwisata Pedesaan (Suatu Usulan Strategi Bagi Desa Wisata Ketinggian)", *Jurnal Bumi Lestari*, pp 205-210.
- Damanik, J., dan Weber, H., 2006, *Pengembangan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Damanik, J., 2013, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, A., 2009, *Pembangunan Masyarakat Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Dewi, Made Heny Urmila., 2004, *Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Tiga Desa Kawasan Wisata Lovina*, Denpasar: Lembaga Penelitian, Universitas Udayana.
- Deddy Prasetya Maha Rani., (2014). "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421.
- Dewi, Made Heny Urmila, 2014, "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Tabanan, Bali", *Disertasi*, Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang, 2014, *Objek dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang*, Badung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badung.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2010). *Tourism*. Cheltenham, United Kingdom: Channel View Publications.
- Ginting, G. Kismartini, Yuniningsih, T. & Afrizal, T. (2022). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *PERSPEKTIF*, 11 (1): 8-15.
- Goodwin, H. 1996. *In Pursuit of Ecotourism, Biodiversity and Conservation*. Netherland : Springer.
- Holland, J., Dixey, L., Burian, M. (2003), *Tourism in Poor Rural Areas: Diversifying the Product and Expanding the Benefits in Rural Uganda and the Czech Republik*, Working Paper No.12.
- Heri, Larasati. 2011. *Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pati*. *Jurnal Universitas Diponegoro*.

- Hutagaol, P., 2001, *Paradigma Baru Pengembangan Perdesaan Menuju Masyarakat dan Kawasan Perdesaan yang Mandiri dalam Era Otonomi Daerah*, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vo;3(1), pp.15--36.
- Ife, J.F.T., 2008, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ILO, 2004, *Pembangunan Perdesaan: Akses, Ketenagakerjaan, dan Peluang Meraih Pendapatan, Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: ILO.
- Illich, I., 2001, *Menggugat Kaum Kapitalis*, Penerjemah Loly Nuryafitri, Yogyakarta: Penerbit Melibas.
- Iskandar, Juliandi, 2019. *Pendekatan Participatory Planning Pada Pengembangan Ruang Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*. FTSP, Universitas Trisakti, Jakarta
- Josie Geraldly Meray , Ir. Sonny Tilaar, Esli D. Takumansang. 2016. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas*. CORE is not-for-profit service delivered by the Open University and Jisc.
- Kuntarto, A., & Murnisari, R. (2022). Analisis potensi wisata dan kesadaran wisata terhadap kepuasan wisatawan domestik (studi pada pantai pepulo di desa sumbersih, kecamatan panggungrejo, kabupate Blitar). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 36–49.
- Manurung, R., 2019, Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Deliserdang Kecamatan Stm Hilir (Studi Kasus Objek Wisata Pemandian Air Panas dan Goa Penen), *Jurnal Manajemen Tools* Vol. 11 No. 2 Desember 2019 ISSN : 2088-3145
- Marsuki, & Suryana, A. S. (2007). *Iklim Investasi Daerah*. Jakarta: KAS>Z.
- Morel, E., and Widianingsih, 2007, *Participatory Planning In Indonesia: Seeking a New Path To Democracy*. *Policy Studies* 28 (1)1--15.
- Pateman, C., 1990, *Participation and Democratic Theory* elbourne:Cambridge University Press.
- Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2014, *Monografi Desa Compong 2014*, Badung: Pemerintah Kabupaten.

- Peric, J., & Radic, M. N. (2011). Sustainable Foreign Direct Investment In Tourism Sector Of Developing Countries. *Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Enviromental and Economics Impact*, 1(1), 263-278.
- Rotua Kristin Simamora., Rudi Salam Sinaga, (2016), "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016): 79-96.
- Samimi, A. J., Sadeghi , S., & Sadeghi, S. (2013, July). The Relationship Between Foreign Direct Investment and Tourism Development: Evidence From Developing Countries. *Institutions and Economies*, 5(2), 59-68.
- Sanoff, H., 2000, *Community Participation Methods in Design and Planning*, Brisbane : John Wiley & Sons, Inc.
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. "*Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata*". Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure. http://file.upi.edu.gumelar_s.go.id [15 April 2015].
- Sedarmayanti, 2010, "*Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*", cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung.
- Sefira Ryalita Primadany,. Mardiyono,. Riyanto,.2006. "*Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, pp. 135-143
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sefira Ryalita Primadany,. Mardiyono,. Riyanto,.2006. "*Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, pp. 135-143.
- Soekadijo, R.G. 1995. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai System Linkage*. Bandung : Angkasa

- Tunggul Prasodjo. 2017. *“Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik”*, Jurnal Office, Vol.3, No.1, 2017.
- Tri Yuniningsih, 2019. *”Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang”*. Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (84 – 93).
- United Nations. (2007). FDI in Tourism: The Development Dimension. NewYork: United Nations
- Yudha Eka Nugraha, 2020, *Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Tulakadi Kawasan Perbatasan Indonesai*.
- Wearing, S. L.,and Donald, Mc., 2001 *“The Development of Community Based Tourism: Re- Thinking The Relationsgip between Tour Operators andDevelopment Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities”*. Journal of Sustainable Tourism.